



Katalog: 9199017

Edisi 82
Maret 2017

Laporan Bulanan **Data Sosial Ekonomi**

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 82
Maret 2017

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi

<http://www.bps.go.id>

Laporan Bulanan

Data Sosial Ekonomi

Maret 2017

ISSN: 2087-930X

Katalog BPS: 9199017

No. Publikasi: 03220.1703

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xvi + 123 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Direktorat Statistik Distribusi
Direktorat Neraca Produksi
Direktorat Statistik Harga
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata
Direktorat Neraca Pengeluaran
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Direktorat Statistik Industri
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

HEADLINES

1. Inflasi

Pada Februari 2017 terjadi inflasi sebesar 0,23 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 1,21 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,83 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen, meningkat dibanding pertumbuhan tahun 2015 sebesar 4,88 persen.
- PDB triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 4,94 persen dibanding triwulan IV-2015 (*y-on-y*) dan mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen dibanding triwulan III-2016 (*q-to-q*).

3. Ekspor

- Nilai ekspor Januari 2017 sebesar US\$13,38 miliar, turun 3,21 persen jika dibanding ekspor Desember 2016 dan naik 27,71 persen dibanding ekspor Januari 2016.
- Nilai ekspor nonmigas Januari 2017 mencapai US\$12,11 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,28 miliar, hasil industri pengolahan US\$9,87 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,96 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Januari 2017 sebesar US\$11,99 miliar, turun 6,21 persen dibanding impor Desember 2016 dan naik 14,54 persen jika dibanding impor Januari 2016.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Januari 2017 mencakup barang konsumsi sebesar US\$1,01 miliar, bahan baku/penolong US\$9,06 miliar, dan barang modal US\$1,92 miliar.

5. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Januari 2017 naik masing-masing sebesar 0,77 persen dan 0,29 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya.
- Upah riil harian buruh tani Januari 2017 turun sebesar 0,02 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya. Upah riil harian buruh bangunan Januari 2017 turun 0,67 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya.

6. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Perdesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP Februari 2017 turun 0,58 persen dibanding Januari 2017.
- Pada Februari 2017, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,38 persen.
- NTUP Februari 2017 turun 0,56 persen dibanding Januari 2017.

7. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras Februari 2017 sebesar Rp13.202,00 per kg, turun 0,15 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga cabai rawit naik 13,70 persen; minyak goreng naik 1,52 persen; sedangkan daging ayam ras turun 6,08 persen.

8. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan IV-2016 naik 1,77 persen terhadap triwulan III-2016 (*q-to-q*). Demikian pula terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) naik 3,34 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas Februari 2017 naik sebesar 0,17 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Januari 2017 IHPB Umum naik sebesar 0,74 persen dibanding bulan sebelumnya.

9. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi bisnis pada triwulan IV-2016 lebih rendah dibandingkan dengan optimisme pada triwulan III-2016. Nilai ITB triwulan IV-2016 sebesar 106,70, sedangkan nilai ITB triwulan III-2016 sebesar 107,89.
- Kondisi bisnis triwulan I-2017 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV-2016. Perkiraan nilai ITB triwulan I-2017 sebesar 105,81, sedangkan nilai ITB triwulan IV-2016 sebesar 106,70.
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan IV-2016 menurun dibandingkan triwulan III-2016. Nilai ITK triwulan IV-2016 sebesar 102,46, sementara triwulan III-2016 sebesar 108,22.

- Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2017 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV-2016. Tingkat optimismenya diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan I-2017 sebesar 106,30, sedangkan nilai ITK triwulan IV-2016 sebesar 102,46.

10. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan IV-2016 naik 2,06 persen dibanding triwulan IV-2015 (*y-on-y*) dan mengalami penurunan 0,34 persen dari triwulan III-2016 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan IV-2016 naik 4,88 persen dibanding triwulan IV-2015 (*y-on-y*) dan mengalami kenaikan 0,51 persen dari triwulan III-2016 (*q-to-q*).

11. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman selama Januari 2017 mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 26,58 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada bulan yang sama tahun 2016.
- TPK Hotel Berbintang pada bulan Januari 2017 mencapai 50,92 persen atau naik 1,59 poin dibanding TPK Januari 2016, namun mengalami penurunan 5,58 poin dibandingkan TPK Desember 2016.

12. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari 2017 turun 6,63 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Januari 2017 turun 8,14 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Januari 2017 turun 2,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Januari 2017 turun 3,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Januari 2017

- Rupiah terapresiasi 0,65 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terdepresiasi 3,81 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 2,27 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terdepresiasi 1,69 persen terhadap euro.

14. a. Kemiskinan September 2016

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

b. Ketimpangan Pengeluaran September 2016

Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,394. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,402.

15. Perdagangan Komoditas Strategis 2016

- Pola utama distribusi perdagangan di Indonesia untuk komoditas:
 - Beras: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Minyak goreng: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Gula pasir: Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Telur ayam ras: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
- Persentase penjualan beras pada pola utama distribusi perdagangan tahun 2016 lebih kecil dibandingkan tahun 2015.
- Potensi pola terpanjang distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan potensi pola terpendek distribusi perdagangan beras dan telur ayam ras terjadi di Provinsi Aceh, gula pasir di Provinsi Jambi, minyak goreng di Provinsi Bengkulu.

16. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)

- Pembangunan TIK di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. IP-TIK Indonesia tahun 2012 sebesar 4,24; tahun 2013 sebesar 4,50; tahun 2014 sebesar 4,59; dan pada tahun 2015 sebesar 4,83 pada skala 0–10.
- Pada tahun 2012–2015, subindeks penyusun IP-TIK Indonesia yang memiliki nilai tertinggi adalah subindeks keahlian TIK, diikuti subindeks akses dan infrastruktur TIK, dan yang terendah adalah subindeks penggunaan TIK.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Maret 2017 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. Februari 2017), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan IV-2016), ekspor-impor (s.d. Januari 2017), upah buruh (s.d. Januari 2017), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. Februari 2017), harga produsen (s.d. triwulan IV-2016) dan harga perdagangan besar (s.d. Februari 2017), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan IV-2016), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan IV-2016), pariwisata (s.d. Januari 2017), transportasi (s.d. Januari 2017), data kemiskinan (September 2016), tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia September 2016, nilai tukar eceran rupiah Januari 2017, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Tahun 2012–2015, serta Perdagangan Komoditas Strategis 2016.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 10 Maret 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

HEADLINES.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
GLOSARIUM.....	1
FOKUS PERHATIAN.....	13
I. INFLASI FEBRUARI 2017.....	23
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2016.....	28
III. EKSPOR JANUARI 2017.....	40
IV. IMPOR JANUARI 2017.....	45
V. UPAH BURUH JANUARI 2017.....	52
VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN FEBRUARI 2017.....	54
VII. HARGA PANGAN FEBRUARI 2017.....	61
VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN IV–2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR FEBRUARI 2017.....	69
IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN IV-2016.....	80
X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN IV-2016.....	88
XI. PARIWISATA JANUARI 2017.....	93
XII. TRANSPORTASI NASIONAL JANUARI 2017.....	97
XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH JANUARI 2017.....	100
XIV. KEMISKINAN SEPTEMBER 2016.....	105
XV. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2016.....	115
XVI. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK), 2012–2015.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Februari 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	25
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Februari 2017 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100).....	25
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)	26
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen).....	26
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Desember 2016–Januari 2017 (persen)	27
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	29
Tabel 2.2	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha.....	30
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen).....	31
Tabel 2.4	Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran	32
Tabel 2.5	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	33
Tabel 2.6	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan IV-2016 (persen).....	34
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen)	36
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (triliun rupiah).....	37
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen)	38
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)	38
Tabel 2.11	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016	39
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)	41
Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan, 2015–2016.....	42
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ).....	42

Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)	43
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia, 2014–2016 (FOB: juta US\$).....	43
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya, Januari 2016 dan 2017	47
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia, Januari 2016–Januari 2017.....	47
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya, Januari 2016 dan 2017	48
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2017	48
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari 2016 dan 2017	49
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Januari 2017 (Nilai CIF: Juta US\$).....	49
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari 2017 (juta US\$).....	50
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Januari 2016–Januari 2017 (miliar US\$)	50
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Januari 2017	51
Tabel 5.1	Rata-rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah), Januari 2015–Januari 2017	53
Tabel 6.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)	56
Tabel 6.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran, Februari 2015–Februari 2017	59
Tabel 6.3	Tingkat Inflasi Perdesaan Februari 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	60
Tabel 6.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya (2012=100)	60
Tabel 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Februari 2016–Februari 2017	62
Tabel 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, Februari 2016–Februari 2017	64

Tabel 7.3	Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>), Februari 2016–Februari 2017	65
Tabel 7.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok, Februari 2016–Februari 2017 (rupiah).....	67
Tabel 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor, Triwulan IV-2016.....	70
Tabel 8.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor, Triwulan IV-2016	74
Tabel 8.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia, Desember 2016–Februari 2017, (2010=100).....	76
Tabel 8.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Februari 2017 (2010=100).....	76
Tabel 8.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Februari 2017 Menurut Jenis Bangunan (2010=100)	78
Tabel 9.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2016 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha	81
Tabel 9.2	Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017 Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk.....	82
Tabel 9.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 dan Triwulan IV-2016 Menurut Variabel Pembentuk.....	84
Tabel 9.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017 Menurut Variabel Pembentuk.....	86
Tabel 9.5	Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV-2015–Triwulan IV-2016 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi	87
Tabel 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan, 2014–2016 (persen) (2010=100)	89
Tabel 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan, 2014–2016 (persen) (2010=100).....	89
Tabel 10.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	90
Tabel 10.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan, Triwulan I-2014–Triwulan IV-2016 (persen).....	92

Tabel 10.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan IV-2016 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen).....	92
Tabel 11.1	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia	93
Tabel 11.2	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu, Januari 2016–Januari 2017	96
Tabel 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi, Januari 2016–Januari 2017	99
Tabel 14.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016.....	106
Tabel 14.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, September 2016.....	107
Tabel 14.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016	109
Tabel 14.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2016	110
Tabel 14.5	Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2015–September 2016.....	114
Tabel 15.1	Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Nasional Menurut Komoditas dan Fungsi Kelembagaan.....	117
Tabel 16.1	IP-TIK Indonesia, 2012–2015	119
Tabel 16.2	Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2012	120
Tabel 16.3	Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2013	120
Tabel 16.4	Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2014	121
Tabel 16.5	Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2015	121

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2015–2017.....	23
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017	27
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d Triwulan IV-2016 (persen).....	28
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan IV-2016 (persen).....	29
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2016 (persen).....	32
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2016 (persen)	33
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen).....	35
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB), Januari 2015–Januari 2017	40
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF), Januari 2016–Januari 2017	45
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF), Januari 2016 dan 2017.....	46
Grafik 5.1	Rata-rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan, Januari 2015–Januari 2017	52
Grafik 6.1	Nilai Tukar Petani (NTP), Februari 2016–Februari 2017 (2012=100).....	54
Grafik 6.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), Februari 2016–Februari 2017 (2012=100)	55
Grafik 6.3	Inflasi Perdesaan, Februari 2015–Februari 2017	58
Grafik 7.1	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas, Februari 2016–Februari 2017	61
Grafik 7.2	Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas, Februari 2016–Februari 2017	63
Grafik 7.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok, Desember 2015–Februari 2017 (rupiah)	68

Grafik 8.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor Triwulan IV-2013 s.d. Triwulan IV-2016	70
Grafik 8.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia, Februari 2014–Februari 2017	77
Grafik 8.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Februari 2016–Februari 2017	79
Grafik 9.1	Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2011–Triwulan IV-2016 dan Perkiraan Triwulan I-2017.....	83
Grafik 9.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2016 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	85
Grafik 9.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi.....	86
Grafik 10.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Triwulan I-2015–Triwulan IV-2016	88
Grafik 10.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Triwulan IV-2014–Triwulan IV-2016.....	91
Grafik 11.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk, Januari 2015–Januari 2017	94
Grafik 11.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Januari 2015–Januari 2017.....	95
Grafik 12.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi, Januari 2016–Januari 2017	97
Grafik 13.1	Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Januari 2017 dibanding Desember 2016 M.IV).....	104
Grafik 13.2	Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Minggu Terakhir).....	104
Grafik 14.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2016–September 2016	105
Grafik 14.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , 2010–September 2016.....	111
Grafik 14.3	Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah, September 2015–September 2016	112
Grafik 16.1	Kontribusi 11 indikator terhadap IP-TIK, 2015.....	119
Grafik 16.2	IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2012	122

Grafik 16.3 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2013122

Grafik 16.4 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2014123

Grafik 16.5 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2015123

<http://www.bps.go.id>

GLOSARIUM

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK). Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi. IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*. Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*.

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya.

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah. Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya.

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak. Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*. Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun

PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi

PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap kategori/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

Pertumbuhan ekonomi (*y-on-y*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi (*q-to-q*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi (*c-to-c*) adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber pertumbuhan (*source of growth*) menunjukkan sektor atau komponen pengeluaran PDB yang menjadi penggerak pertumbuhan. Sumber pertumbuhan diperoleh dengan cara mengalikan laju pertumbuhan ekonomi sektor atau komponen pengeluaran dengan *share* perubahan sektor atau komponen pengeluaran terhadap perubahan PDB.

PDB Perkapita adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

3. Ekspor-Impor

Total nilai ekspor adalah jumlah nilai *Free on Board* (FOB) seluruh barang-barang ekspor yang keluar dari daerah pabean Indonesia.

Free on Board (FOB) adalah nilai barang sampai di pelabuhan muat setelah barang dimuat ke kapal.

Total nilai impor adalah jumlah nilai *Cost Insurance Freight* (CIF) seluruh barang-barang ekspor yang masuk ke daerah pabean Indonesia.

Cost Insurance Freight (CIF) adalah nilai barang ketika sampai di pelabuhan bongkar (Indonesia), termasuk harga barang, ongkos angkut (*freight*) dan asuransi (*insurance*). $CIF = FOB + Insurance + Freight$.

4. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa. Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan. Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 33 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 82 kota.

5. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan

dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

6. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga Produsen Gabah di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga Produsen Gabah di Tingkat Penggilingan adalah harga produsen gabah di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah dalam negeri minimal yang harus dibayarkan pemerintah melalui Bulog kepada petani dan penggilingan sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK Inpres. Tujuan kebijakan penerapan HPP, selain untuk pengamanan cadangan pemerintah, adalah sebagai insentif yang diberikan pemerintah kepada petani padi dengan cara memberikan jaminan harga di atas harga keseimbangan.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Kadar Air (KA) adalah jumlah kandungan air dalam butir gabah yang dinyatakan dalam persentase dari berat basah.

Kadar Hampa (KH) adalah jumlah kandungan selain air, yang umumnya terdiri atas butiran hampa dan kotoran, seperti butir gabah yang tidak berkembang, pasir, kerikil, biji dan lainnya. Kadar Hampa dinyatakan dalam persentase dari berat sampel gabah.

Survei Monitoring Harga Produsen Gabah dilaksanakan di 27 propinsi di Indonesia. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (biasanya pada bulan Maret s.d. Mei dan Agustus) pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Butir Beras Patah/Pecah (*Broken*) adalah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 bagian sampai dengan lebih kecil 0,75 bagian dari butir beras utuh.

Pengumpulan data harga produsen beras di penggilingan dilakukan secara bulanan di 28 provinsi di Indonesia. Responden adalah penggilingan besar di wilayahnya.

7. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya. Sesuai dengan *Manual Producer Price Index* (PPI), harga yang dikumpulkan adalah *basic price* (harga dasar), yaitu harga yang diterima produsen tidak termasuk pajak. IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100.

Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan di 34 Provinsi. Responden yang dipilih adalah produsen dengan penerimaan perusahaan yang cukup besar, sedangkan

komoditas yang dipilih adalah komoditas yang memberikan *share* besar terhadap PDB nasional. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor.

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005. Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi.

8. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) dihitung berdasarkan data dari Survei Tendensi Bisnis (STB). Tujuan dari ITB adalah untuk menghasilkan suatu indikator dini yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang dari sisi pelaku usaha.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang.

9. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro. Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai

tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.

10. Pariwisata

Data pariwisata mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara. Untuk data karakteristik wisman yang lebih detil diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*). Namun pada tahun 2015 penghitungan Jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan data lalu lintas WNA yang terdiri dari:

- a. Wisman reguler
- b. Kunjungan minimal WNA melalui pos lintas batas (PLB) darat
- c. Kunjungan WNA lainnya dan WNA berada di Indonesia kurang dari satu tahun
 - Tidak bekerja (wisata lanjut usia mancanegara, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dakwah/rohaniawan, berobat, mengadakan penelitian, dan lain-lain)
 - Bekerja paruh waktu (bidang konstruksi, konsultan, instruktur, dan lain-lain)

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survei Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya.

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun.

Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk *cruise passenger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Data administrasi wisatawan mancanegara (wisman) Indonesia masih *underestimate*, karena terkendala kondisi geografis dan prasarana yang belum memadai untuk memantau seluruh pergerakan manusia di perbatasan darat dan laut Indonesia. Teknologi informasi, khususnya komunikasi seluler, mempunyai peluang besar untuk mengatasi hambatan tersebut. Seluruh pergerakan manusia yang mempunyai telepon seluler di perbatasan dapat diidentifikasi aktivitasnya dan asal negaranya. Sebuah nomor seluler asing yang masuk (*roaming*), bergerak di wilayah Indonesia dan di hari-hari berikutnya keluar dari wilayah Indonesia menunjukkan kunjungan wisman. Jumlah seluruh wisman yang melintas dikurangi pelintas batas yang tercatat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan aktivitas wisman yang *underestimate*. Mulai Oktober 2016, permasalahan ini dapat diatasi melalui pemanfaatan *roaming* komunikasi seluler tersebut. Cara ini belum mencakup orang asing: (1) *roaming* non telkomsel (2) yang masuk Indonesia tanpa menggunakan telepon seluler dan tidak tercatat di TPI

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia.

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

11. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s.d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut. Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri. Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

12. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi *real-time* yang beredar di internet, dan sebagainya.

Mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

Nilai Tukar (Kurs) adalah harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain.

Nilai Tukar Eceran Rupiah adalah nilai mata uang rupiah yang diukur dalam mata uang negara lain yang ditransaksikan melalui *money changer*.

Kurs Tengah adalah kurs rata-rata antara kurs beli dan kurs jual.

Money Changer adalah tempat pertukaran atau tempat jual beli mata uang asing.

Spot rate adalah harga yang diberikan untuk suatu mata uang yang akan dibayar dan diserahkan segera, dalam 1-2 hari kerja.

Swap adalah transaksi pertukaran dua valas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

13. Kemiskinan

- a. **Penduduk miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- b. **Garis Kemiskinan (GK)** adalah total nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. GK terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM).
- c. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- d. **Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)** adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
- e. **Persentase Penduduk miskin (*Head Count Index- P₀*)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.
- f. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*)** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- g. **Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*)** adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

14. Ketimpangan Pengeluaran

- a. **Gini Ratio** adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *Gini Ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- b. **Ukuran Bank Dunia** adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada besarnya jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) pada kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
 - Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

15. Perdagangan Komoditas Strategis 2016

Pola perdagangan komoditas strategis dapat menjelaskan:

- a. Fungsi usaha asal dan wilayah pembelian bahan baku yang menjelaskan dari fungsi usaha apa dan dari wilayah mana bahan baku dibeli oleh produsen.

- b. Fungsi usaha asal dan wilayah pembelian barang dagangan yang menjelaskan fungsi usaha perdagangan apa dan dari wilayah mana barang dagangan dibeli oleh pedagang.
- c. Fungsi usaha penjualan dan wilayah penjualan produksi yang menjelaskan ke fungsi usaha perdagangan apa (termasuk konsumen akhir) dan ke wilayah mana barang produksi dijual oleh produsen.
- d. Fungsi usaha penjualan dan wilayah penjualan barang dagangan yang menjelaskan ke fungsi usaha perdagangan apa (termasuk konsumen akhir) dan ke wilayah mana barang dagangan dijual oleh pedagang.

16. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (IP-TIK)

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah.

IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar pembangunan TIK suatu wilayah sebagai berikut:

- a. Subindeks Akses dan Infrastruktur
 - 1. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk/*Fixed-telephone subscription per 100 inhabitants*
 - 2. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk/*Mobile-cellular telephone subscription per 100 inhabitants*
 - 3. *Bandwidth* internet internasional per pengguna/*International internet bandwidth (bit/s) per internet user*
 - 4. Persentase rumah tangga yang menguasai komputer/*Percentage of households with a computer*
 - 5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet/*Percentage of households with internet access*
- b. Subindeks Penggunaan
 - 1. Persentase penduduk yang mengakses internet/*Percentage of individuals using the internet*
 - 2. Pelanggan internet broadband tetap kabel per 100 penduduk/*Fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants*
 - 3. Pelanggan internet broadband tanpa kabel per 100 penduduk/*Wireless-broadband subscription per 100 inhabitants*

c. Subindeks Keahlian

1. Angka melek huruf/*Adult literacy rate*
2. Angka partisipasi kasar sekunder (SMP sederajat dan SMA sederajat)/*Secondary gross enrolment ratio*
3. Angka partisipasi kasar tersier (pendidikan tinggi D1-S1)/*Tertiary gross enrollment ratio*

<http://www.bps.go.id>

FOKUS PERHATIAN

1. Pada Februari 2017 terjadi Inflasi sebesar 0,23 persen

Pada Februari 2017 terjadi Inflasi sebesar 0,23 persen. Dari 82 kota, 62 kota mengalami inflasi dan 20 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,16 persen dengan IHK 128,49 dan terendah terjadi di Ternate sebesar 0,03 persen dengan IHK 131,13. Inflasi Februari 2017 sebesar 0,23 persen lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2016 yang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 1,21 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,83 persen.

2. Tahun 2016 perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen

PDB Indonesia tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, tertinggi dicapai oleh Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 8,90 persen. Secara triwulanan, PDB triwulan IV-2016 tumbuh 4,94 persen (*y-on-y*), didukung oleh semua lapangan usaha ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,57 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan III-2016 (*q-to-q*), PDB triwulan IV-2016 mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen yang utamanya disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,24 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan PDB tahun 2016 (*c-to-c*) terjadi pada hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen dan 0,15 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,62 persen. Pertumbuhan PDB triwulan IV-2016 dibandingkan triwulan IV-2015 (*y-on-y*) didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Komponen Ekspor

Barang dan Jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,72 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,99 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), PDB triwulan IV-2016 mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen terutama disebabkan oleh penurunan pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,02 persen dan terjadinya peningkatan pada Komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 12,67 persen.

3. Nilai ekspor Indonesia Januari 2017 mencapai US\$13,38 miliar, naik 27,71 persen (*year-on-year*)

Nilai ekspor Indonesia Januari 2017 mencapai US\$13,38 miliar, naik 27,71 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sementara dibanding ekspor Desember 2016 turun 3,21 persen. Nilai ekspor nonmigas Januari 2017 mencapai US\$12,11 miliar atau naik 29,24 persen dibanding ekspor nonmigas Januari 2016. Ekspor migas pada Januari 2017 mencapai US\$1,27 miliar atau naik 14,77 persen dibanding Januari tahun sebelumnya. Ditinjau menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari 2017 naik sebesar 26,27 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor nonmigas hasil pertanian naik 11,67 persen dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya naik 50,37 persen.

4. Nilai impor Indonesia Januari 2017 sebesar US\$11,99 miliar, naik sebesar 14,54 persen (*year-on-year*)

Nilai impor Indonesia Januari 2017 sebesar US\$11,99 miliar, atau turun 6,21 persen dibanding impor Desember 2016, dan naik 14,54 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Januari 2017 sebesar US\$10,18 miliar atau turun 8,12 persen dibanding Desember 2016. Sementara impor migas Januari 2017 tercatat sebesar US\$1,81 miliar, naik 6,25 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Januari 2017 adalah golongan bahan kimia organik sebesar US\$126,0 juta, atau naik 33,54 persen dibanding

Desember 2016 (US\$375,7 juta). Negara asal barang impor nonmigas terbesar Januari 2017 ditempati oleh Tiongkok (US\$2,92 miliar) dengan pangsa 28,70 persen.

5. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Januari 2017 masing-masing sebesar Rp49.000,00 dan Rp83.432,00

Rata-rata upah nominal buruh tani pada Januari 2017 sebesar Rp49.000,00, naik 0,77 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan upah riil turun sebesar 0,02 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Januari 2017 tercatat Rp83.432,00, naik 0,29 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan upah riil turun sebesar 0,67 persen.

6. Nilai Tukar Petani (NTP) Februari 2017 tercatat 100,33, turun 0,58 persen dibanding Januari 2017, inflasi perdesaan sebesar 0,38 persen, dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) turun sebesar 0,56 persen dibanding Januari 2017

NTP Februari 2017 tercatat 100,33 atau turun sebesar 0,58 persen dibanding NTP Januari 2017 sebesar 100,91. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan masing-masing sebesar 1,61 persen, 0,04 persen, 0,04 persen, dan 0,28 persen sedangkan Subsektor Perikanan naik 0,30 persen.

Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 23 provinsi, deflasi perdesaan di 9 provinsi, dan relatif stabil 1 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,09 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah di Provinsi Jambi sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,63 persen, sedangkan deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau relatif stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi.

Pada Februari 2017 terjadi penurunan NTUP sebesar 0,56 persen. Hal ini terjadi karena It turun (0,24 persen), sedangkan indeks BPPBM naik (0,32 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya NTUP di empat subsektor penyusun NTUP, yaitu: NTUP Tanaman Pangan (1,59 persen), Tanaman Hortikultura (0,03 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,25 persen), dan Peternakan (0,06 persen), sedangkan Subsektor Perikanan naik (0,45 persen).

7. Rata-rata harga beras pada Februari 2017 sebesar Rp13.202,00 per kg, turun 0,15 persen

Rata-rata harga beras pada Februari 2017 sebesar Rp13.202,00 per kg, turun 0,15 persen dari bulan sebelumnya. Dibandingkan Februari 2016, harga beras turun 1,30 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,83 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit naik 13,70 persen; minyak goreng naik 1,52 persen; sedangkan daging ayam ras turun 6,08 persen.

8. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) pada triwulan IV-2016 naik 1,77 persen terhadap triwulan III-2016 (*q-to-q*). Demikian pula terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) naik 3,34 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen pada triwulan IV-2016 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (1,20 persen), Sektor Pertambangan dan Penggalian (10,28 persen), dan IHP Sektor Industri Pengolahan (0,84 persen).

Dibandingkan terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*), IHP naik 3,34 persen. IHP Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,08 persen, 18,32 persen, dan 2,18 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas Februari 2017 naik sebesar 0,17 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas Februari 2017 naik sebesar 0,17 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Kelompok Barang Impor Nonmigas yaitu 0,43 persen dan terendah terjadi pada Sektor Pertanian yaitu 0,07 persen. Sektor Industri dan Kelompok Barang Ekspor Nonmigas naik masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,26 persen sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 1,58 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Januari 2017 naik 0,74 persen. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Industri sebesar 0,99 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi Februari 2017 naik sebesar 0,43 persen. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,55 persen.

9. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2016 sebesar 106,70 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2016 sebesar 102,46

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan IV-2016 sebesar 106,70 berarti kondisi bisnis meningkat dari triwulan sebelumnya. Hal ini karena adanya peningkatan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 108,58), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 104,75), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 105,96). Pada triwulan I-2017, kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 105,81.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan IV-2016 sebesar 102,46 artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITK triwulan III-2016 adalah 108,22). Perbaikan kondisi ekonomi konsumen di tingkat regional terjadi di 23 provinsi. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2016 didorong oleh naiknya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 103,89), diikuti oleh volume konsumsi (nilai indeks sebesar 103,81). Sedangkan daya beli dilihat dari indeks pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi mengalami penurunan (nilai indeks sebesar 98,72).

Pada triwulan I-2017 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat dengan nilai ITK sebesar 106,30. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan I-2017 terjadi di 31 provinsi di Indonesia, dengan 14 provinsi (42,42 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks di atas nasional.

10. Pertumbuhan produksi IBS naik 2,06 persen dan IMK naik 4,88 persen pada triwulan IV-2016 (*year-on-year*)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan IV-2016 naik 2,06 persen dibanding triwulan IV-2015 (*year-on-year*) dan mengalami penurunan 0,34 persen dari triwulan III-2016 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Oktober 2016 naik 0,10 persen dari Oktober 2015, November 2016 naik 1,86 persen dari November 2015, dan Desember 2016 naik 4,30 persen dari Desember 2015. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan IV-2016 naik 4,88 persen dibanding triwulan IV-2015 (*y-on-y*), dan mengalami kenaikan 0,51 persen dari triwulan III-2016 (*q-to-q*).

11. Jumlah kunjungan wisman Januari 2017 mencapai 1,03 juta kunjungan

Kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari 2017 sebanyak 1,03 juta kunjungan yang terdiri atas 930,93 ribu kunjungan wisman melalui 19 pintu utama dan 99,81 ribu kunjungan wisman selain dari 19 pintu utama.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Januari 2017 mencapai 50,92 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1,59 poin dibandingkan TPK Januari 2016.

12. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari 2017 mencapai 7,3 juta orang, naik 15,04 persen (*year-on-year*)

Pada Januari 2017, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 7,3 juta orang atau naik 15,04 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional naik 9,29 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 21,47 persen, dan penumpang kereta api naik 9,14 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik turun 6,63 persen, angkutan udara

internasional turun 8,14 persen, penumpang pelayaran dalam negeri turun 2,69 persen, dan penumpang kereta api turun 3,74 persen.

13. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Januari 2017

a. Rupiah terapresiasi 0,65 persen terhadap dolar Amerika

Rupiah terapresiasi 0,65 persen terhadap dolar Amerika pada Januari 2017. Level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika terjadi pada minggu kedua Januari 2017 yang mencapai Rp13.305,40 per dolar Amerika.

b. Rupiah terdepresiasi 3,81 persen terhadap dolar Australia

Rupiah terdepresiasi 3,81 persen terhadap dolar Australia pada Januari 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia terjadi pada minggu keempat Januari 2017 yang mencapai Rp10.032,62 per dolar Australia.

c. Rupiah terdepresiasi 2,27 persen terhadap yen Jepang

Rupiah terdepresiasi 2,27 persen terhadap yen Jepang pada Januari 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang terjadi pada minggu ketiga Januari 2017 yang mencapai Rp116,95 per yen Jepang.

d. Rupiah terdepresiasi 1,69 persen terhadap euro

Rupiah terdepresiasi 1,69 persen terhadap euro pada Januari 2017. Level terendah rata-rata nasional kurs tengah eceran rupiah terhadap euro terjadi pada minggu keempat Januari 2017 yang mencapai Rp14.278,78 per euro.

14. a. Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen)

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen) menurun 0,25 juta orang (0,16 persen). Namun, berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada

Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016). Sementara itu, di daerah pedesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).

b. Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,394

Gini Ratio September 2016 turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan turun 0,008 poin dibanding September 2016 yang sebesar 0,402. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 0,409, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410 dan turun dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah pedesaan pada September 2016 sebesar 0,316 turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327 dan turun dibanding September 2015 yang sebesar 0,329.

15. Fungsi Kelembagaan yang Terlibat dalam Pola Utama Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis di Indonesia Tahun 2016 adalah Distributor, Agen, Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran

Distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga delapan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan di Indonesia untuk komoditas:

- Beras: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
- Minyak goreng: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
- Gula pasir: Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
- Telur ayam ras: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

16. IP-TIK Indonesia tahun 2015 mencapai nilai 4,83 pada skala 0–10

IP-TIK Indonesia tahun 2015 mencapai nilai 4,83 pada skala 0–10. IP-TIK tahun 2015 terdiri dari subindeks keahlian TIK yang memiliki nilai tertinggi yaitu 6,81, diikuti subindeks akses dan infrastruktur TIK yang mencapai nilai 5,46, dan terendah dari segi penggunaan TIK sebesar 3,20.

Tingkat pembangunan TIK di 34 provinsi tahun 2015 cukup beragam, yaitu 22 provinsi masuk kategori IP-TIK rendah ($IP-TIK \leq 4,69$); 11 provinsi masuk kategori IP-TIK sedang ($4,69 < IP-TIK < 7,07$), dan 1 provinsi masuk kategori IP-TIK tinggi ($IP-TIK \geq 7,07$).

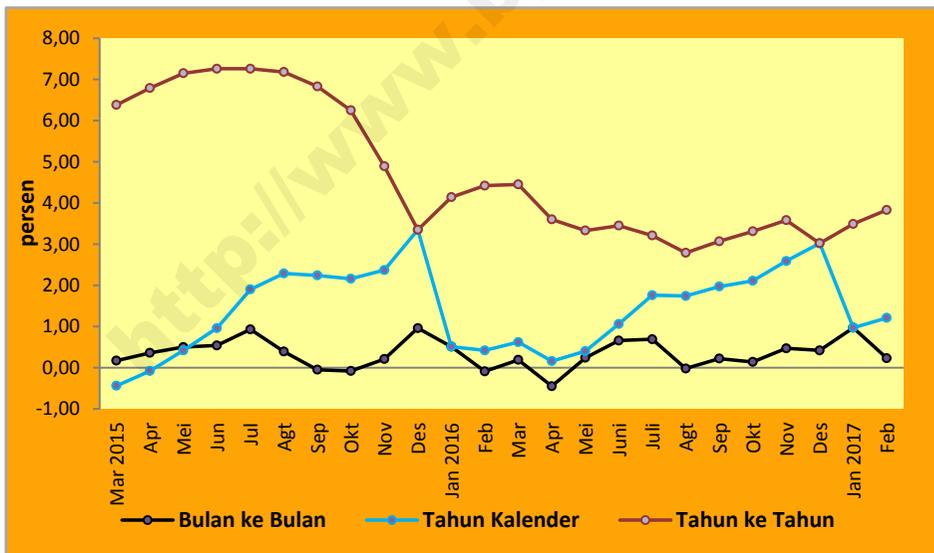
<http://www.bps-go.id>

I. INFLASI FEBRUARI 2017

1. Pada Februari 2017 terjadi Inflasi sebesar 0,23 persen. Dari 82 kota, 62 kota mengalami inflasi dan 20 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,16 persen dengan IHK 128,49 dan terendah terjadi di Ternate sebesar 0,03 persen dengan IHK 131,13. Inflasi Februari 2017 sebesar 0,23 persen lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2016 yang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 1,21 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,83 persen.

**Pada Februari 2017 terjadi
Inflasi sebesar 0,23 persen**

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2015–2017



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, Inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok: makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,39 persen; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,75 persen; sandang 0,52 persen; kesehatan 0,26 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,08 persen; dan

transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,15 persen; sedangkan kelompok bahan makanan mengalami penurunan sebesar 0,66 persen.

3. Dari Inflasi 0,23 persen, andil tarif listrik 0,11 persen; andil cabai rawit dan tarif pulsa ponsel 0,05 persen; andil bawang merah dan emas perhiasan 0,03 persen; andil bayam dan upah pembantu 0,02 persen; andil mie kering instan, ikan segar, ikan diawetkan, kentang, wortel, minyak goreng, kue kering berminyak, rokok kretek, rokok kretek filter, kontrak rumah, sewa rumah, tukang bukan mandor, bensin, dan mobil masing-masing sebesar 0,01 persen.
4. Inflasi Februari 2017 sebesar 0,23 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2016 yang mengalami deflasi 0,09 persen. Tingkat inflasi tahun kalender 2017 sebesar 1,21 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,83 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, Inflasi Februari 2017 sebesar 0,23 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,37 persen; kenaikan indeks pada komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 0,58 persen; dan penurunan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 0,36 persen.
6. Inflasi Februari 2017 sebesar 0,23 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,21 persen, sumbangan inflasi komponen barang/jasa yang harganya diatur pemerintah 0,11 persen, dan sumbangan deflasi komponen bergejolak 0,09 persen.
7. Inflasi komponen inti Februari 2017 sebesar 0,37 persen, inflasi tahun kalender 2017 sebesar 0,93 persen, dan inflasi tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) sebesar 3,41 persen.
8. Pada Januari 2017, Malaysia menjadi negara yang mengalami Inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 1,10 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota Februari 2017
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Februari 2016	IHK Desember 2016	IHK Februari 2017	Inflasi Februari 2017 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	123,51	126,71	128,24	0,23	1,21	3,83	0,23
1. Bahan Makanan	135,14	140,58	141,07	-0,31	0,35	4,39	-0,09
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	127,91	133,27	134,41	0,39	0,86	5,08	0,07
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	119,50	121,68	123,93	0,75	1,85	3,71	0,17
4. Sandang	111,14	113,50	114,46	0,52	0,85	2,99	0,03
5. Kesehatan	117,63	121,48	122,41	0,26	0,77	4,06	0,01
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	114,99	117,88	118,12	0,08	0,2	2,72	0,01
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	123,74	124,42	127,54	0,15	2,51	3,07	0,03

¹⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2017 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2017 terhadap IHK Desember 2016.

³⁾ Persentase perubahan IHK Februari 2017 terhadap IHK Februari 2016.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi Februari 2017
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK Februari 2016	IHK Desember 2016	IHK Februari 2017	Inflasi Februari 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2017 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	123,51	126,71	128,24	0,23	1,21	3,83	0,23
Inti	116,37	119,23	120,34	0,37	0,93	3,41	0,21
Harga Diatur Pemerintah	138,00	140,11	144,54	0,58	3,16	4,74	0,11
Bergejolak	136,49	142,15	142,58	-0,36	0,30	4,46	-0,09

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,51	0,97
Februari	0,05	0,75	0,26	-0,36	-0,09	0,23	0,81	1,79	1,33	-0,61	0,42	1,21
Maret	0,07	0,63	0,08	0,17	0,19		0,88	2,43	1,41	-0,44	0,62	
April	0,21	-0,10	-0,02	0,36	-0,45		1,09	2,32	1,39	-0,08	0,16	
Mei	0,07	-0,03	0,16	0,50	0,24		1,15	2,30	1,56	0,42	0,40	
Juni	0,62	1,03	0,43	0,54	0,66		1,79	3,35	1,99	0,96	1,06	
Juli	0,70	3,29	0,93	0,93	0,69		2,50	6,75	2,94	1,90	1,76	
Agustus	0,95	1,12	0,47	0,39	-0,02		3,48	7,94	3,42	2,29	1,74	
September	0,01	-0,35	0,27	-0,05	0,22		3,49	7,57	3,71	2,24	1,97	
Oktober	0,16	0,09	0,47	-0,08	0,14		3,66	7,66	4,19	2,16	2,11	
November	0,07	0,12	1,50	0,21	0,47		3,73	7,79	5,75	2,37	2,59	
Desember	0,54	0,55	2,46	0,96	0,42		4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

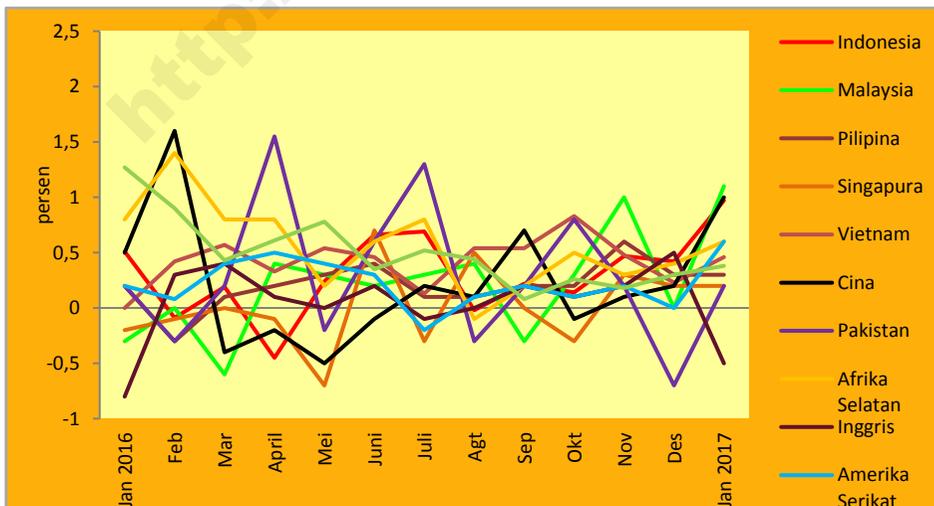
Bulan	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014	2016:2015	2017:2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,65	4,57	8,22	6,96	4,14	3,49
Februari	3,56	5,31	7,75	6,29	4,42	3,83
Maret	3,97	5,90	7,32	6,38	4,45	
April	4,50	5,57	7,25	6,79	3,60	
Mei	4,45	5,47	7,32	7,15	3,33	
Juni	4,53	5,90	6,70	7,26	3,45	
Juli	4,56	8,61	4,53	7,26	3,21	
Agustus	4,58	8,79	3,99	7,18	2,79	
September	4,31	8,40	4,53	6,83	3,07	
Oktober	4,61	8,32	4,83	6,25	3,31	
November	4,32	8,37	6,23	4,89	3,58	
Desember	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Desember 2016–Januari 2017 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (Y-on-Y)	
	Desember 2016	Januari 2017	Desember 2016	Januari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	0,42	0,97	3,02	3,49
2. Malaysia	0,00	1,10	1,80	3,20
3. Pilipina	0,30	0,30	2,60	2,70
4. Singapura	0,20	0,20	0,20	0,60
5. Vietnam	0,23	0,46	4,74	5,22
6. Cina	0,20	1,00	2,10	2,50
7. Pakistan	-0,70	0,20	3,70	3,70
8. Afrika Selatan	0,40	0,60	6,80	6,60
9. Inggris	0,50	-0,50	1,60	1,80
10. Amerika Serikat	0,00	0,60	2,10	2,50
11. Brazil	0,30	0,38	6,29	5,35

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2016–2017

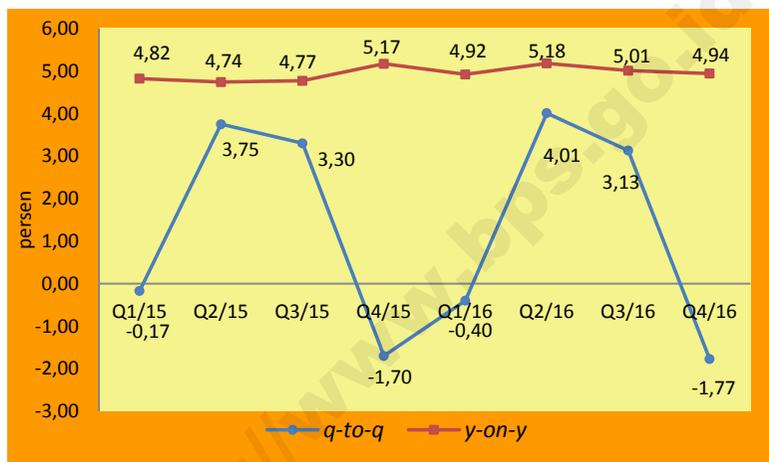


II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2016

1. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2016 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,94 persen lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan II-2016 dan triwulan III-2016. Namun, lebih tinggi dibanding capaian triwulan I-2016.

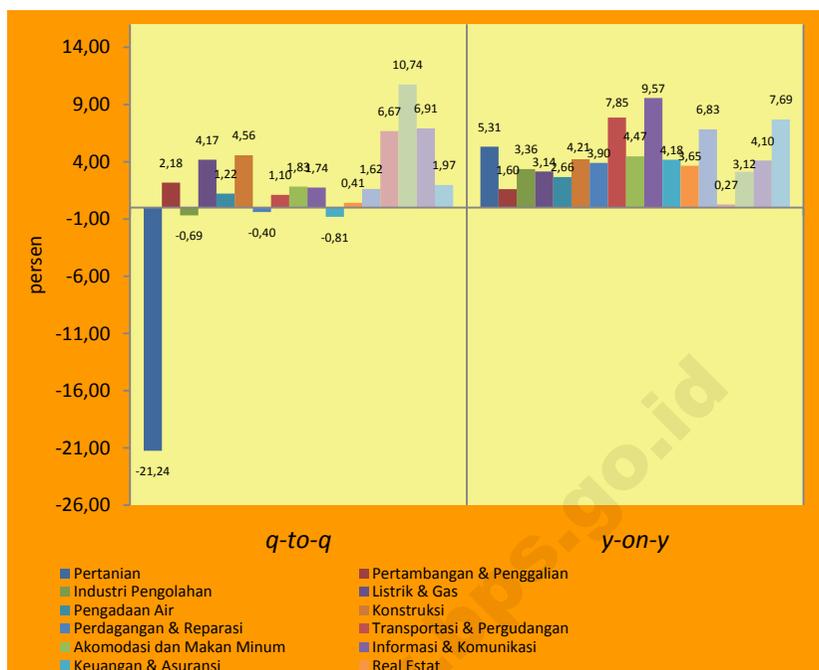
Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2015 s.d Triwulan IV-2016 (persen)



2. PDB Indonesia triwulan IV-2016 dibanding triwulan sebelumnya (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Kontraksi terutama disebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 21,24 persen dampak faktor musiman beberapa komoditas pertanian.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan IV-2016 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016	Tahun 2016	Sumber
	Terhadap	Terhadap	Terhadap	Terhadap		
(1)	Triw II-2016	Triw III-2016	Triw III-2015	Triw IV-2015	(c-to-c)	Pertumbuhan
	(q-to-q)	(q-to-q)	(y-on-y)	(y-on-y)		Tahun 2016
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,67	-21,24	3,03	5,31	3,25	0,42
B Pertambangan dan Penggalan	0,58	2,18	0,29	1,60	1,06	0,09
C Industri Pengolahan	0,83	-0,69	4,52	3,36	4,29	0,92
D Pengadaan Listrik dan Gas	-2,12	4,17	4,88	3,14	5,39	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,45	1,22	2,36	2,66	3,60	0,00
F Konstruksi	4,71	4,56	4,95	4,21	5,22	0,51
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,39	-0,40	3,59	3,90	3,93	0,53
H Transportasi dan Pergudangan	5,39	1,10	8,26	7,85	7,74	0,30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,83	4,68	4,47	4,94	0,15
J Informasi dan Komunikasi	2,84	1,74	8,95	9,57	8,87	0,42

Lapangan Usaha		Triw III-2016 Terhadap Triw II-2016 (q-to-q)	Triw IV-2016 Terhadap Triw III-2016 (q-to-q)	Triw III-2016 Terhadap Triw III-2015 (y-on-y)	Triw IV-2016 Terhadap Triw IV-2015 (y-on-y)	Tahun 2016 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	-0,81	9,04	4,18	8,90	0,35
L	Real Estat	0,45	0,41	3,97	3,65	4,30	0,13
M,N	Jasa Perusahaan	1,56	1,62	6,95	6,83	7,36	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,66	6,67	3,80	0,27	3,19	0,11
P	Jasa Pendidikan	-1,28	10,74	1,95	3,12	3,84	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	6,91	4,49	4,10	5,00	0,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,95	1,97	7,71	7,69	7,80	0,13
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR		2,13	-1,73	4,37	4,18	4,55	4,41
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK		33,51	-2,79	22,44	26,74	19,31	0,61
PRODUK DOMESTIK BRUTO		3,13	-1,77	5,01	4,94	5,02	5,02

3. Besaran PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan IV-2016 Rp 3.194,8 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 pada triwulan yang sama adalah Rp 2.385,6 triliun.

Tabel 2.2
Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
		Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	461,9	369,7	336,7	265,2	14,41	11,57
B	Pertambangan dan Penggalian	221,9	256,0	192,2	196,4	6,92	8,01
C	Industri Pengolahan	644,0	648,3	511,7	508,2	20,09	20,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36,7	38,8	24,7	25,7	1,15	1,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,2	2,3	1,9	1,9	0,07	0,07
F	Konstruksi	327,0	343,2	234,7	245,4	10,20	10,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	416,5	417,7	319,3	318,1	12,99	13,08
H	Transportasi dan Pergudangan	171,4	172,2	96,7	97,8	5,35	5,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91,1	93,0	70,9	72,2	2,84	2,91
J	Informasi dan Komunikasi	114,8	117,3	117,0	119,0	3,58	3,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	133,4	133,9	96,5	95,7	4,16	4,19
L	Real Estat	87,6	88,3	69,9	70,2	2,74	2,76

Lapangan Usaha	Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)						
M,N Jasa Perusahaan	53,5	54,7	40,1	40,7	1,67	1,72
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	120,9	125,1	79,4	84,7	3,77	3,92
P Jasa Pendidikan	103,9	114,3	72,2	79,9	3,24	3,58
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,0	35,2	25,3	27,1	1,03	1,10
R,S,T,U Jasa Lainnya	53,8	55,2	39,4	40,2	1,68	1,73
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	3.073,6	3.065,2	2.328,6	2.288,4	95,89	95,94
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	131,9	129,6	100,0	97,2	4,11	4,06
PRODUK DOMESTIK BRUTO	3.205,5	3.194,8	2.428,6	2.385,6	100	100

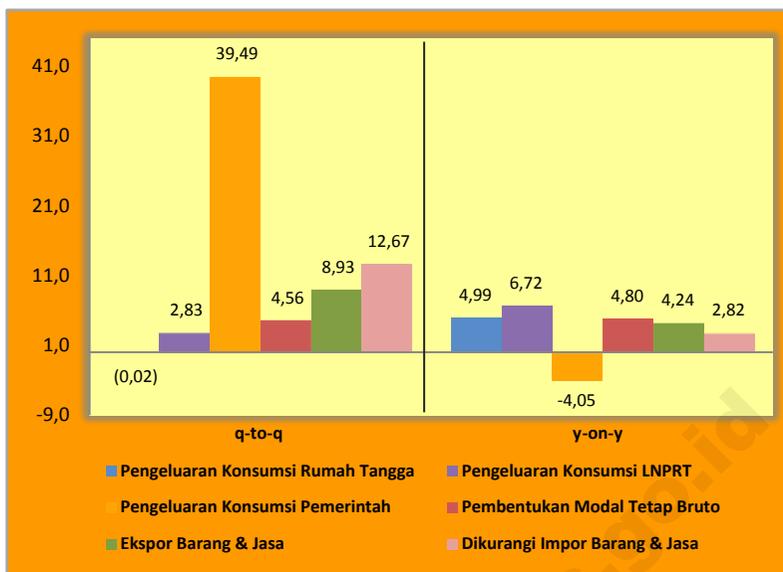
¹⁾ Atas dasar harga berlaku

4. Dari sisi pengeluaran, PDB Indonesia triwulan IV-2016 dibandingkan triwulan sebelumnya (q -to- q) mengalami kontraksi yang terutama disebabkan oleh Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh 12,67 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebagai Komponen dengan kontribusi terbesar, tumbuh minus 0,02 persen yang disebabkan oleh penurunan pada pengeluaran untuk makanan dan minuman, transportasi dan komunikasi, serta pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw III- 2016	Triw IV- 2016	Triw III- 2016	Triw IV- 2016	Tahun 2016	Sumber Pertumbuhan
	Terhadap Triw II- 2016	Terhadap Triw III- 2016	Terhadap Triw III- 2015	Terhadap Triw IV- 2015	(c -to- c)	Triw IV- 2016
	(q -to- q)	(q -to- q)	(y -on- y)	(y -on- y)		(y -on- y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,45	-0,02	5,01	4,99	5,01	2,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,26	2,83	6,64	6,72	6,62	0,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,19	39,49	-2,95	-4,05	-0,15	-0,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	4,56	4,24	4,80	4,48	1,62
5. Perubahan Inventori Diskrepani Statistik	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang & Jasa	-3,64	8,93	-5,65	4,24	-1,74	0,93
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang & Jasa	-5,09	12,67	-3,67	2,82	-2,27	0,59
PDB	3,13	-1,77	5,01	4,94	5,02	4,94

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2016 (persen)



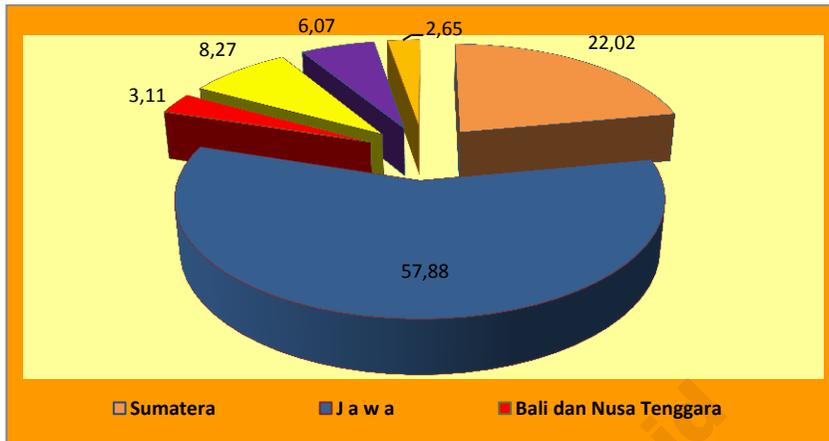
5. Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran triwulan IV-2016 dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2015 (*y-on-y*) tumbuh 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh minus 4,05 persen dibandingkan triwulan yang sama tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,72 persen, melanjutkan kecenderungan yang terjadi selama lima triwulan terakhir.

Tabel 2.4
Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran

Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku (triliun rupiah)		Harga Konstan (triliun rupiah)		Distribusi ¹ (persen)	
	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016	Triw III-2016	Triw IV-2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 791,1	1 807,1	1 307,6	1 307,3	55,88	56,56
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	36,9	38,4	26,8	27,6	1,15	1,20
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	289,9	390,6	187,2	261,1	9,04	12,23
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	1 021,4	1 071,3	769,1	804,1	31,86	33,53
5 Perubahan Inventori	94,6	-47,8	60,9	-30,5	2,95	-1,50
6 Ekspor Barang dan Jasa	571,7	652,7	475,8	518,3	17,83	20,43
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	539,1	618,3	432,3	487,1	16,82	19,35
PDB	3 205,5	3 194,8	2 428,6	2 385,6	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga berlaku

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan IV-2016 (persen)



6. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan IV-2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,88 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,02 persen, Pulau Kalimantan 8,27 persen, dan Pulau Sulawesi 6,07 persen, dan sisanya 5,76 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.5
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2014	2015	2016	
			Trw III	Trw IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sumatera	23,02	22,18	21,98	22,02
2. Jawa	57,39	58,34	58,46	57,88
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,87	3,07	3,17	3,11
4. Kalimantan	8,77	8,15	7,73	8,27
5. Sulawesi	5,64	5,91	6,13	6,07
6. Maluku dan Papua	2,31	2,36	2,52	2,65
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

7. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan IV-2016 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 52,94 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,51 persen, 5,48 persen, 5,45 persen, dan 5,33 persen.

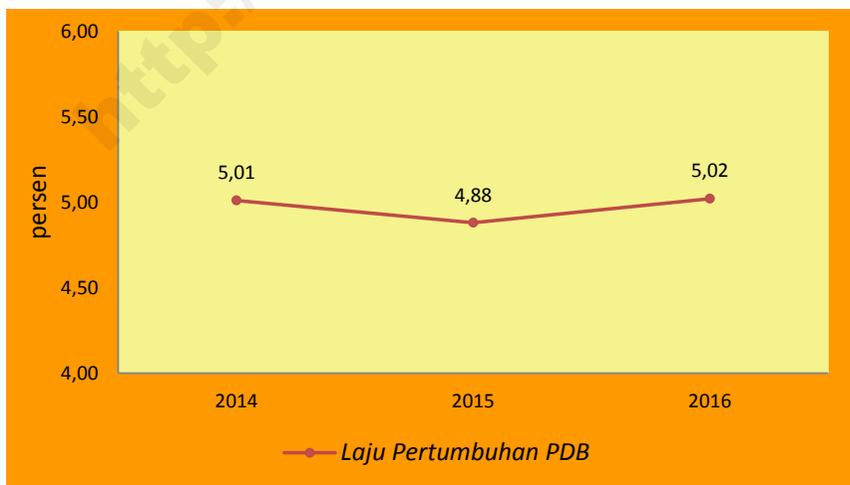
Tabel 2.6
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan IV-2016 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	-0,23	4,49	4,29	100,00	22,02
01. Aceh	0,77	4,30	3,31	4,93	1,09
02. Sumatra Utara	0,07	5,25	5,18	22,57	4,97
03. Sumatra Barat	0,69	4,86	5,26	7,12	1,57
04. Riau	2,93	2,22	2,23	24,83	5,47
05. Jambi	2,63	6,35	4,37	6,35	1,40
06. Sumatra Selatan	-3,26	5,15	5,03	12,48	2,75
07. Bengkulu	2,19	5,56	5,30	2,01	0,44
08. Lampung	-8,59	5,01	5,15	9,60	2,11
09. Kep. Bangka Belitung	2,01	4,92	4,11	2,35	0,52
10. Kepulauan Riau	1,24	5,24	5,03	7,77	1,71
Jawa	-0,76	5,45	5,59	100,00	57,88
11. DKI Jakarta	1,11	5,51	5,85	29,77	17,23
12. Jawa Barat	-0,98	5,45	5,67	22,19	12,84
13. Jawa Tengah	-2,37	5,33	5,28	14,56	8,43
14. DI Yogyakarta	-0,45	4,71	5,05	1,50	0,87
15. Jawa Timur	-2,04	5,48	5,55	24,95	14,44
16. Banten	0,73	5,53	5,26	7,03	4,07
Bali dan Nusa Tenggara	-2,30	4,87	5,89	100,00	3,11
17. Bali	0,82	5,47	6,24	49,82	1,55
18. Nusa Tenggara Barat	-8,22	3,77	5,82	28,50	0,89
19. Nusa Tenggara Timur	0,28	5,19	5,18	21,68	0,67
Kalimantan	1,67	2,22	2,01	100,00	8,27
20. Kalimantan Barat	0,89	3,77	5,22	15,58	1,29
21. Kalimantan Tengah	2,12	8,59	6,36	10,98	0,91
22. Kalimantan Selatan	-1,61	5,28	4,38	13,93	1,15
23. Kalimantan Timur	2,64	-0,30	-0,38	52,75	4,36
24. Kalimantan Utara	2,18	4,27	3,75	6,76	0,56
Sulawesi	-0,74	6,80	7,42	100,00	6,07
25. Sulawesi Utara	7,30	6,49	6,17	14,03	0,85

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	q-to-q	y-on-y	c-to-c	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26. Sulawesi Tengah	1,83	3,80	9,98	15,53	0,94
27. Sulawesi Selatan	-5,23	7,60	7,41	48,41	2,94
28. Sulawesi Tenggara	3,30	7,65	6,51	13,04	0,79
29. Gorontalo	-3,36	7,02	6,52	4,07	0,25
30. Sulawesi Barat	5,48	7,51	6,03	4,91	0,30
Maluku dan Papua	6,11	14,66	7,45	100,00	2,65
31. Maluku	3,49	5,91	5,76	11,22	0,30
32. Maluku Utara	1,50	6,54	5,77	8,75	0,23
33. Papua Barat	3,26	4,86	4,52	20,57	0,55
34. Papua	8,23	21,41	9,21	59,46	1,58

8. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2016 meningkat sebesar 5,02 persen terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 8,90 persen, diikuti oleh Informasi-Komunikasi, dan Jasa Lainnya yang tumbuh masing-masing sebesar 8,87 persen dan 7,80 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2014–2016 (persen)



9. Tahun 2016, Lapangan Usaha Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 20,51 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,45 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,19 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2016 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,24	3,77	3,25	13,34	13,49	13,45
B Pertambangan dan Penggalian	0,43	-3,42	1,06	9,83	7,65	7,20
C Industri Pengolahan	4,64	4,33	4,29	21,07	20,97	20,51
D Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	0,90	5,39	1,09	1,14	1,15
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,24	7,07	3,60	0,07	0,07	0,07
F Konstruksi	6,97	6,36	5,22	9,86	10,21	10,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,18	2,59	3,93	13,43	13,31	13,19
H Transportasi dan Pergudangan	7,36	6,68	7,74	4,42	5,02	5,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,77	4,31	4,94	3,04	2,96	2,92
J Informasi dan Komunikasi	10,12	9,69	8,87	3,50	3,52	3,62
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,68	8,59	8,90	3,86	4,03	4,20
L Real Estat	5,00	4,11	4,30	2,79	2,84	2,81
M,N Jasa Perusahaan	9,81	7,69	7,36	1,57	1,65	1,70
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,38	4,63	3,19	3,83	3,91	3,86
P Jasa Pendidikan	5,47	7,33	3,84	3,23	3,37	3,37
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	6,68	5,00	1,03	1,07	1,07
R,S,T,U Jasa Lainnya	8,93	8,08	7,80	1,55	1,65	1,71
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	5,00	4,18	4,55	97,51	96,86	96,43
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	5,08	32,24	19,31	2,49	3,14	3,57
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,01	4,88	5,02	100	100	100

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

10. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp 9.433,0 triliun.

Tabel 2.8
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 409,7	1 555,7	1 669,0	1 129,1	1 171,6	1 209,7
B Pertambangan dan Penggalian	1 039,4	881,7	893,9	794,5	767,3	775,5
C Industri Pengolahan	2 227,6	2 418,4	2 544,6	1 854,3	1 934,5	2 017,6
D Pengadaan Listrik dan Gas	114,9	131,3	142,8	94,0	94,9	100,0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,8	8,5	9,0	6,9	7,4	7,6
F Konstruksi	1 042,0	1 177,1	1 287,7	826,6	879,2	925,1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 419,2	1 535,3	1 636,0	1 177,3	1 207,7	1 255,2
H Transportasi dan Pergudangan	467,0	579,1	647,2	326,9	348,8	375,8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	321,1	341,6	362,2	257,8	268,9	282,2
J Informasi dan Komunikasi	369,5	406,0	449,1	384,5	421,7	459,2
K Jasa Keuangan dan Asuransi	408,4	465,0	520,9	319,8	347,3	378,2
L Real Estat	294,6	327,6	348,3	256,4	267,0	278,5
M,N Jasa Perusahaan	166,0	190,3	211,6	137,8	148,4	159,3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	404,6	450,2	478,6	296,3	310,1	319,9
P Jasa Pendidikan	341,8	388,0	418,3	263,7	283,0	293,9
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,1	122,9	132,4	91,4	97,5	102,3
R,S,T,U Jasa Lainnya	163,5	190,6	212,2	134,1	144,9	156,2
NILAI TAMBAH ATAS HARGA DASAR	10 306,2	11 169,3	11 963,8	8 351,4	8 700,2	9 096,2
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	263,5	362,4	443,0	213,5	282,3	336,8
PRODUK DOMESTIK BRUTO	10 569,7	11 531,7	12 406,8	8 564,9	8 982,5	9 433,0

11. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,02 persen ditopang oleh hampir semua Komponen, kecuali Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen dan 0,15 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,62 persen, diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, masing-masing tumbuh sebesar 5,01 persen, dan 4,48 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (persen)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,15	4,96	5,01	55,96	56,17	56,50
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,19	-0,62	6,62	1,18	1,14	1,16
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,16	5,32	-0,15	9,43	9,75	9,45
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,45	5,01	4,48	32,52	32,80	32,57
5 Perubahan Inventori	-	-	-	2,08	1,38	1,73
6 Ekspor Barang dan Jasa	1,07	-2,12	-1,74	23,67	21,15	19,08
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,12	-6,41	-2,27	24,41	20,72	18,31
PDB	5,01	4,88	5,02	100,00	100,00	100,00

¹ Atas dasar harga konstan 2010

² Atas dasar harga berlaku

12. Tahun 2016, Komponen Konsumsi Rumah Tangga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 56,50 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar 19,08 persen, Impor Barang dan Jasa sebesar 18,31 persen, Konsumsi Pemerintah sebesar 9,45 persen, dan Komponen Konsumsi LNPRT sebesar 1,16 persen.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2014–2016 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 915,2	6 477,6	7 009,6	4 651,0	4 881,9	5 126,5
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124,3	130,9	144,5	99,4	98,8	105,3
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	996,2	1 124,8	1 172,4	736,3	775,4	774,3
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3 436,9	3 782,1	4 040,5	2 772,5	2 911,5	3 041,8
5 Perubahan Inventori	220,2	158,8	214,1	163,6	112,8	139,6
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 501,4	2 439,1	2 367,3	2 047,9	2 004,4	1 969,6
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 580,5	2 389,6	2 271,2	1 987,1	1 859,7	1 817,5
Diskrepani Statistik	-44,0	-192,0	-270,4	81,3	57,4	93,4
PDB	10.569,7	11 531,7	12 406,8	8 564,9	8 982,5	9 433,0

13. Dalam kurun waktu 2011-2016, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp32,4 juta (tahun 2011), sebesar Rp35,1 juta (tahun 2012), sebesar Rp38,4 juta (tahun 2013), sebesar Rp41,9 juta (tahun 2014), sebesar Rp45,1 juta (tahun 2015), dan sebesar Rp48,0 juta (tahun 2016).

Tabel 2.11
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2011–2016

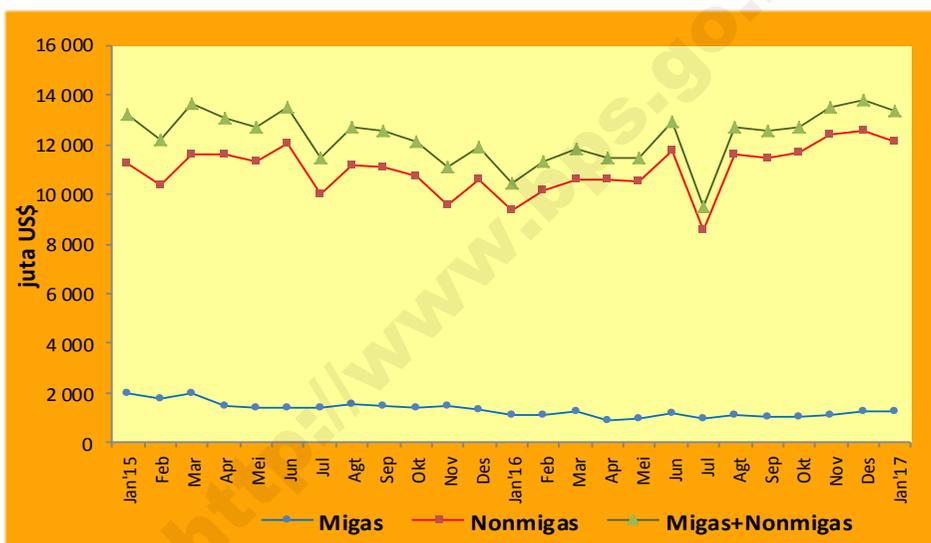
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku						
a. Nilai (juta rupiah)	32,4	35,1	38,4	41,9	45,1	48,0
b. Indeks Peningkatan (persen)	12,46	8,47	9,29	9,25	7,69	6,24
c. Nilai (US\$)	3 691,9	3 740,9	3 666,8	3 532,3	3 374,5	3 605,1

III. EKSPOR JANUARI 2017

1. Nilai ekspor Indonesia Januari 2017 mencapai US\$13,38 miliar, atau turun 3,21 persen dibanding ekspor Desember 2016. Sementara dibanding Januari 2016, ekspor naik sebesar 27,71 persen.

**Nilai ekspor Januari 2017
mencapai US\$13,38 miliar,
naik 27,71 persen**

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Januari 2015–Januari 2017



2. Ekspor nonmigas Januari 2017 mencapai US\$12,11 miliar, turun 3,70 persen dibanding ekspor nonmigas Desember 2016, sementara naik 29,24 persen dibanding ekspor Januari 2016.
3. Penurunan terbesar ekspor nonmigas Januari 2017 terhadap Desember 2016 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US\$121,3 juta (27,56 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada karet dan barang dari karet sebesar US\$60,0 juta (10,55 persen).
4. Ekspor nonmigas Januari 2017 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu US\$1,55 miliar, disusul Amerika Serikat US\$1,43 miliar dan India US\$1,32 miliar, dengan

kontribusi ketiganya mencapai 35,46 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US\$1,37 miliar.

5. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari 2017 naik sebesar 26,27 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2016, demikian juga ekspor hasil pertanian naik 11,67 persen dan ekspor hasil tambang dan lainnya naik 50,37 persen.
6. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari 2017 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$2,30 miliar (17,16 persen), diikuti Riau sebesar US\$1,55 miliar (11,56 persen) dan Kalimantan Timur sebesar US\$1,48 miliar (11,08 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

Uraian	2015		2016		2017		Δ (%)			Peran thd Total Januari 2017 (%)
	Jan-Des	Januari	Desember	Jan-Des	Januari	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan-Des		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Total Ekspor	150 366,3	10 480,6	13 828,7	144 489,8	13 384,8	27,71	-3,21	-3,91	100,00	
Migas	18 574,4	1 108,0	1 250,1	13 105,4	1 271,6	14,77	1,72	-29,44	9,50	
Industri pengolahan hasil minyak	1 754,2	85,5	109,9	872,0	163,8	91,66	49,10	-50,29	1,22	
Pengadaan gas	12,2	0,0	9,1	44,4	9,4	41 872,59	2,98	263,72	0,07	
Pertambangan	16 808,0	1 022,5	1 131,1	12 189,0	1 098,4	7,42	-2,89	-27,48	8,21	
-Minyak mentah	6 479,4	357,5	443,9	5 196,7	380,3	6,37	-14,32	-19,80	2,84	
-Gas	10 328,6	665,0	687,2	6 992,3	718,1	7,99	4,49	-32,30	5,37	
Nonmigas	131 791,9	9 372,6	12 578,6	131 384,4	12 113,2	29,24	-3,70	-0,31	90,50	
Pertanian	3 726,5	250,9	358,2	3 436,2	280,1	11,67	-21,79	-7,79	2,09	
Industri Pengolahan	108 603,5	7 815,0	10 136,8	109 797,3	9 868,2	26,27	-2,65	1,10	73,73	
Pertambangan dan Lainnya	19 461,9	1 306,7	2 083,6	18 150,8	1 964,9	50,37	-5,70	-6,74	14,68	

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2015–2016

Uraian	2015					2016					Perubahan Triwulan (%)				
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	I-2016 thd IV-2015	II-2016 thd I-2016	III-2016 thd II-2016	IV-2016 thd III-2016	IV-2016 thd IV-2015					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					
Total Ekspor	35 161,0	33 602,7	35 964,6	34 847,6	40 074,9	-4,43	7,03	-3,11	15,00	13,98					
Migas	4 176,0	3 460,6	3 037,0	3 198,7	3 409,0	-17,13	-12,24	5,32	6,57	-18,37					
Industri pengolahan hasil minyak	260,5	203,5	201,0	211,2	256,2	-21,88	-1,25	5,08	21,35	-1,64					
Pengadaan gas	2,0	2,6	4,0	3,4	34,3	26,93	56,77	-14,46	887,06	1 580,04					
Pertambangan	3 913,5	3 254,5	2 832,0	2 984,1	3 118,5	-16,84	-12,98	5,37	4,50	-20,31					
-Minyak mentah	1 403,5	1 402,9	1 315,5	1 323,9	1 154,5	-0,04	-6,24	0,64	-12,80	-17,75					
-Gas	2 510,0	1 851,6	1 516,5	1 660,2	1 964,0	-26,23	-18,09	9,47	18,30	-21,75					
Nonmigas	30 985,0	30 142,1	32 927,6	31 648,9	36 665,9	-2,72	9,24	-3,88	15,85	18,33					
Pertanian	925,4	696,1	705,2	928,6	1 106,4	-24,78	1,32	31,67	19,15	19,56					
Industri pengolahan	25 871,2	25 491,6	28 283,3	26 074,4	29 948,1	-1,47	10,95	-7,81	14,86	15,76					
Pertambangan dan lainnya	4 188,4	3 954,4	3 939,1	4 645,9	5 611,4	-5,59	-0,39	17,94	20,78	33,98					

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahanannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	Desember 2016	Januari 2017	Δ	Δ%	Januari–Desember			
					2015	2016	Δ%	Peran (%) 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	2 182,2	2 194,7	12,5	0,58	18 658,8	18 231,7	-2,29	13,88
2. Perhiasan/permata (71)	280,5	239,3	-41,2	-14,71	5 494,8	6 368,7	15,90	4,85
3. Kendaraan dan bagiannya (87)	469,8	507,1	37,3	7,93	5 419,4	5 867,8	8,27	4,47
4. Karet dan barang dari karet (40)	568,6	628,6	60,0	10,55	5 913,5	5 663,4	-4,23	4,31
5. Mesin-mesin/pesawat mekanik (84)	420,8	451,2	30,4	7,23	5 215,1	5 450,8	4,52	4,15
6. Pakaian jadi bukan rajutan (62)	375,6	343,6	-32,0	-8,52	3 978,3	3 879,8	-2,48	2,95
7. Bijih, kerak, dan abu logam (26)	440,1	318,8	-121,3	-27,56	3 378,4	3 567,6	5,60	2,71
8. Ikan dan udang (03)	282,9	215,6	-67,3	-23,77	2 658,6	2 900,6	9,10	2,21
9. Kopi, teh, dan rempah-rempah (09)	211,2	166,8	-44,4	-21,05	2 196,0	1 896,5	-13,64	1,44
10. Benda-benda dari besi dan baja (73)	88,2	106,9	18,7	21,22	2 006,8	1 667,8	-16,89	1,27
Total 10 Golongan Barang	5 319,9	5 172,6	-147,3	-2,77	54 919,7	55 494,7	1,05	42,24
Lainnya	7 258,7	6 940,6	-318,1	-4,38	76 872,2	75 889,7	-1,28	57,76
Total Ekspor Nonmigas	12 578,6	12 113,2	-465,4	-3,70	131 791,9	131 384,4	-0,31	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	Desember 2016	Januari 2017	Δ	Δ%	Januari–Desember			Peran (%) 2016
					2015	2016	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASEAN	2 726,3	2 382,4	-343,9	-12,62	27 285,3	28 759,0	5,40	21,89
1 Singapura	725,4	557,3	-168,1	-23,18	8 661,0	8 725,5	0,74	6,64
2 Malaysia	637,7	591,5	-46,2	-7,24	6 227,8	6 013,3	-3,44	4,58
3 Thailand	393,1	413,7	20,6	5,23	4 600,5	4 608,7	0,18	3,51
ASEAN Lainnya	970,1	819,9	-150,2	-15,48	7 796,0	9 411,5	20,72	7,16
Uni Eropa	1 430,6	1 367,1	-63,5	-4,44	14 801,9	14 415,5	-2,61	10,97
4 Jerman	244,5	231,2	-13,3	-5,43	2 661,9	2 635,1	-1,00	2,00
5 Belanda	380,2	343,6	-36,6	-9,62	3 409,7	3 219,9	-5,57	2,45
6 Italia	131,7	173,3	41,6	31,63	1 872,9	1 572,1	-16,06	1,20
Uni Eropa Lainnya	674,2	619,0	-55,2	-8,20	6 857,4	6 988,4	1,91	5,32
Negara Utama Lainnya	6 431,6	6 296,4	-135,2	-2,10	65 353,2	64 421,3	-1,43	49,03
7 Tiongkok	1 879,3	1 550,1	-329,2	-17,52	13 260,7	15 112,8	13,97	11,50
8 Jepang	1 243,3	1 159,4	-83,9	-6,75	13 096,1	13 212,5	0,89	10,06
9 Amerika Serikat	1 457,0	1 426,0	-31,0	-2,13	15 308,2	15 684,3	2,46	11,94
10 India	923,2	1 319,3	396,1	42,91	11 602,0	9 924,2	-14,46	7,55
11 Australia	150,5	147,9	-2,6	-1,74	2 994,6	2 660,7	-11,15	2,02
12 Korea Selatan	541,6	484,6	-57,0	-10,53	5 439,7	5 263,3	-3,24	4,01
13 Taiwan	236,7	209,1	-27,6	-11,65	3 651,9	2 563,5	-29,80	1,95
Total 13 Negara Tujuan	8 944,2	8 607,0	-337,2	-3,77	92 787,0	91 195,9	-1,71	69,41
Lainnya	3 634,4	3 506,2	-128,2	-3,53	39 004,9	40 188,5	3,03	30,59
Total Ekspor Nonmigas	12 578,6	12 113,2	-465,4	-3,70	131 791,9	131 384,4	-0,31	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2014–2016
(FOB: juta US\$)

Bulan	2015			2016			2017		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	1 959,0	11 285,9	13 244,9	1 108,0	9 372,6	10 480,6	1 271,6	12 113,2	13 384,8
Feb	1 753,4	10 419,4	12 172,8	1 113,3	10 198,7	11 312,0			
Mar	1 988,9	11 645,1	13 634,0	1 239,3	10 570,7	11 810,0			
Apr	1 458,2	11 646,4	13 104,6	891,8	10 584,1	11 475,9			
Mei	1 392,8	11 361,9	12 754,7	957,9	10 556,4	11 514,3			
Jun	1 439,9	12 074,2	13 514,1	1 187,3	11 787,1	12 974,4			
Jul	1 421,8	10 044,0	11 465,8	998,7	8 532,1	9 530,8			
Agt	1 530,9	11 195,2	12 726,0	1 138,6	11 609,7	12 748,3			
Sep	1 453,6	11 134,8	12 588,4	1 061,5	11 507,0	12 568,5			
Okt	1 379,5	10 742,2	12 121,7	1 055,9	11 686,7	12 742,6			
Nov	1 497,0	9 625,1	11 122,2	1 103,0	12 400,6	13 503,6			
Des	1 299,5	10 617,6	11 917,1	1 250,1	12 578,6	13 828,7			
Total	18 574,4	131 791,9	150 366,3	13 105,4	131 384,4	144 489,8	1 271,6	12 113,2	13 384,8

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari 2017

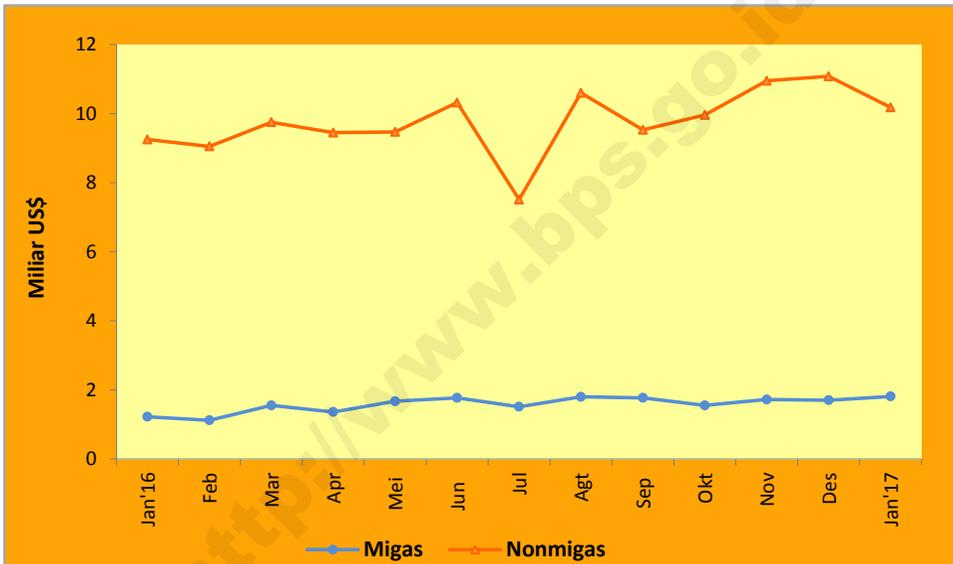
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	4,8	0,05	40,08	7,2	0,20	59,92	12,1	0,09	100,00
2	Sumatera Utara	670,8	6,93	99,09	6,2	0,17	0,91	676,9	5,06	100,00
3	Sumatera Barat	165,1	1,71	94,83	9,0	0,24	5,17	174,1	1,30	100,00
4	Riau	1 521,3	15,72	98,31	26,1	0,70	1,69	1 547,4	11,56	100,00
5	Kepulauan Riau	914,5	9,45	99,96	0,4	0,01	0,04	914,8	6,83	100,00
6	Jambi	72,6	0,75	37,10	123,1	3,32	62,90	195,7	1,46	100,00
7	Sumatera Selatan	239,8	2,48	95,98	10,0	0,27	4,02	249,8	1,87	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	162,3	1,68	96,38	6,1	0,16	3,62	168,3	1,26	100,00
9	Bengkulu	9,8	0,10	50,01	9,8	0,27	49,99	19,7	0,15	100,00
10	Lampung	337,7	3,49	93,80	22,3	0,60	6,20	360,1	2,69	100,00
11	DKI Jakarta	676,8	6,99	99,88	0,8	0,02	0,12	677,7	5,06	100,00
12	Jawa Barat	36,8	0,38	1,60	2 259,5	60,98	98,40	2 296,2	17,16	100,00
13	Banten	144,0	1,49	15,93	760,4	20,52	84,07	904,5	6,76	100,00
14	Jawa Tengah	450,8	4,66	77,84	128,4	3,46	22,16	579,1	4,33	100,00
15	DI Yogyakarta	0,5	0,01	1,57	30,5	0,82	98,43	31,0	0,23	100,00
16	Jawa Timur	1 271,7	13,14	98,09	24,7	0,67	1,91	1 296,4	9,69	100,00
17	Bali	14,4	0,15	36,84	24,7	0,67	63,16	39,1	0,29	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	51,5	0,53	99,71	0,1	0,00	0,29	51,6	0,39	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	1,8	0,02	16,84	8,9	0,24	83,16	10,7	0,08	100,00
20	Kalimantan Barat	86,3	0,89	98,37	1,4	0,04	1,63	87,7	0,66	100,00
21	Kalimantan Tengah	46,0	0,48	22,33	160,1	4,32	77,67	206,2	1,54	100,00
22	Kalimantan Selatan	527,4	5,45	94,93	28,2	0,76	5,07	555,6	4,15	100,00
23	Kalimantan Timur	1 475,8	15,25	99,54	6,8	0,18	0,46	1 482,7	11,08	100,00
24	Kalimantan Utara	62,5	0,65	96,24	2,4	0,07	3,76	65,0	0,49	100,00
25	Sulawesi Utara	48,9	0,51	86,21	7,8	0,21	13,79	56,8	0,42	100,00
26	Gorontalo	-	-	-	0,2	0,01	100,00	0,2	0,00	100,00
27	Sulawesi Tengah	143,9	1,49	98,58	2,1	0,06	1,42	146,0	1,09	100,00
28	Sulawesi Selatan	87,6	0,91	98,29	1,5	0,04	1,71	89,1	0,67	100,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	29,4	0,79	100,00	29,4	0,22	100,00
30	Sulawesi Tenggara	6,9	0,07	67,53	3,3	0,09	32,47	10,3	0,08	100,00
31	Maluku	0,3	0,00	8,10	3,0	0,08	91,90	3,3	0,02	100,00
32	Maluku Utara	12,3	0,13	100,00	0,0	0,00	0,00	12,3	0,09	100,00
33	Papua	272,9	2,82	100,00	-	-	-	272,9	2,04	100,00
34	Papua Barat	161,6	1,67	99,65	0,6	0,02	0,35	162,2	1,21	100,00
Total Ekspor		9 679,5	100,00	-	3 705,4	100,00	-	13 384,8	100,00	-

IV. IMPOR JANUARI 2017

1. Nilai impor Indonesia Januari 2017 sebesar US\$11,99 miliar atau turun 6,21 persen dibanding impor Desember 2016. Dibanding impor Januari 2016 naik 14,54 persen.

**Impor Januari 2017
sebesar US\$11,99 miliar
atau naik 14,54 persen**

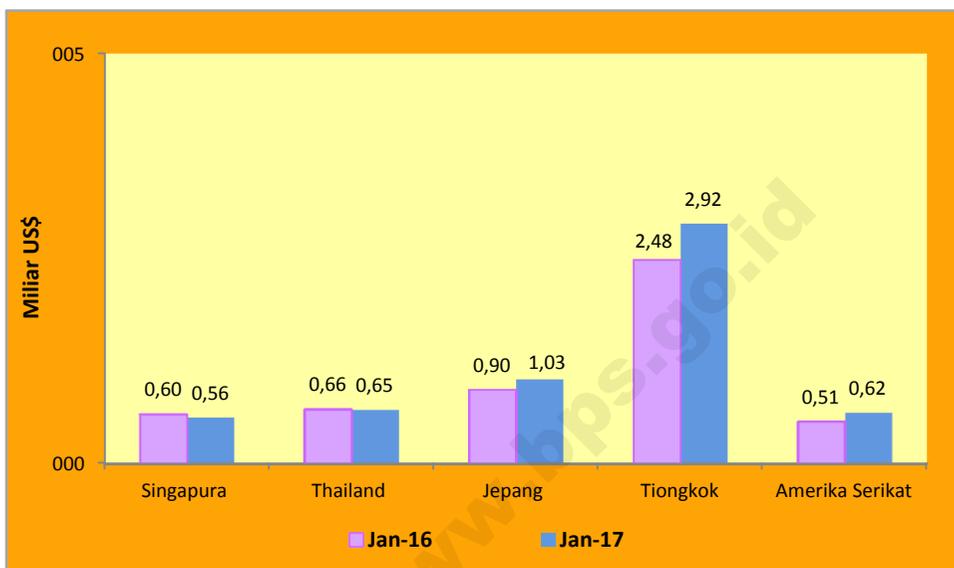
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Januari 2016–Januari 2017



2. Impor nonmigas Januari 2017 sebesar US\$10,18 miliar, turun 8,12 persen dibanding Desember 2016 (US\$11,08 miliar). Selama Januari 2017 impor nonmigas naik 10,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$9,25 miliar).
3. Impor migas Januari 2017 sebesar US\$1,81 miliar, naik 6,25 persen dibanding Desember 2016 (US\$1,70 miliar). Selama Januari impor migas naik 48,03 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$1,22 miliar).
4. Peningkatan nilai impor nonmigas terbesar Januari 2017 adalah golongan bahan kimia organik sebesar US\$126,0 juta, atau naik 33,54 persen dibanding Desember 2016 (US\$375,7 juta). Impor golongan barang tersebut pada Januari 2017 mencapai US\$501,7 juta, naik 21,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari 2017 ditempati Tiongkok 28,70 persen, Jepang 10,10 persen, dan Thailand 6,42 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 19,56 persen dan 9,59 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari 2016 dan 2017



6. Nilai impor golongan bahan baku/penolong dan barang modal selama Januari 2017 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 20,92 persen dan 6,04 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi menurun 13,39 persen.
7. Neraca perdagangan Indonesia Januari 2017 surplus sebesar US\$1,40 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari 2016 dan 2017

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Januari 2017 (%)
	Jan–Des 2016	Januari 2016	Desember 2016	Januari 2017	Jan'17 thd Des'16	Jan 2017 thd Jan 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	135 652,9	10 467,0	12 782,5	11 989,0	-6,21	14,54	100,00
Migas	18 739,3	1 221,5	1 701,9	1 808,2	6,25	48,03	15,08
- Minyak Mentah	6 730,6	393,9	583,0	293,1	-49,73	-25,59	2,44
- Hasil Minyak	10 339,8	685,1	978,7	1 298,6	32,69	89,55	10,83
- Gas	1 668,9	142,5	140,2	216,5	54,42	51,93	1,81
Nonmigas	116 913,6	9 245,5	11 080,6	10 180,8	-8,12	10,12	84,92

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Januari 2016–Januari 2017

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016						
Januari	1 221,5	9 245,5	10 467,0	-32,06	-10,06	-13,33
Februari	1 122,9	9 052,7	10 175,6	-8,07	-2,09	-2,78
Maret	1 552,4	9 749,3	11 301,7	38,25	7,69	11,07
Triwulan I	3 896,8	28 047,5	31 944,5	-25,08	-4,94	-7,96
April	1 362,1	9 451,5	10 813,6	-12,26	-3,05	-4,32
Mei	1 668,5	9 472,2	11 140,7	22,49	0,22	3,02
Juni	1 772,2	10 323,0	12 095,2	6,22	8,98	8,57
Triwulan II	4 802,8	29 246,8	34 049,5	23,25	4,28	6,59
Juli	1 506,4	7 510,8	9 017,2	-15,00	-27,24	-25,45
Agustus	1 795,9	10 589,3	12 385,2	19,23	40,99	37,35
September	1 766,4	9 531,1	11 297,5	-1,64	-9,99	-8,78
Triwulan III	5 068,7	27 631,2	32 699,9	5,54	-5,52	-3,96
Oktober	1 545,1	9 962,1	11 507,2	-12,53	4,52	1,86
November	1 724,1	10 945,3	12 669,4	11,59	9,87	10,10
Desember	1 701,9	11 080,6	12 782,5	-1,29	1,24	0,89
Triwulan IV	4 971,1	31 988,0	36 959,1	-1,93	15,77	13,03
Jan–Des	18 739,3	116 913,6	135 652,9	-23,86	-0,99	-4,93
2017						
Januari	1 808,2	10 180,8	11 989,0	6,25	-8,12	-6,21

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya
Januari 2016 dan 2017

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Januari'17 (%)
	Jan–Des 2016	Januari 2016	Desember 2016	Januari 2017	Jan'17 thd Des'16	Jan 2017 thd Jan 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	21 070,9	1 796,5	1 976,6	1 739,4	-12,00	-3,18	17,08
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	15 430,9	1 109,2	1 487,5	1 361,8	-8,45	22,77	13,38
3. Bahan kimia organik (29)	4 790,6	413,8	375,7	501,7	33,54	21,24	4,93
4. Kapas (52)	2 096,2	182,4	204,6	236,1	15,40	29,44	2,32
5. Biji-bijian berminyak (12)	1 202,9	81,5	107,6	165,0	53,35	102,45	1,62
6. Bubur kayu/pulp (47)	1 346,8	107,9	102,6	132,7	29,34	22,98	1,30
7. Pupuk (31)	1 555,6	116,1	91,6	130,2	42,14	12,14	1,28
8. Gula dan kembang gula (17)	2 367,5	75,1	275,3	126,8	-53,94	68,84	1,24
9. Perhiasan/permata (71)	894,6	30,3	307,3	101,6	-66,94	235,31	1,00
10. Kapal laut dan bangunan terapung (89)	990,3	66,9	163,7	49,8	-69,58	-25,56	0,49
Total 10 Golongan Barang	51 746,3	3 979,7	5 092,5	4 545,1	-10,75	14,21	44,64
Barang Lainnya	65 167,3	5 265,8	5 988,1	5 635,7	-5,89	7,02	55,36
Total Impor Nonmigas	116 913,6	9 245,5	11 080,6	10 180,8	-8,12	10,12	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari 2017

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	226,0	2 610,0	267,2	3 103,2	7,28	84,10	8,61	100,00
2 Jepang	25,3	771,4	233,0	1 029,7	2,47	74,91	22,63	100,00
3 Korea Selatan	33,1	506,1	78,3	617,5	5,38	81,95	12,68	100,00
4 Tiongkok	344,5	1 846,4	762,4	2 953,3	11,66	62,52	25,82	100,00
5 India	82,4	239,6	31,3	353,3	23,32	67,82	8,86	100,00
6 Australia	37,1	310,4	12,8	360,4	10,30	86,15	3,55	100,00
7 Selandia Baru	22,1	21,5	1,4	45,0	49,11	47,78	3,11	100,00
8 Amerika Serikat	49,5	519,4	54,6	623,5	7,94	83,32	8,74	100,00
9 Uni Eropa	88,1	528,6	362,8	979,5	8,99	53,97	37,04	100,00
10 Lainnya	97,2	1 711,5	114,9	1 923,6	5,05	88,97	5,97	100,00
Total Impor	1 005,4	9 064,9	1 918,7	11 989,0	8,39	75,61	16,00	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari 2016 dan 2017

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Januari'17 (%)
	Jan–Des 2016	Januari 2016	Desember 2016	Januari 2017	Jan'17 thd Des'16	Jan 2017 thd Jan 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	25 140,0	1 992,8	2 307,0	1 991,1	-13,69	-0,09	19,56
1 Singapura	7 661,0	596,2	909,3	557,8	-38,66	-6,44	5,48
2 Thailand	8 601,2	662,2	636,3	654,0	2,78	-1,24	6,42
3 Malaysia	4 731,6	377,4	377,2	391,3	3,74	3,68	3,85
ASEAN Lainnya	4 146,2	357,0	384,2	388,0	0,99	8,68	3,81
Uni Eropa	10 670,7	992,8	950,7	976,5	2,71	-1,64	9,59
4 Jerman	3 150,7	263,5	299,6	252,4	-15,75	-4,21	2,48
5 Belanda	722,6	111,1	75,7	59,7	-21,14	-46,26	0,58
6 Italia	1 386,9	127,9	104,3	127,2	21,96	-0,55	1,25
Uni Eropa Lainnya	5 410,5	490,3	471,1	537,2	14,03	9,57	5,28
Negara Utama Lainnya	66 960,9	5 059,5	6 494,3	6 035,2	-7,07	19,28	59,28
7 Tiongkok	30 689,5	2 478,1	3 127,7	2 922,3	-6,57	17,93	28,70
8 Jepang	12 926,8	901,0	1 092,6	1 027,7	-5,94	14,06	10,10
9 Amerika Serikat	7 206,5	506,0	665,1	621,9	-6,50	22,91	6,11
10 Korea Selatan	5 909,2	454,0	547,2	555,2	1,46	22,29	5,45
11 Australia	4 529,1	244,6	475,7	327,7	-31,11	33,97	3,22
12 Taiwan	2 856,5	235,3	237,7	249,7	5,05	6,12	2,45
13 India	2 843,3	240,5	348,3	330,7	-5,05	37,51	3,25
Total 13 Negara Utama	93 214,9	7 197,8	8 896,7	8 077,6	-9,21	12,22	79,34
Negara Lainnya	23 698,7	2 047,7	2 183,9	2 103,2	-3,70	2,71	20,66
Total Impor Nonmigas	116 913,6	9 245,5	11 080,6	10 180,8	-8,12	10,12	100,00

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2016–Januari 2017
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2016				2017			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	1 160,8	7 496,8	1 809,4	10 467,0	1 005,4	9 064,9	1 918,7	11 989,0
Februari	1 005,2	7 376,4	1 794,0	10 175,6				
Maret	986,8	8 614,9	1 700,0	11 301,7				
April	865,5	8 177,6	1 770,5	10 813,6				
Mei	999,3	8 496,8	1 644,6	11 140,7				
Juni	1 141,6	8 957,1	1 996,5	12 095,2				
Juli	729,3	6 825,2	1 462,7	9 017,2				
Agustus	1 174,8	9 145,0	2 065,3	12 385,1				
September	995,7	8 481,1	1 820,7	11 297,5				
Oktober	960,1	8 565,0	1 982,1	11 507,2				
November	1 025,5	9 568,7	2 075,2	12 669,4				
Desember	1 307,1	9 241,0	2 234,4	12 782,5				
Total	12 351,7	100 945,9	22 355,3	135 652,9	1 005,4	9 064,9	1 918,7	11 989,0
Persentase thd Total (%)	9,11	74,41	16,48	100,00	8,39	75,61	16,00	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari 2017
(juta US\$)

	Negara Asal Barang	November 2016	Desember 2016	Jan-Des 2016	Januari 2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tiongkok	3 098,5	3 129,9	30 800,5	2 953,3
2	Singapura	1 394,8	1 549,3	14 548,3	1 375,9
3	Jepang	1 197,4	1 094,2	12 984,8	1 029,7
4	Malaysia	638,7	640,2	7 200,9	682,1
5	Thailand	680,7	643,2	8 666,9	657,2
6	Amerika Serikat	605,8	668,2	7 298,4	623,5
7	Korea Selatan	557,3	600,6	6 674,6	617,5
8	Australia	512,0	578,0	5 260,9	360,4
9	India	273,4	349,1	2 872,8	353,3
10	Vietnam	324,6	295,9	3 228,4	296,9
11	Jerman	284,0	300,2	3 159,5	253,1
12	Taiwan	256,9	239,9	2 889,9	250,5
13	Saudi Arabia	193,1	258,7	2 725,0	219,0
14	Perancis	101,3	105,4	1 362,0	178,2
15	Uni Emirat Arab	91,2	126,5	1 316,2	162,9
	Total 15 Negara	10 209,7	10 579,2	110 989,1	10 013,6
	Negara Lainnya	24 59,7	2 203,3	24 663,8	1 975,4
	Total Impor	12 669,4	12 782,5	135 652,9	11 989,0
	Total 15 Negara (%)	80,59	82,76	81,82	83,52
	Negara Lainnya (%)	19,41	17,24	18,18	16,48

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Januari 2016–Januari 2017
(miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Januari	1,11	9,37	10,48	1,22	9,25	10,47	-0,11	0,12	0,01
Februari	1,11	10,20	11,31	1,12	9,05	10,17	-0,01	1,15	1,14
Maret	1,24	10,57	11,81	1,55	9,75	11,30	-0,31	0,82	0,51
April	0,89	10,58	11,47	1,36	9,45	10,81	-0,47	1,13	0,66
Mei	0,96	10,55	11,51	1,67	9,47	11,14	-0,71	1,08	0,37
Juni	1,19	11,79	12,98	1,77	10,32	12,09	-0,58	1,47	0,88
Juli	1,00	8,53	9,53	1,51	7,51	9,02	-0,51	1,02	0,51
Agustus	1,14	11,61	12,75	1,80	10,59	12,39	-0,66	1,02	0,36
September	1,06	11,51	12,57	1,77	9,53	11,30	-0,71	1,98	1,27
Oktober	1,05	11,67	12,74	1,55	9,96	11,51	-0,49	1,72	1,23
November	1,10	12,40	13,50	1,72	10,95	12,67	-0,62	1,45	0,83
Desember	1,25	12,58	13,83	1,70	11,08	12,78	-0,45	1,50	1,05
Jan-Des	13,10	131,384	144,49	18,74	116,91	135,65	-5,63	14,47	8,84
2017									
Januari	1,27	12,12	13,39	1,81	10,18	11,99	-0,54	1,94	1,40

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Januari 2017

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	519 497	630 391	861 601 001	351 602 090
Triwulan I	39 985	51 936	66 562 915	29 213 209
Triwulan II	160 770	206 334	127 866 410	55 705 088
Triwulan III	152 844	195 941	35 181 781	14 964 060
Triwulan IV	165 898	176 180	631 989 895	251 719 733
2016	999 167	864 261	1 283 178 527	531 841 557
Triwulan I	627 653	261 673	981 992 734	401 346 706
Triwulan II	257 429	438 457	91 720 535	40 012 930
Triwulan III	83 825	105 468	72 605 748	31 181 924
Triwulan IV	30 260	58 663	136 859 510	59 299 997
2017				
Januari	11 810	31 214	12 472 990	10 851 353

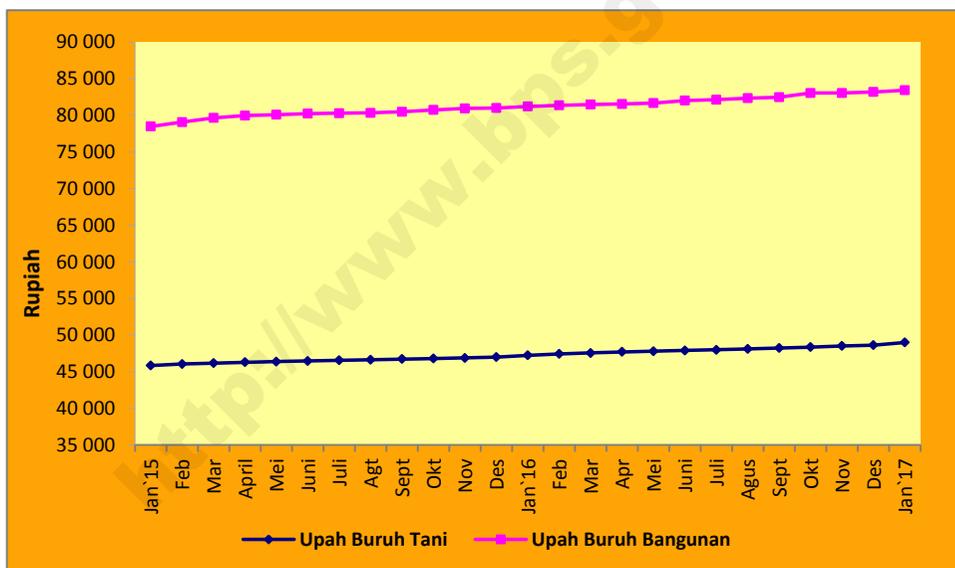
V. UPAH BURUH JANUARI 2017

1. Upah Harian Buruh Tani

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Januari 2017 naik sebesar 0,77 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp48.627,00 menjadi Rp49.000,00. Secara riil turun sebesar 0,02 persen, yaitu dari Rp37.072,00 menjadi Rp37.064,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Januari 2017 sebesar Rp49.000,00, naik 0,77 persen

Grafik 5.1
Rata-rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Januari 2015–Januari 2017



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Januari 2017, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,29 persen dibanding upah nominal Desember 2016, yaitu dari Rp83.190,00 menjadi Rp83.432,00, sedangkan upah riil turun sebesar 0,67 persen, yaitu dari Rp65.654,00 menjadi Rp65.211,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Januari 2017 sebesar Rp83.432,00, naik 0,29 persen

Tabel 5.1
Rata-rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Januari 2015–Januari 2017

Bulan	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal	Riil ¹⁾	Nominal	Riil ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233
April	46 306	38 546	79 970	67 253
Mei	46 386	38 383	80 087	67 019
Juni	46 458	38 130	80 237	66 786
Juli	46 572	37 887	80 293	66 216
Agustus	46 629	37 757	80 342	66 000
September	46 739	37 855	80 494	66 158
Oktober	46 800	37 918	80 744	66 418
November	46 881	37 822	80 946	66 447
Desember	46 995	37 486	81 002	65 861
Januari 2016	47 241	37 372	81 221	65 702
Februari	47 437	37 494	81 367	65 879
Maret	47 559	37 236	81 481	65 843
April	47 731	37 559	81 554	66 202
Mei	47 796	37 563	81 677	66 146
Juni	47 898	37 421	82 028	65 997
Juli	47 985	37 208	82 143	65 636
Agustus	48 120	37 290	82 348	65 810
September	48 235	37 259	82 480	65 768
Oktober	48 368	37 349	83 057	66 134
November	48 517	37 142	83 082	65 844
Desember	48 627	37 072	83 190	65 654
Januari 2017	49 000	37 064	83 432	65 211

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga perdesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

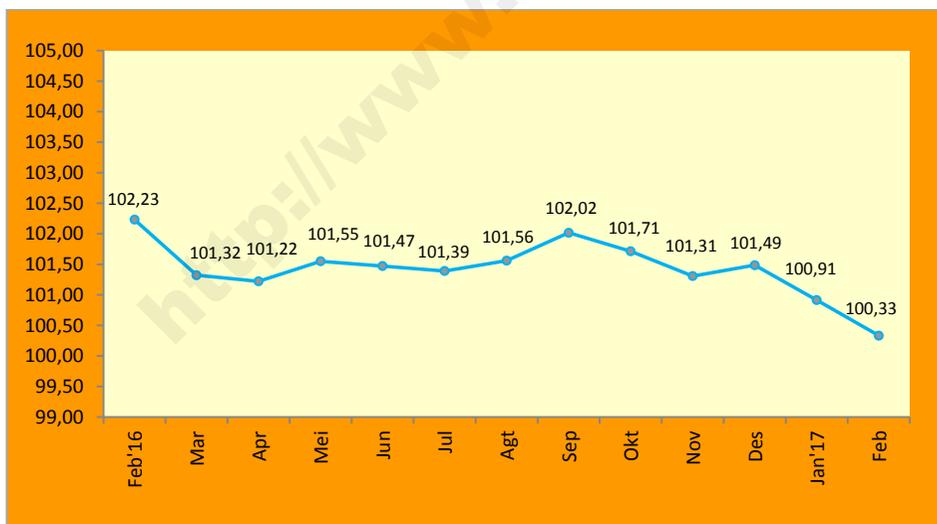
VI. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN FEBRUARI 2017

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP Februari 2017 tercatat 100,33 atau turun sebesar 0,58 persen dibanding NTP Januari 2017 sebesar 100,91. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor penyusun NTP yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Peternakan masing-masing sebesar 1,61 persen, 0,04 persen, 0,04 persen, dan 0,28 persen sedangkan Subsektor Perikanan naik 0,30 persen.

NTP Februari 2017 turun sebesar 0,58 persen

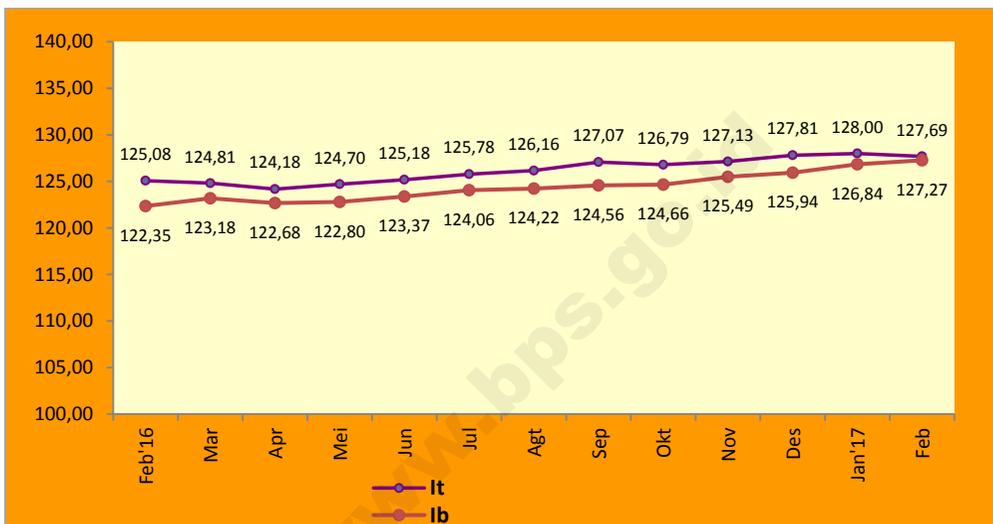
Grafik 6.1
Nilai Tukar Petani (NTP), Februari 2016–Februari 2017 (2012=100)



- Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Februari 2017 turun 0,24 persen bila dibanding It pada Januari 2017, yaitu dari 128,00 menjadi 127,69. Penurunan indeks tersebut disebabkan turunnya It di dua subsektor, yaitu Tanaman Pangan (1,17 persen), dan Peternakan (0,05 persen). Sedangkan Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Perikanan naik masing-masing sebesar 0,35 persen, 0,22 persen dan 0,57 persen.

3. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada Februari 2017 naik sebesar 0,34 persen dibanding Ib Januari 2017. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal masing-masing sebesar 0,38 persen dan 0,32 persen.

Grafik 6.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
Februari 2016–Februari 2017 (2012=100)



4. NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Februari 2017 turun sebesar 1,61 persen dibanding NTPP Januari 2017. Penurunan NTPP disebabkan It Tanaman Pangan turun (1,17 persen), sebaliknya Ib Tanaman Pangan naik (0,45 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) turun sebesar 0,04 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Hortikultura (0,35 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Hortikultura (0,39 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) turun sebesar 0,04 persen. Hal ini disebabkan kenaikan It Tanaman Perkebunan Rakyat (0,22 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Tanaman Perkebunan Rakyat (0,25 persen). NTP Peternakan (NTPT) turun sebesar 0,28 persen disebabkan It Peternakan turun (0,05 persen), sebaliknya Ib Peternakan naik (0,23 persen). NTP Perikanan (NTNP) naik 0,30 persen disebabkan kenaikan It Perikanan (0,57 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,27 persen).

Tabel 6.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Januari 2017	Februari 2017	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	100,91	100,33	-0,58
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	128,00	127,69	-0,24
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	126,84	127,27	0,34
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,20	132,71	0,38
- Indeks BPPBM	116,10	116,48	0,32
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	100,81	100,20	-0,60
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	127,92	127,58	-0,27
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	126,89	127,32	0,34
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,17	132,68	0,38
- Indeks BPPBM	116,20	116,58	0,33
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai Tukar Petani (NTPP)	97,68	96,11	-1,61
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	126,96	125,48	-1,17
- Padi	124,20	122,62	-1,27
- Palawija	134,92	134,00	-0,68
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	129,98	130,56	0,45
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,91	133,51	0,46
- Indeks BPPBM	120,82	121,34	0,43
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai Tukar Petani (NTPH)	102,04	102,00	-0,04
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	130,60	131,06	0,35
- Sayur-sayuran	129,03	129,71	0,53
- Buah-buahan	132,54	132,93	0,30
- Tanaman Obat	118,86	119,60	0,62
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	128,00	128,49	0,39
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,06	132,58	0,39
- Indeks BPPBM	115,55	115,98	0,38
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	98,75	98,72	-0,04
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	125,72	126,00	0,22
- Tanaman Perkebunan Rakyat	125,72	126,00	0,22
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	127,31	127,63	0,25
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	131,17	131,45	0,21
- Indeks BPPBM	115,07	115,61	0,47

Subsektor	Januari 2017	Februari 2017	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai Tukar Petani (NTP)	106,56	106,26	-0,28
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	129,38	129,31	-0,05
- Ternak Besar	131,70	131,96	0,20
- Ternak Kecil	124,74	124,56	-0,14
- Unggas	128,65	127,82	-0,64
- Hasil Ternak	123,32	122,77	-0,44
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,42	121,70	0,23
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,33	132,92	0,45
- Indeks BPPBM	111,68	111,68	0,00
5. Perikanan			
a. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	103,13	103,45	0,30
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	128,93	129,67	0,57
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib)	125,01	125,35	0,27
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	132,44	132,88	0,33
- Indeks BPPBM	112,62	112,76	0,13
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109,85	110,38	0,48
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	136,17	137,17	0,73
- Penangkapan Perairan Umum	131,67	132,35	0,52
- Penangkapan Laut	136,02	137,05	0,76
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	123,96	124,27	0,25
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	131,50	131,96	0,34
- Indeks BPPBM	112,13	112,23	0,09
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTP)	98,36	98,52	0,16
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	123,74	124,29	0,45
- Budidaya Air Tawar	124,47	124,99	0,42
- Budidaya Laut	115,58	115,59	0,01
- Budidaya Air Payau	121,10	121,66	0,46
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	125,80	126,16	0,28
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	133,16	133,60	0,33
- Indeks BPPBM	112,99	113,17	0,16

BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

B. Inflasi Perdesaan

1. Pada Februari 2017 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,38 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 132,71. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 23 provinsi, deflasi perdesaan di 9 provinsi, dan relatif stabil 1 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,09 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah di Provinsi Jambi sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,63 persen, sedangkan deflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau relatif stabil, tidak mengalami inflasi maupun deflasi.

**Pada Februari 2017
terjadi inflasi perdesaan
sebesar 0,38 persen**

Grafik 6.3
Inflasi Perdesaan, Februari 2015–Februari 2017



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada Februari 2017, terjadi kenaikan indeks harga di semua kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan 0,37 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 0,45 persen; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar 0,44 persen; Sandang 0,22 persen; Kesehatan 0,36 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,18 persen serta Transportasi dan Komunikasi 0,47 persen.
3. Inflasi perdesaan Februari 2017 sebesar 0,38 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas cabai rawit, bawang merah, bawang putih, rokok kretek filter, dan biaya pulsa ponsel prabayar.

Tabel 6.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
Februari 2015–Februari 2017

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Februari 2015	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21
Mei	0,97	0,46	0,31	0,38	0,26	0,08	0,30	0,60
Juni	1,35	0,70	0,36	0,53	0,23	0,30	0,15	0,82
Juli	1,52	0,38	0,28	1,65	0,31	0,56	0,24	0,89
Agustus	0,83	0,29	0,15	0,12	0,21	0,42	0,11	0,47
September	-0,40	0,26	0,26	0,25	0,26	0,25	0,17	-0,02
Oktober	-0,43	0,44	0,14	0,15	0,23	0,20	0,09	-0,04
November	0,62	0,47	0,28	0,18	0,21	0,18	0,13	0,43
Desember	2,22	0,61	0,26	0,21	0,22	0,13	0,14	1,14
Januari 2016	1,60	0,93	0,40	0,39	0,53	0,33	-1,28	0,83
Februari	-0,10	0,50	0,10	0,29	0,28	0,13	-0,16	0,09
Maret	1,88	0,48	0,18	0,25	0,29	0,09	0,03	0,95
April	-0,83	0,38	0,14	0,17	0,25	0,10	-2,28	-0,50
Mei	-0,22	0,90	0,21	0,24	0,23	0,14	-0,15	0,13
Juni	0,63	1,05	0,28	0,92	0,26	0,17	0,14	0,59
Juli	1,24	0,63	0,23	0,48	0,26	0,47	0,12	0,76
Agustus	-0,10	0,14	0,21	0,21	0,29	0,35	0,04	0,06
September	0,44	0,34	0,16	0,23	0,33	0,10	0,09	0,32
Oktober	-0,25	0,37	0,28	0,17	0,27	0,24	0,09	0,04
November	1,65	0,35	0,27	0,21	0,29	0,07	0,19	0,87
Desember	0,62	0,35	0,20	0,24	0,27	0,14	0,16	0,42
Januari 2017	0,75	0,90	0,95	0,51	0,88	0,41	0,70	0,79
Februari	0,37	0,45	0,44	0,22	0,36	0,18	0,47	0,38

4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender 2016 (Februari 2017 terhadap Desember 2016) adalah sebesar 1,17 persen dan tingkat inflasi perdesaan tahun ke tahun (Februari 2017 terhadap Februari 2016) adalah sebesar 4,89 persen.

Tabel 6.3
Tingkat Inflasi Perdesaan Februari 2017, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 2017
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan Februari 2017	Tingkat Inflasi Perdesaan 2017	
	Februari 2016	Desember 2016	Februari 2017		Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	126,52	131,17	132,71	0,38	1,17	4,89
1, Bahan Makanan	135,89	142,89	144,50	0,37	1,13	6,34
2, Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	122,01	128,23	129,97	0,45	1,35	6,52
3, Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	119,51	122,13	123,83	0,44	1,39	3,27
4, Sandang	119,76	123,57	124,47	0,22	0,73	3,93
5, Kesehatan	116,15	119,36	120,85	0,36	1,24	4,05
6, Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	113,38	115,51	116,19	0,18	0,59	2,48
7, Transportasi dan Komunikasi	122,52	120,58	122,00	0,47	1,18	-0,42

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- Pada Februari 2017 terjadi penurunan NTUP sebesar 0,56 persen. Hal ini terjadi karena It turun (0,24 persen), sedangkan indeks BPPBM naik (0,32 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya NTUP di empat subsektor penyusun NTUP yaitu NTUP Tanaman Pangan (1,59 persen), Tanaman Hortikultura (0,03 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,25 persen), dan Peternakan (0,06 persen), sedangkan Subsektor Perikanan naik (0,45 persen).
- Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 16 provinsi mengalami kenaikan dan 17 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTUP tertinggi pada Februari 2017 terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,13 persen, penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 1,07 persen.

Tabel 6.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya
(2012=100)

Subsektor	Januari 2017	Februari 2017	Persentase Perubahan
(1)	(3)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	105,08	103,41	-1,59
2. Tanaman Hortikultura	113,03	113,00	-0,03
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	109,25	108,98	-0,25
4. Peternakan	115,85	115,78	-0,06
5. Perikanan	114,48	114,99	0,45
a. Tangkap	121,43	122,22	0,65
b. Budidaya	109,51	109,83	0,29
Nasional	110,24	109,62	-0,56

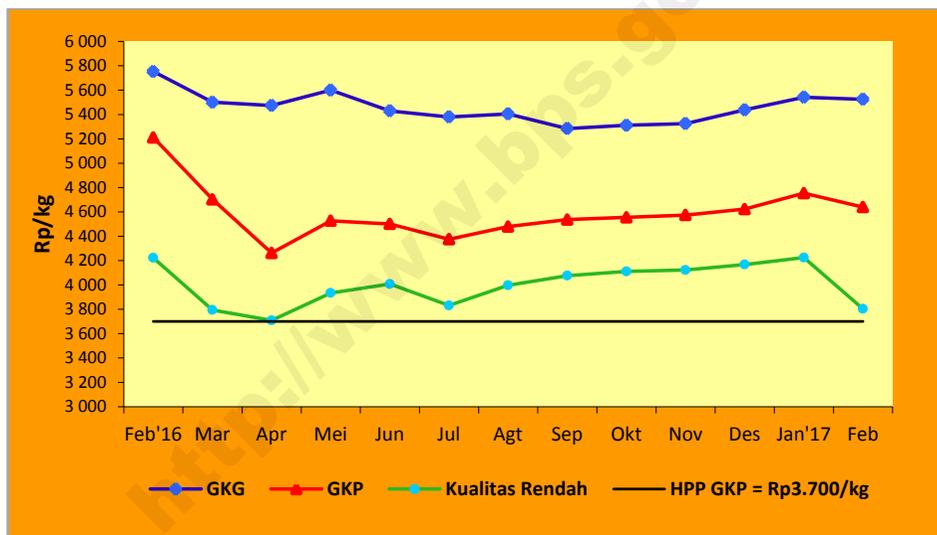
VII. HARGA PANGAN FEBRUARI 2017

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama Februari 2017, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 2,41 persen menjadi Rp4.639,00 per kg dan di tingkat penggilingan turun 2,34 persen menjadi Rp4.731,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKP di tingkat petani Februari 2017 sebesar Rp4.639,00 per kg turun 2,41 persen

Grafik 7.1
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas Februari 2016–Februari 2017



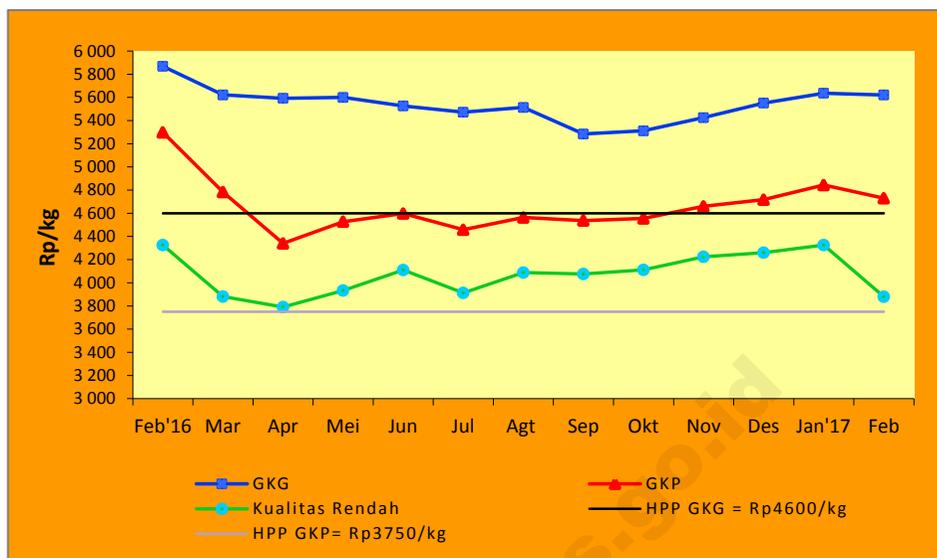
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani Rp9.000,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp9.050,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan masing-masing Rp2.600,00 per kg dan Rp2.675,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari kualitas GKP varietas Siam Mayang yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Cihayang yang terjadi di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (Jawa Tengah).

Tabel 7.1
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Februari 2016–Februari 2017

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Feb	18,01	5 211	0,10	12,64	5 753	1,13	25,78	4 223	-6,57
Mar	19,33	4 703	-9,76	12,72	5 501	-4,39	26,24	3 794	-10,15
Apr	18,98	4 262	-9,36	12,37	5 474	-0,49	25,36	3 709	-2,25
Mei	17,80	4 440	4,17	12,70	5 510	0,65	25,00	3 838	3,48
Jun	18,17	4 501	1,37	12,31	5 430	-1,45	24,54	4 008	4,42
Jul	18,96	4 376	-2,79	12,80	5 380	-0,92	26,02	3 831	-4,41
Agt	18,88	4 480	2,38	12,79	5 405	0,46	26,90	3 997	4,34
Sep	18,43	4 537	1,29	12,45	5 285	-2,23	24,73	4 076	1,98
Okt	19,37	4 555	0,40	12,60	5 312	0,51	26,48	4 111	0,85
Nov	19,33	4 574	0,41	12,95	5 325	0,26	25,86	4 122	0,28
Des	18,75	4 623	1,07	12,88	5 438	2,12	26,52	4 168	1,11
2017									
Jan	18,29	4 754	2,83	12,82	5 542	1,91	26,64	4 225	1,36
Feb	18,82	4 639	-2,41	12,89	5 525	-0,32	25,79	3 803	-9,98
Perubahan (%)									
Feb'17 thd Feb'16			-10,98			-3,96			-9,95

- Rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani selama Februari 2017 turun 0,32 persen menjadi Rp5.525,00 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan turun 0,27 persen menjadi Rp5.621,00 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Untuk harga gabah kualitas rendah di tingkat petani dan tingkat penggilingan mengalami penurunan masing-masing 9,98 persen menjadi Rp3.803,00 per kg dan 10,33 persen menjadi Rp3.880,00 per kg.
- Selama periode Februari 2016–Februari 2017, rata-rata harga tertinggi di tingkat petani untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.211,00 per kg dan Rp5.753,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.225,00 per kg terjadi pada Januari 2017. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.262,00 per kg dan Rp3.709,00 per kg terjadi pada April 2016, sedangkan GKG Rp5.285,00 per kg terjadi pada September 2016.

Grafik 7.2
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
Februari 2016–Februari 2017



5. Pada periode Februari 2016–Februari 2017, di tingkat penggilingan, rata-rata harga tertinggi untuk GKP dan GKG, masing-masing Rp5.298,00 per kg dan Rp5.869,00 per kg terjadi pada Februari 2016, sedangkan gabah kualitas rendah Rp4.326,00 per kg terjadi pada Januari 2017. Untuk rata-rata harga terendah pada GKG Rp5.397,00 terjadi pada September 2016, sedangkan GKP dan gabah kualitas rendah masing-masing Rp4.340,00 per kg dan Rp3.790,00 per kg terjadi pada April 2016.
6. Dibandingkan Februari 2016, rata-rata harga di tingkat petani pada Februari 2017 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah, semua mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,98 persen, 3,96, dan 9,95 persen. Begitu pula di tingkat penggilingan pada Februari 2017 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah, semua juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,70 persen, 4,23 persen, dan 10,29 persen.
7. Berdasarkan komposisinya, jumlah 1.305 observasi harga gabah masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 752 observasi (57,62 persen), diikuti oleh gabah kualitas rendah sebanyak 425 observasi (32,57 persen), dan GKG sebanyak 128 observasi (9,81 persen). Dari sejumlah 752 observasi kualitas GKP, terdapat kasus harga di bawah HPP yaitu 19 observasi atau 2,53 persen baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan.

Tabel 7.2
Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, Februari 2016–Februari 2017

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2016									
Feb	18,01	5 298	0,14	12,64	5 869	1,09	25,78	4 325	-6,26
Mar	19,33	4 783	-9,72	12,72	5 622	-4,20	26,24	3 881	-10,28
Apr	18,98	4 340	-9,27	12,37	5 593	-0,53	25,36	3 790	-2,34
Mei	17,80	4 527	4,32	12,70	5 600	0,14	25,00	3 934	3,80
Jun	18,17	4 598	1,56	12,31	5 526	-1,32	24,54	4 110	4,48
Jul	18,96	4 458	-3,03	12,80	5 473	-0,97	26,02	3 912	-4,82
Agt	18,88	4 564	2,37	12,79	5 514	0,75	26,90	4 088	4,50
Sep	18,43	4 621	1,26	12,45	5 397	-2,13	24,73	4 184	2,35
Okt	19,37	4 643	0,47	12,60	5 413	0,31	26,48	4 211	0,65
Nov	19,33	4 660	0,37	12,95	5 426	0,23	25,86	4 225	0,31
Des	18,75	4 717	1,23	12,88	5 551	2,31	26,52	4 260	0,83
2017									
Jan	18,29	4 844	2,69	12,82	5 636	1,53	26,64	4 326	1,56
Feb	18,82	4 731	-2,34	12,89	5 621	-0,27	25,79	3 880	-10,33
Perubahan (%)									
Feb'17 thd 'Feb'16			-10,70			-4,23			-10,29

8. Pada Februari 2017, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.408,00 per kg turun sebesar 0,24 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.048,00 per kg turun sebesar 0,57 persen. Rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.584,00 per kg turun sebesar 0,99 persen.

Pada Februari 2017, rata-rata harga beras medium di penggilingan sebesar Rp9.048,00 per kg, turun 0,57 persen

9. Dibandingkan dengan Februari 2016, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2017 untuk kualitas premium, medium, dan rendah mengalami penurunan harga, masing-masing sebesar 3,85 persen, 5,97 persen, dan 6,64 persen.

Tabel 7.3
Rata-rata Harga Beras di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah
(Broken), Februari 2016–Februari 2017

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah			
	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	Rata-rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (Broken) (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
2016										
Feb	9 785	0,63	7,17	9 622	0,77	15,41	9 195	-0,93	23,61	
Mar	9 572	-2,18	7,33	9 444	-1,84	15,37	8 995	-2,17	23,39	
Apr	9 128	-4,64	7,29	8 959	-5,14	15,51	8 511	-5,39	23,40	
Mei	9 182	0,59	7,24	8 836	-1,38	15,74	8 488	-0,26	22,90	
Jun	9 354	1,88	7,35	8 973	1,55	15,55	8 582	1,10	23,04	
Jul	9 374	0,21	7,26	8 932	-0,45	15,58	8 558	-0,28	23,55	
Agt	9 367	-0,08	7,47	8 901	-0,35	15,87	8 502	-0,65	22,75	
Sep	9 111	-2,74	7,15	8 965	0,72	15,53	8 578	0,89	22,89	
Okt	9 132	0,24	7,26	8 981	0,17	15,76	8 597	0,23	23,08	
Nov	9 257	1,37	7,20	9 050	0,77	15,66	8 632	0,40	22,87	
Des	9 342	0,91	7,21	9 069	0,21	15,55	8 658	0,30	22,83	
2017										
Jan	9 431	0,96	7,32	9 100	0,34	15,72	8 669	0,13	22,90	
Feb	9 408	-0,24	7,33	9 048	-0,57	15,24	8 584	-0,99	23,17	
Perubahan (%)		-3,85			-5,97			-6,64		
Feb'17 thd Feb'16										

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

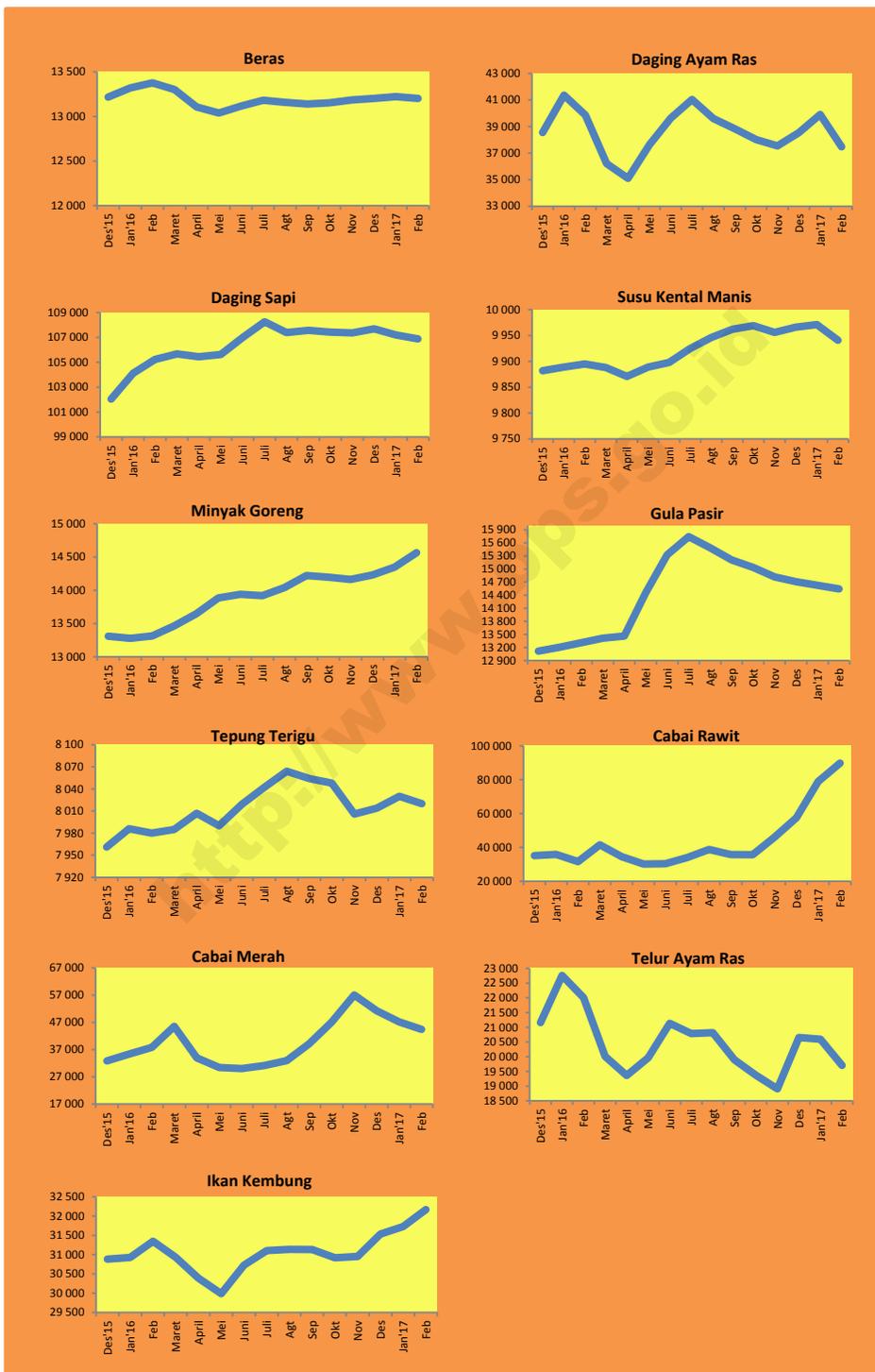
1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada Februari 2017 turun 0,15 persen dibanding Januari 2017. Dibandingkan Februari 2016, harga beras turun 1,30 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 3,83 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami penurunan nilai riil sebesar 5,13 persen. Penurunan tertinggi terjadi di Kudus (6,00 persen) dan Banyuwangi (5,00 persen).
2. Harga cabai rawit naik 13,70 persen dibanding Januari 2017 atau naik 184,45 persen dibanding Februari 2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Probolinggo (53,00 persen) dan Pare-pare (51,00 persen). Harga minyak goreng naik 1,52 persen dibanding Januari 2017 atau naik 9,42 persen dibanding Februari 2016. Kenaikan tertinggi terjadi di Surakarta dan Bungo (masing-masing 6,00 persen) serta Semarang (5,00 persen). Harga daging ayam ras turun 6,08 persen dibanding Januari 2017 atau turun 5,98 persen dibanding Februari 2016. Penurunan tertinggi terjadi di Tanjung (26,00 persen) dan Jambi (22,00 persen).
3. Komoditas lain seperti daging sapi, susu kental manis, gula pasir, tepung terigu, cabai merah, telur ayam ras, dan ikan kembung perubahannya relatif rendah.

Rata-rata harga beras Februari 2017 sebesar Rp 13.202,00 per kg, turun 0,15 persen

Tabel 7.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Februari 2016–Februari 2017 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)	Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Februari'16	13 376	39 862	105 224	9 895	13 313	13 310	7 980	31 557	37 845	22 007	31 348
Maret	13 301	36 203	105 676	9 888	13 466	13 415	7 985	41 504	45 554	20 009	30 931
April	13 105	35 102	105 444	9 871	13 649	13 463	8 007	34 498	33 979	19 361	30 390
Mei	13 039	37 619	105 623	9 889	13 885	14 459	7 990	30 158	30 445	19 965	29 989
Juni	13 115	39 635	106 986	9 898	13 941	15 327	8 019	30 339	30 031	21 135	30 727
Juli	13 181	41 034	108 256	9 925	13 919	15 745	8 042	34 004	31 160	20 786	31 105
Agustus	13 157	39 606	107 393	9 946	14 041	15 490	8 064	38 805	32 955	20 815	31 136
September	13 140	38 830	107 576	9 962	14 222	15 211	8 054	35 790	39 151	19 897	31 133
Oktober	13 153	38 015	107 425	9 969	14 198	15 039	8 048	35 704	47 095	19 374	30 918
November	13 185	37 547	107 361	9 956	14 164	14 822	8 006	46 083	57 079	18 909	30 952
Desember	13 201	38 538	107 694	9 966	14 232	14 709	8 014	57 479	51 291	20 654	31 534
Januari'17	13 222	39 906	107 199	9 971	14 349	14 628	8 030	78 947	47 172	20 590	31 730
Februari	13 202	37 480	106 877	9 941	14 567	14 546	8 020	89 763	44 464	19 703	32 168
Februari'17 thd Januari'17	-0,15	-6,08	-0,3	-0,3	1,52	-0,56	-0,13	13,7	-5,74	-4,31	1,38
Februari'17 thd Februari'16 (dalam persen)	-1,30	-5,98	1,57	0,46	9,42	9,29	0,50	184,45	17,49	-10,47	2,62

Grafik 7.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Desember 2015–Februari 2017 (rupiah)



VIII. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN IV-2016 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR FEBRUARI 2017

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan dari Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan pada triwulan IV-2016 sebesar 132,36. Pada triwulan IV-2016, IHP gabungan tersebut mengalami kenaikan sebesar

Pada triwulan IV-2016 terjadi inflasi harga produsen sebesar 1,77 persen

1,77 persen dibandingkan IHP triwulan III-2016 sebesar 130,05 (*q-to-q*). Hal ini dipengaruhi oleh IHP Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan yang mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,20 persen, 10,28 persen dan 0,84 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan-IV 2016 sebesar 132,15 naik 0,17 persen dibandingkan dengan IHP triwulan III-2016 sebesar 131,93 (*q-to-q*). Demikian pula dengan IHP Sektor Pengelolaan Air triwulan IV-2016 sebesar 118,92 naik sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan IHP triwulan III-2016 sebesar 118,91 (*q-to-q*). Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2016 sebesar 125,34 naik 0,06 persen dibandingkan IHP triwulan III-2016 sebesar 125,26 (*q-to-q*). Sedangkan IHP Sektor Angkutan Penumpang triwulan IV-2016 sebesar 218,09 turun 1,65 persen dibandingkan dengan IHP triwulan III-2016 sebesar 221,75 (*q-to-q*). Perubahan IHP gabungan triwulan IV-2016 terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) sebesar 3,34 persen, yaitu dari 128,07 pada triwulan IV-2015 menjadi 132,36 pada triwulan IV-2016. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada semua sektor, yaitu Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 1,08 persen, 18,32 persen dan 2,18 persen. IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas triwulan IV-2016 terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 0,36 persen, yaitu dari 132,63 pada triwulan IV-2015 menjadi 132,15 pada triwulan IV-2016. Sedangkan IHP Sektor Pengelolaan Air naik sebesar 0,10 persen, yaitu dari 118,80 pada triwulan IV-2015 (*y-on-y*) menjadi 118,92 pada triwulan IV-2016. Sektor Angkutan Penumpang mengalami kenaikan 3,05 persen, yaitu dari 211,65 pada triwulan IV-2015 (*y-on-y*) menjadi 218,09 pada triwulan IV-2016. Demikian juga dengan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-

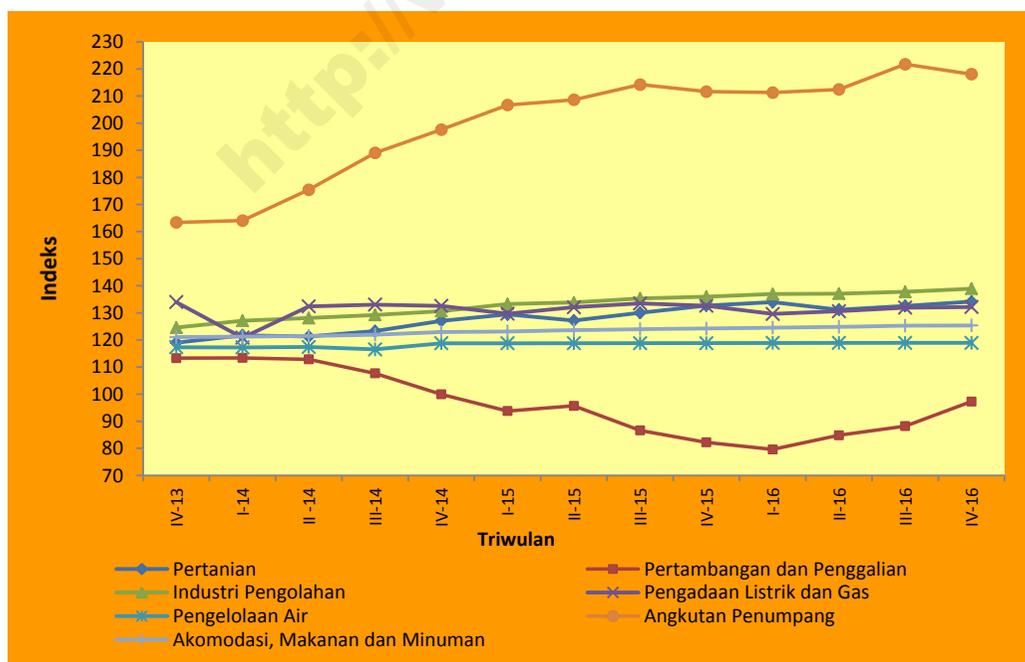
2016 terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen, yaitu dari 124,18 pada triwulan IV-2015 menjadi 125,34 pada triwulan IV-2016.

Tabel 8.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor
Triwulan IV-2016

Sektor	IHP Triw IV- 2015	IHP Triw III- 2016	IHP Triw IV- 2016	Inflasi Harga Produsen (<i>q-to-q</i>) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (<i>y-on-y</i>) ²⁾ (%)	
				Triw III- 2016	Triw IV- 2016	Triw IV- 2015	Triw IV- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	128,07	130,05	132,36	0,91	1,77	1,82	3,34
1. Pertanian	132,69	132,54	134,13	1,06	1,20	4,45	1,08
2. Pertambangan dan Penggalian	82,20	88,20	97,26	3,97	10,28	-17,75	18,32
3. Industri Pengolahan	135,95	137,76	138,92	0,49	0,84	4,07	2,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas	132,63	131,93	132,15	1,01	0,17	0,06	-0,36
5. Pengelolaan Air	118,80	118,91	118,92	0,00	0,01	0,03	0,10
6. Angkutan Penumpang	211,65	221,75	218,09	4,38	-1,65	7,10	3,05
7. Akomodasi, Makanan dan Minuman	124,18	125,26	125,34	0,35	0,06	1,01	0,93

Keterangan: 1). Inflasi Produsen (*q-to-q*) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1
2). Inflasi Produsen (*y-on-y*) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2016 terhadap Triwulan t-2015

Grafik 8.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan IV-2013 s.d. Triwulan IV-2016



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan IV-2016 naik 1,20 persen (*q-to-q*), yaitu dari 132,54 pada triwulan III-2016 menjadi 134,13 pada triwulan IV-2016. Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya IHP pada subsektor yaitu Subsektor Perkebunan (3,22 persen), Subsektor Tanaman Bahan Makanan (1,24 persen) dan Subsektor Perikanan (0,60 persen). Sedangkan untuk Subsektor Kehutanan dan Subsektor Peternakan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,05 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2015, Sektor Pertanian pada triwulan IV-2016 mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 1,08 persen, yaitu dari 132,69 pada triwulan IV-2015 menjadi 134,13 pada triwulan IV-2016. Subsektor Perkebunan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 7,84 persen, diikuti oleh Subsektor Peternakan sebesar 4,30 persen dan Subsektor kehutanan 3,04 persen. Sedangkan untuk Subsektor Tanaman Bahan Makanan mengalami deflasi sebesar 3,05 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV-2016 sebesar 97,26 mengalami kenaikan sebesar 10,28 persen dibandingkan IHP pada triwulan III-2016 sebesar 88,20 (*q-to-q*). Inflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh naiknya Subsektor Pertambangan sebesar 14,27 persen. Sedangkan Subsektor Penggalian mengalami penurunan sebesar 2,08 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Demikian pula terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*), IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian triwulan IV-2016 mengalami kenaikan sebesar 18,32 persen, yaitu dari 82,20 pada triwulan IV-2015 menjadi 97,26 pada triwulan IV-2016. Inflasi harga produsen (*y-on-y*) pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh naiknya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 24,93 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan IV-2016, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 137,76 pada triwulan III-2016 menjadi 138,92 pada triwulan IV-2016 (*q-to-q*). Tiga subsektor pada Sektor Industri Pengolahan yang mengalami inflasi tinggi adalah Subsektor Industri Karet, Plastik dan hasil-hasilnya (2,35 persen); Subsektor Industri Pupuk (2,26 persen); dan Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan (2,17 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi antara lain Subsektor

Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki (0,70 persen) dan Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (0,09 persen). Dibandingkan triwulan IV-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan IV-2016 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (2,18 persen) dari 135,95 menjadi 138,92. Penyebab kenaikan IHP terutama terjadi pada Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (9,06 persen); Subsektor Industri Minuman dan Rokok (5,41 persen); dan Subsektor Industri Makanan Lainnya (4,01 persen). Sedangkan untuk subsektor yang mengalami deflasi adalah Subsektor Industri Pupuk (6,08 persen); Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas (1,67 persen); dan Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (0,70 persen).

4. Sektor Pengadaan listrik dan Gas

IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada triwulan IV-2016 (*q-to-q*) sebesar 132,15 mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen terhadap triwulan III-2016 yang sebesar 131,93. Inflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh naiknya Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 0,19 persen. Sedangkan terhadap triwulan IV-2015, IHP Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami deflasi sebesar 0,36 persen, yaitu dari 132,63 pada triwulan IV-2015 menjadi 132,15 pada triwulan IV-2016 (*y-on-y*). Deflasi Harga Produsen terjadi di Subsektor Ketenagalistrikan dan Subsektor Pengadaan Gas masing-masing sebesar 0,35 persen dan 0,46 persen.

5. Sektor Pengelolaan Air

IHP Sektor Pengelolaan Air pada Triwulan IV-2016 sebesar 118,92 mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen terhadap triwulan III-2016 yaitu sebesar 118,91 (*q-to-q*). Demikian juga terhadap triwulan IV-2015 naik 0,10 persen yaitu dari 118,80 di triwulan IV-2015 menjadi 118,92 di triwulan IV-2016 (*y-on-y*).

6. Sektor Angkutan Penumpang

IHP Sektor Angkutan penumpang pada triwulan IV-2016 sebesar 218,09 mengalami deflasi sebesar 1,65 persen dibandingkan IHP triwulan sebelumnya yang sebesar 221,75 (*q-to-q*). Deflasi Harga Produsen pada sektor ini disebabkan oleh turunnya IHP pada semua Subsektor yaitu Subsektor Angkutan Kereta Api Penumpang (2,78 persen), Subsektor Angkutan Darat Penumpang (1,75 persen), Subsektor Angkutan Laut Penumpang (2,11 persen), Subsektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang (4,42 persen) dan Subsektor Angkutan Udara Penumpang (1,44 persen). IHP Sektor Angkutan penumpang triwulan IV-

2016 terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) naik sebesar 3,05 persen, yaitu dari 211,65 menjadi 218,09. Hal ini diakibatkan terutama oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Angkutan Udara Penumpang (5,04 persen), Subsektor Angkutan Kereta Api Penumpang (3,35 persen), dan Subsektor Angkutan Laut Penumpang (0,71 persen).

7. Sektor Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan IV-2016 sebesar 125,34 mengalami kenaikan 0,06 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 125,26 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan IHP Subsektor Akomodasi sebesar 0,49 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan IV-2016 terhadap triwulan IV-2015 (*y-on-y*) naik sebesar 0,93 persen, yaitu dari 124,18 menjadi 125,34. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Akomodasi dan Subsektor Makanan dan Minuman masing-masing sebesar 1,36 persen dan 0,87 persen.

Tabel 8.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor
Triwulan IV-2016

Sektor/Subsektor	IHP Triw IV- 2015	IHP Triw III- 2016	IHP Triw IV- 2016	Inflasi Harga Produsen ($q-to-q$) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen ($y-on-y$) ²⁾ (%)	
				Triw III- 2016	Triw IV- 2016	Triw IV- 2015	Triw IV- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	132,69	132,54	134,13	1,06	1,20	4,45	1,08
1. Tanaman Bahan Makanan	144,82	138,68	140,40	1,07	1,24	7,31	-3,05
2. Perkebunan	115,18	120,33	124,21	0,22	3,22	-3,59	7,84
3. Peternakan	125,89	131,36	131,30	1,75	-0,05	4,93	4,30
4. Perikanan	126,54	128,86	129,63	1,23	0,60	4,02	2,44
5. Kehutanan	140,45	144,93	144,71	1,06	-0,15	7,27	3,04
Pertambangan dan Penggalian	82,20	88,20	97,26	3,97	10,28	-17,75	18,32
1. Pertambangan	72,41	79,17	90,46	5,24	14,27	-23,38	24,93
2. Penggalian	134,49	136,44	133,60	0,23	-2,08	4,29	-0,67
Industri Pengolahan	135,95	137,76	138,92	0,49	0,84	4,07	2,18
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	141,29	151,37	154,10	1,10	1,80	6,65	9,06
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	116,33	116,58	117,14	0,08	0,47	4,34	0,69
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	150,43	150,56	151,10	1,00	0,35	10,34	0,45
4. Industri Makanan Lainnya	130,34	134,72	135,56	1,15	0,62	4,43	4,01
5. Industri Minuman dan Rokok	137,21	143,41	144,62	0,93	0,84	5,56	5,41
6. Industri Pemintalan dan Pertenunan Tekstil	131,07	134,73	135,29	1,10	0,42	5,81	3,23
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	152,88	156,27	155,18	1,08	-0,70	4,51	1,50
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	159,06	157,83	158,87	0,08	0,66	3,15	-0,12
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	132,90	131,86	134,72	1,44	2,17	1,37	1,37
10. Industri Pupuk	130,58	119,93	122,64	1,27	2,26	1,51	-6,08
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	144,65	143,77	143,64	-0,16	-0,09	3,81	-0,70
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	127,09	123,62	124,96	-0,74	1,09	-2,39	-1,67
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	114,16	114,78	117,47	-0,33	2,35	0,87	2,90
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	141,15	141,99	143,31	-0,17	0,93	0,22	1,53
15. Industri Logam Dasar	111,10	110,41	111,14	0,40	0,66	-1,22	0,04
16. Industri Barang-Barang dari Logam	119,00	119,07	120,56	-0,78	1,25	2,19	1,30
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	137,63	138,80	140,39	0,31	1,15	4,85	2,01
18. Industri Alat Angkutan	130,86	133,02	133,12	0,75	0,08	3,40	1,73
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	147,71	148,81	148,95	0,20	0,10	4,96	0,84
Pengadaan Listrik dan Gas	132,63	131,93	132,15	1,01	0,17	0,06	-0,36
1. Ketenagalistrikan	127,44	126,75	126,99	1,15	0,19	-0,41	-0,35
2. Pengadaan Gas	192,84	191,96	191,96	0,00	0,00	3,79	-0,46

Sektor/Subsektor	IHP Triw IV- 2015	IHP Triw III- 2016	IHP Triw IV- 2016	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹⁾ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ²⁾ (%)	
				Triw III- 2016	Triw IV- 2016	Triw IV- 2015	Triw IV- 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Air	118,80	118,91	118,92	0,00	0,01	0,03	0,10
Angkutan Penumpang	211,65	221,75	218,09	4,38	-1,65	7,10	3,05
1. Angkutan Kereta Api Penumpang	181,10	192,52	187,16	5,94	-2,78	5,68	3,35
2. Angkutan Darat Penumpang	151,86	154,95	152,23	2,47	-1,75	8,96	0,24
3. Angkutan Laut Penumpang	109,43	112,58	110,20	3,06	-2,11	0,00	0,71
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Penumpang	159,33	164,19	156,93	4,28	-4,42	2,61	-1,50
5. Angkutan Udara Penumpang	299,66	319,36	314,76	5,56	-1,44	6,42	5,04
Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	124,18	125,26	125,34	0,35	0,06	1,01	0,93
1. Akomodasi	139,21	140,41	141,11	0,48	0,49	0,67	1,36
2. Makanan dan Minuman	121,98	123,04	123,04	0,32	0,00	1,07	0,87

Keterangan: 1) Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t terhadap Triwulan t-1

2) Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP Triwulan t-2016 terhadap Triwulan t-2015

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

- Pada Februari 2017, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Kelompok Barang Impor Nonmigas yaitu 0,43 persen dan terendah terjadi pada Sektor Pertanian yaitu 0,07 persen. Sektor Industri dan Kelompok Barang Ekspor Nonmigas naik masing-masing sebesar 0,23 persen dan 0,26 persen sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 1,58 persen.

Pada Februari 2017 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,17 persen

Pada Januari 2017 IHPB Umum naik sebesar 0,74 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Industri sebesar 0,99 persen dan kenaikan terendah pada Kelompok Barang Impor sebesar 0,33 persen. Sektor Pertanian dan Kelompok Barang Ekspor naik masing-masing sebesar 0,84 persen dan 0,47 persen sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 0,12 persen.

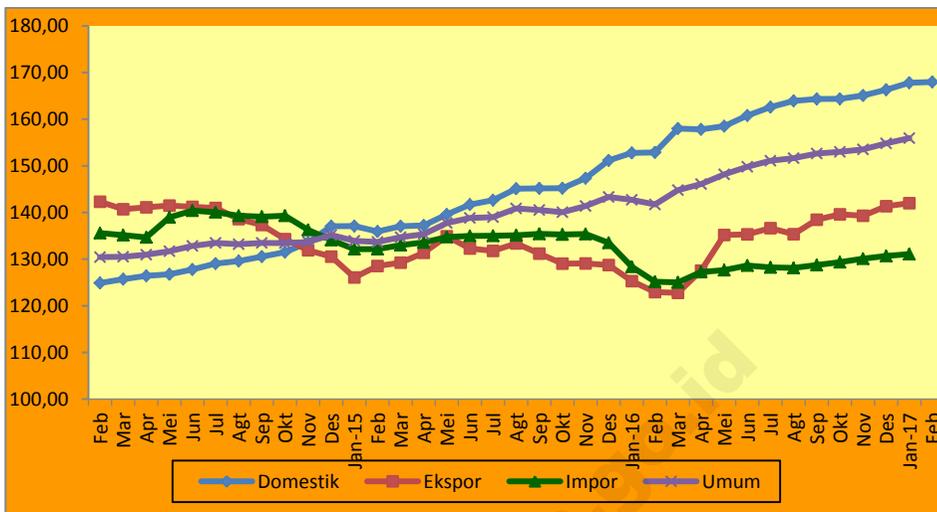
Tabel 8.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Desember 2016–Februari 2017, (2010=100)

Sektor/Kelompok	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Perubahan	
				Januari 2017 terhadap Desember 2016 (%)	Februari 2017 terhadap Januari 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	383,96	387,21	387,49	0,84	0,07
2. Pertambangan dan Penggalan	120,32	120,17	118,27	-0,12	-1,58
3. Industri	136,93	138,29	138,60	0,99	0,23
Domestik	166,31	167,81	167,99	0,90	0,11
4. Impor Nonmigas	136,82	137,34	137,93	0,38	0,43
Impor	130,66	131,09		0,33	
5. Ekspor Nonmigas	148,94	149,85	150,25	0,62	0,26
Ekspor	141,33	141,99		0,47	
Umum Nonmigas	158,78	160,03	160,31	0,79	0,17
Umum	154,81	155,95		0,74	

Tabel 8.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar Februari 2017 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan Februari 2017 terhadap Januari 2017	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	Februari 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	316,03	383,96	387,21	387,49	0,07	0,92	22,61
2. Pertambangan dan Penggalan	118,50	120,32	120,17	118,27	-1,58	-1,70	-0,19
3. Industri	130,85	136,93	138,29	138,60	0,23	1,22	5,93
4. Impor Nonmigas	133,21	136,82	137,34	137,93	0,43	0,81	3,54
5. Ekspor Nonmigas	139,37	148,94	149,85	150,25	0,26	0,88	7,80
Umum Nonmigas	147,52	158,78	160,03	160,31	0,17	0,96	8,67

Grafik 8.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
Februari 2014–Februari 2017



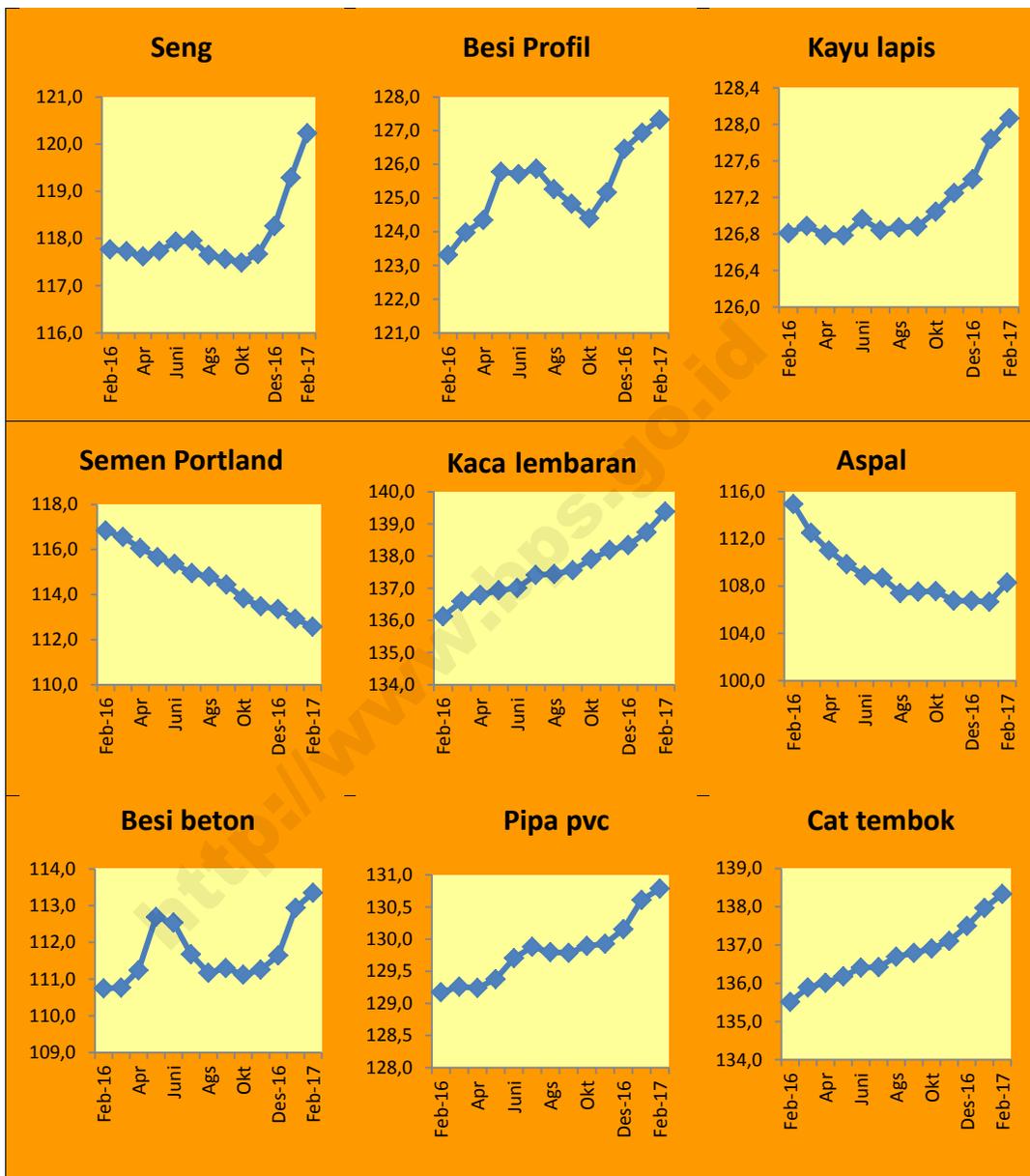
- IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada Februari 2017 naik sebesar 0,43 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada jenis Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,55 persen.

Tabel 8.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia Februari 2017
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	Februari 2016	Desember 2016	Januari 2017	Februari 2017	Perubahan Februari 2017 terhadap Januari 2017	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2017	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	131,60	132,97	133,46	134,20	0,55	0,92	1,98
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	128,36	130,11	130,66	131,07	0,31	0,74	2,11
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	124,87	125,95	126,60	127,18	0,46	0,98	1,85
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	129,83	131,11	131,39	131,67	0,21	0,43	1,42
Bangunan Lainnya	127,69	128,78	128,97	129,17	0,15	0,30	1,15
Konstruksi Indonesia	129,34	130,64	131,12	131,68	0,43	0,80	1,81

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (aspal, seng lembaran, kayu lapis, pipa pvc, cat tembok, kaca lembaran, besi profil, dan besi beton) pada Februari 2017 naik dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada aspal sebesar 1,53 persen dan terkecil terjadi pada pipa pvc sebesar 0,13 persen. Seng lembaran naik 0,79 persen, kayu lapis naik 0,18 persen, cat tembok naik 0,27 persen, kaca lembaran naik 0,46 persen, besi profil naik 0,30 persen, dan besi beton naik 0,36 persen. Semen turun sebesar 0,31 persen.

Grafik 8.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan Februari 2016–Februari 2017



IX. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULAN IV-2016

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN IV-2016

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB triwulan IV-2016 sebesar 106,70. Namun, optimisme pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan IV-2016 lebih rendah dibandingkan dengan optimisme pada triwulan sebelumnya (nilai ITB triwulan III-2016 sebesar 107,89).
2. Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan IV-2016 terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan (nilai ITB sebesar 97,57). Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan kondisi bisnis tertinggi adalah Jasa Pendidikan (nilai ITB sebesar 112,17), diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (nilai ITB sebesar 111,93), dan Pengadaan Listrik dan Gas (nilai ITB sebesar 111,69).
3. Kondisi bisnis pada triwulan IV-2016 meningkat karena adanya peningkatan pada semua variabel pembentuk indeks, yaitu pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 108,58), rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 105,96), dan penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 104,75).

Kondisi bisnis triwulan IV-2016 meningkat (ITB 106,70) namun optimismenya menurun dibandingkan triwulan III-2016

Tabel 9.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan IV-2016
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan IV-2016			ITB Triwulan IV-2016
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	97,57	-	97,57
2. Pertambangan dan Penggalian	101,83	101,20	100,61	101,17
3. Industri Pengolahan	103,10	101,62	102,44	102,53
4. Pengadaan Listrik dan Gas	117,31	119,23	103,85	111,69
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	111,11	105,56	109,26	109,25
6. Konstruksi	107,88	105,97	106,68	106,99
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	109,73	104,41	106,16	107,15
8. Transportasi dan Pergudangan	116,08	108,24	106,27	110,26
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,15	109,57	106,12	111,57
10. Informasi dan Komunikasi	110,56	114,69	104,90	108,82
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	107,34	105,04	113,90	109,82
12. Real Estat	109,76	108,54	109,76	109,53
13. Jasa Perusahaan	111,21	106,54	106,54	108,27
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	113,04	117,39	108,70	111,93
15. Jasa Pendidikan	105,51	107,09	119,84	112,17
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112,16	120,27	105,41	110,68
17. Jasa Lainnya	112,09	107,69	110,99	110,78
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	108,58	104,75	105,96	106,70

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN I-2017

1. Selain pada triwulan berjalan, indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan I-2017 diprediksi sebesar 105,81, artinya secara umum kondisi bisnis pada triwulan I-2017 diperkirakan akan meningkat

Kondisi bisnis pada triwulan I-2017 diprediksi meningkat (ITB 105,81). Namun optimismenya menurun dibanding triwulan IV-2016

dibandingkan triwulan IV-2016. Namun, tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan I-2017 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan optimisme pada triwulan IV-2016 (nilai ITB triwulan IV-2016 sebesar 106,70). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan I-2017 terjadi di semua lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang relatif stagnan (nilai ITB sebesar 100,94). Lapangan usaha Real Estat diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai Indeks sebesar 111,20.

Tabel 9.2
Perkiraan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2017
Menurut Lapangan Usaha dan Variabel Pembentuk

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan I-2017				Perkiraan ITB Triwulan I-2017
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,93	100,47	112,99	-	108,53
2. Pertambangan dan Penggalian	100,00	93,60	104,88	102,80	100,94
3. Industri Pengolahan	107,30	102,44	109,65	103,44	105,59
4. Pengadaan Listrik dan Gas	107,84	-	111,54	106,00	107,89
5. Pengadaan Air	116,67	-	109,26	101,79	108,61
6. Konstruksi	103,10	-	114,32	97,85	103,39
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	107,00	104,35	110,53	107,25	107,35
8. Transportasi dan Pergudangan	118,82	-	93,73	-	108,89
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,12	-	109,04	-	107,28
10. Informasi dan Komunikasi	109,09	-	106,99	-	108,26
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	120,08	-	94,55	-	109,97
12. Real Estat	109,76	-	113,41	-	111,20
13. Jasa Perusahaan	113,08	-	106,54	-	110,49
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	104,35	-	104,35	-	104,35
15. Jasa Pendidikan	101,57	-	107,94	-	104,09
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	116,22	-	101,35	-	110,33
17. Jasa Lainnya	108,79	-	103,30	-	106,62
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	108,51	101,95	108,52	103,86	105,81

Grafik 9.1
Indeks Tendensi Bisnis¹⁾ Triwulan IV-2011–Triwulan IV-2016 dan
Perkiraan Triwulan I-2017²⁾



Keterangan:

- ¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
- a. Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
 - b. Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
 - c. Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.
- ²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan I-2017.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN IV-2016

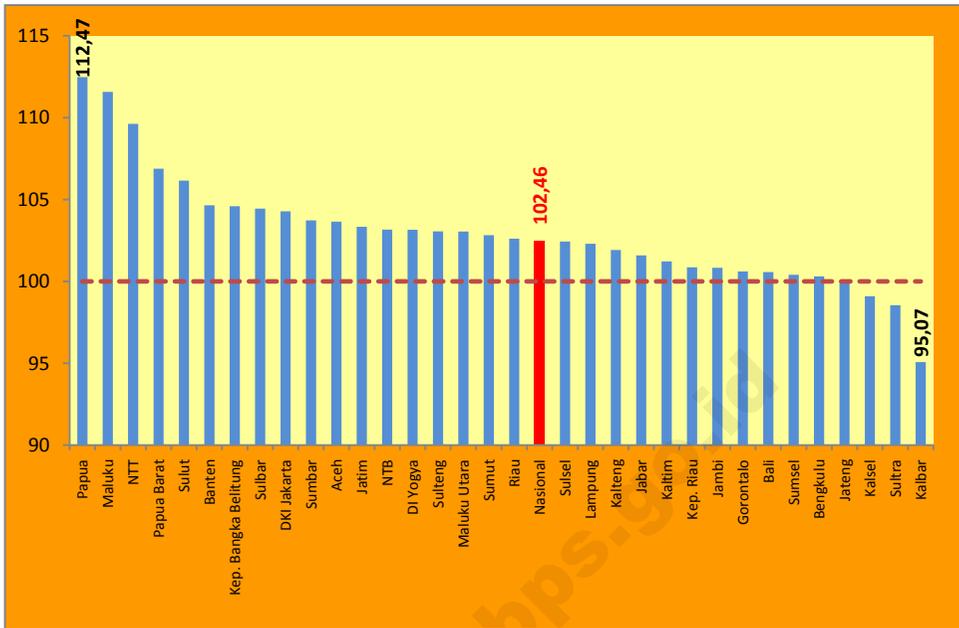
1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2016 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun tingkat optimisme konsumen pada triwulan IV-2016 menurun dibandingkan dengan optimisme pada triwulan III-2016. Nilai ITK triwulan IV-2016 sebesar 102,46. Sedangkan, nilai ITK triwulan III-2016 sebesar 108,22. Membaiknya kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2016 terutama didorong oleh naiknya pendapatan rumah tangga (nilai indeks sebesar 103,89), diikuti oleh naiknya volume konsumsi (nilai indeks sebesar 103,81). Sedangkan, daya beli yang dilihat dari indeks pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi mengalami penurunan (nilai indeks sebesar 98,72).
2. Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 23 provinsi di Indonesia. Provinsi yang memiliki nilai ITK triwulan IV-2016 tertinggi adalah Papua (nilai ITK sebesar 112,47). Sementara Provinsi Kalimantan Barat tercatat memiliki nilai ITK triwulan IV-2016 terendah (nilai ITK sebesar 95,07).

Kondisi ekonomi konsumen triwulan IV-2016 meningkat (ITK 102,46), namun optimismenya menurun dibandingkan triwulan III-2016

Tabel 9.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan III-2016 dan Triwulan IV-2016
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw III-2016	ITK Triw IV-2016
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	110,01	103,89
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	102,65	98,72
Volume konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	111,03	103,81
Indeks Tendensi Konsumen	108,22	102,46

Grafik 9.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2016
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN I-2017

1. Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2017 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan IV-2016. Tingkat optimisme konsumen pada triwulan I-2017 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan IV-2016. Perkiraan nilai ITK triwulan I-2017 sebesar 106,30. Sedangkan, nilai ITK triwulan IV-2016 sebesar 102,46.

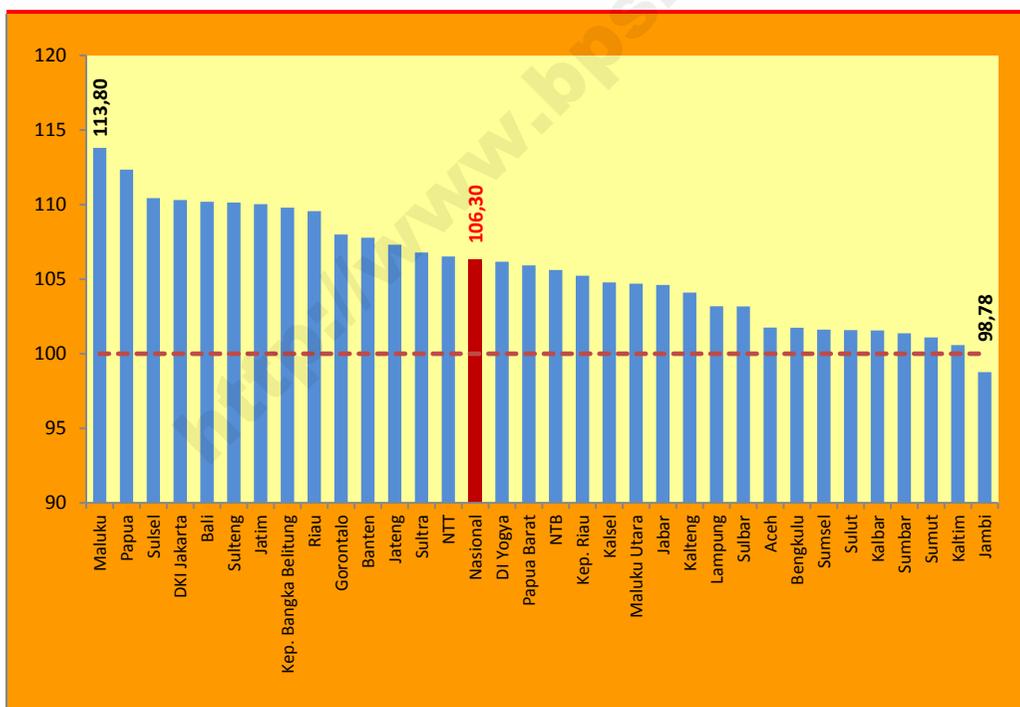
Kondisi ekonomi dan optimisme konsumen triwulan I-2017 diprediksi meningkat (ITK 106,30) dibanding triwulan IV-2016

2. Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi pada 31 provinsi di Indonesia, dengan 14 provinsi (42,42 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks di atas nasional. Provinsi yang memiliki nilai perkiraan ITK tertinggi adalah Provinsi Maluku (nilai ITK sebesar 113,80), sementara Provinsi Jambi memiliki nilai perkiraan ITK terendah (nilai ITK sebesar 98,78). Kondisi ekonomi konsumen di Provinsi Kalimantan Timur diprediksi cenderung stagnan (nilai ITK sebesar 100,58).

Tabel 9.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw I-2017
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	106,16
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	106,56
Indeks Tendensi Konsumen	106,30

Grafik 9.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2017
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 9.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan IV-2015–Triwulan IV-2016 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen²⁾ Triwulan I-2017 Tingkat Nasional dan Provinsi

	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		IV-2015	I-2016	II-2016	III-2016	IV-2016	I-2017 ²⁾
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	102,21	100,99	113,04	106,73	103,65	101,75
2.	Sumatera Utara	102,52	100,55	105,65	106,36	102,83	101,09
3.	Sumatera Barat	99,10	101,85	109,04	109,53	103,73	101,38
4.	R i a u	94,27	95,99	109,81	106,03	102,61	109,57
5.	J a m b i	100,94	100,53	106,97	114,22	100,83	98,78
6.	Sumatera Selatan	100,35	96,44	108,05	110,85	100,40	101,62
7.	Bengkulu	101,20	100,57	106,01	109,22	100,30	101,75
8.	Lampung	101,19	101,55	106,42	102,12	102,29	103,19
9.	Kep. Bangka Belitung	93,91	94,71	104,74	112,38	104,59	109,79
10.	Kep. R i a u	100,68	101,56	113,34	104,32	100,86	105,24
11.	DKI Jakarta	106,64	105,20	110,71	108,79	104,28	110,31
12.	Jawa Barat	102,38	104,03	107,28	108,27	101,59	104,62
13.	Jawa Tengah	99,87	100,28	106,66	109,16	99,93	107,31
14.	D.I. Yogyakarta	103,02	107,96	108,98	115,02	103,15	106,17
15.	Jawa Timur	102,12	105,38	108,42	108,23	103,34	110,03
16.	Banten	103,29	105,25	109,97	110,01	104,65	107,78
17.	B a l i	105,84	108,40	108,78	109,98	100,57	110,19
18.	Nusa Tenggara Barat	106,47	108,20	107,50	114,81	103,16	105,62
19.	Nusa Tenggara Timur	106,32	98,15	103,87	106,14	109,62	106,52
20.	Kalimantan Barat	104,07	104,15	105,80	103,71	95,07	101,57
21.	Kalimantan Tengah	104,74	103,04	106,22	101,13	101,92	104,10
22.	Kalimantan Selatan	101,51	99,34	103,00	100,21	99,09	104,78
23.	Kalimantan Timur	105,90	102,40	112,69	105,79	101,23	100,58
24.	Sulawesi Utara	108,42	96,08	102,14	103,46	106,15	101,59
25.	Sulawesi Tengah	103,85	107,58	105,34	104,50	103,06	110,14
26.	Sulawesi Selatan	102,68	101,91	106,83	107,09	102,43	110,44
27.	Sulawesi Tenggara	106,06	100,57	104,65	109,25	98,54	106,79
28.	Gorontalo	101,40	101,14	109,53	107,89	100,60	107,99
29.	Sulawesi Barat	109,15	105,58	110,20	111,00	104,44	103,18
30.	Maluku	112,03	109,96	113,17	110,89	111,57	113,80
31.	Maluku Utara	99,14	100,45	109,30	100,87	103,05	104,70
32.	Papua Barat	110,22	98,53	107,81	110,17	106,88	105,92
33.	Papua	111,72	99,78	109,20	112,09	112,47	112,34
	Indonesia	102,77	102,89	107,93	108,22	102,46	106,30

Keterangan:

¹⁾ ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
- b. Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
- c. Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

²⁾ Angka perkiraan ITK triwulan I-2017

X. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN IV-2016

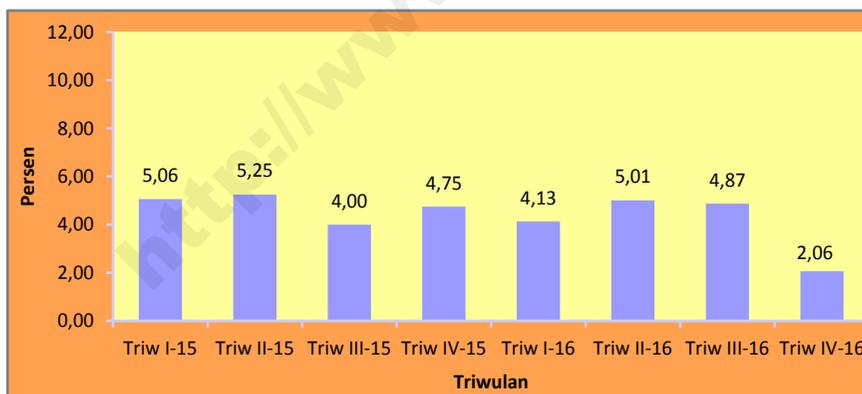
A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan IV-2016 naik sebesar 2,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2015, triwulan III-2016 naik sebesar 4,87 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2015, triwulan II-2016 naik sebesar 5,01 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2015, triwulan I-2016 naik sebesar 4,13 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 4,75 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2014, triwulan III-2015 naik sebesar 4,00 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2014, triwulan II-2015 naik sebesar 5,25 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2014, dan triwulan I-2015 naik sebesar 5,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan IV-2016 naik sebesar 2,06 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2015

Grafik 10.1

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan I-2015–Triwulan IV-2016



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan IV-2016 turun sebesar 0,34 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2016, triwulan III-2016 naik sebesar 0,70 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2016, triwulan II-2016 naik sebesar 3,02 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2016, triwulan I-2016 turun sebesar 1,29 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2015, triwulan IV-2015 naik sebesar 2,41 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2015, triwulan III-2015 naik sebesar 0,83 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2015, dan triwulan II-2015 naik sebesar 2,16 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2015.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan IV-2016 (*y-on-y*) adalah industri makanan yang naik 8,29 persen, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik sebesar 7,07 persen, serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik 5,58 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan IV-2016 (*q-to-q*) adalah industri karet, barang dari karet dan plastik naik 4,76 persen, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki naik 3,59 persen, dan industri logam dasar naik 3,54 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS (*m-to-m*) Oktober 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen dan Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,08 persen. Sementara pada November 2016 mengalami penurunan sebesar 0,01 persen.

Tabel 10.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2014–2016 (persen)
(2010=100)

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	-0,25	1,97	2,04	1,68	3,51	4,19	4,53	5,53	4,76
2015	-0,70	2,16	0,83	2,41	5,06	5,25	4,00	4,75	4,76
2016	-1,29	3,02	0,70	-0,34	4,13	5,01	4,87	2,06	4,00

Tabel 10.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2014–2016 (persen)
(2010=100)

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	2,99	5,12	2,57	-0,03	-1,29	-0,27
Februari	3,82	2,63	7,38	-0,61	-2,97	1,58
Maret	3,74	7,42	2,55	0,17	4,84	0,13
April	2,74	8,41	0,13	0,39	1,31	-1,08
Mei	3,79	2,39	7,04	2,48	-3,21	3,47
Juni	6,07	5,02	7,96	0,05	2,62	3,50
Juli	1,54	4,41	8,77	-2,64	-3,20	-2,47
Agustus	5,96	5,73	6,07	2,63	3,93	1,35
September	9,77	2,01	0,05	6,34	2,60	-3,23
Oktober	5,35	6,20	0,10 ^{*)}	-2,64	1,35	1,40 ^{*)}
November	4,76	6,60	1,86 ^{**)}	-2,12	-1,74	-0,01 ^{**)*)}
Desember	6,47	1,52	4,30 ^{***)}	2,64	-2,26	0,08 ^{***)}

Catatan:

- *) Angka Sementara
- **) Angka Sangat Sementara
- ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 10.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan IV-2016
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	-3,63	8,29
11	Minuman	0,76	-0,89
12	Pengolahan Tembakau	2,93	-4,28
13	Tekstil	1,95	-7,91
14	Pakaian Jadi	0,18	-2,37
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	3,59	5,58
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	-2,91	-4,12
17	Kertas dan Barang dari Kertas	-4,12	-2,11
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2,57	0,53
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	2,29	7,07
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	-2,71	3,13
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4,76	-5,47
23	Barang Galian Bukan Logam	0,47	3,20
24	Logam Dasar	3,54	-1,89
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,24	-3,44
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	-0,35	-0,30
27	Peralatan Listrik	-1,91	-3,38
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	-5,80	-3,37
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	2,93	-1,90
30	Alat Angkutan Lainnya	-1,32	-0,09
31	Furnitur	-0,91	0,35
32	Pengolahan Lainnya	-1,43	-6,47
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,05	-5,37
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		-0,34	2,06

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan IV-2016 naik sebesar 4,88 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2015, triwulan III-2016 naik sebesar 5,75 persen dari triwulan III-2015, triwulan II-2016 naik sebesar 6,56 persen dari triwulan II-2015, dan triwulan I-2016 naik sebesar 5,91 persen dari triwulan I-2015.

Pertumbuhan produksi IMK triwulan IV-2016 naik 4,88 persen dari triwulan IV-2015

Grafik 10.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (*y-on-y*)
Triwulan IV-2014–Triwulan IV-2016



2. Pertumbuhan Produksi IMK triwulan IV-2016 naik 0,51 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2016, triwulan III-2016 turun 2,06 persen dari triwulan II-2016, triwulan II-2016 naik 5,74 persen dari triwulan I-2016, dan triwulan I-2016 naik 0,76 persen dari triwulan IV-2015.
3. Pertumbuhan Produksi IMK tahun 2016 naik 5,78 persen dari tahun 2015, tahun 2015 naik 5,71 persen dari tahun 2014, dan tahun 2014 naik 4,91 persen dari tahun 2013.
4. Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan IV-2016 (*y-on-y*) adalah industri komputer, barang elektronika dan optik naik 43,71 persen, industry mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya) naik 25,98 persen, serta industri kertas dan barang dari kertas naik 25,49 persen.

Tabel 10.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2014–Triwulan IV-2016 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64	5,09	-1,31	1,35	5,65	4,57	6,87	5,79	5,71
2016	0,76	5,74	-2,06	0,51	5,91	6,56	5,75	4,88	5,78

Tabel 10.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan IV-2016
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan		Tahun 2016
		Triwulan IV		
		q-to-q	y-on-y	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Makanan	0,65	7,73	7,52
11	Minuman	-1,52	10,87	11,66
12	Pengolahan tembakau	-27,91	-15,62	5,33
13	Tekstil	-2,57	10,07	9,71
14	Pakaian jadi	0,62	6,50	6,99
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	5,53	2,76	5,22
16	Kayu, barang-barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	3,85	7,86	3,59
17	Kertas dan barang dari kertas	6,12	25,49	16,83
18	Percetakan & reproduksi media rekaman	4,65	21,98	21,79
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	0,44	11,53	15,06
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	-12,57	0,50	11,05
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-2,30	-4,90	-3,01
23	Barang galian bukan logam	-1,47	-0,31	1,14
24	Logam dasar	-8,61	-1,15	2,74
25	Brg logam bukan mesin & peralatannya	1,83	-10,67	-11,97
26	Komputer, barang elektronik dan optik	13,56	43,71	31,18
27	Peralatan listrik	-15,56	-10,73	7,47
28	Mesin dan perlengkapan YTDL (yang tidak termasuk dalam lainnya)	12,82	25,98	19,28
29	Kendaraan bermotor, trailer & semi trailer	1,23	6,65	8,58
30	Alat angkut lainnya	-0,65	10,90	12,27
31	Furnitur	1,43	4,39	1,73
32	Pengolahan lainnya	0,84	1,63	-0,65
33	Jasa reparasi & pemasangan mesin	-4,06	-11,82	-10,22
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		0,51	4,88	5,78

XI. PARIWISATA JANUARI 2017

A. Kunjungan Wisman

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari 2017 mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 26,58 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada bulan yang sama tahun 2016, yang tercatat sebanyak 814,30 ribu kunjungan. Sementara itu jika dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman bulan Januari 2017 mengalami penurunan sebesar 7,42 persen.

Jumlah kunjungan wisman selama Januari 2017 mencapai 1,03 juta kunjungan atau naik 26,58 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada bulan yang sama tahun 2016

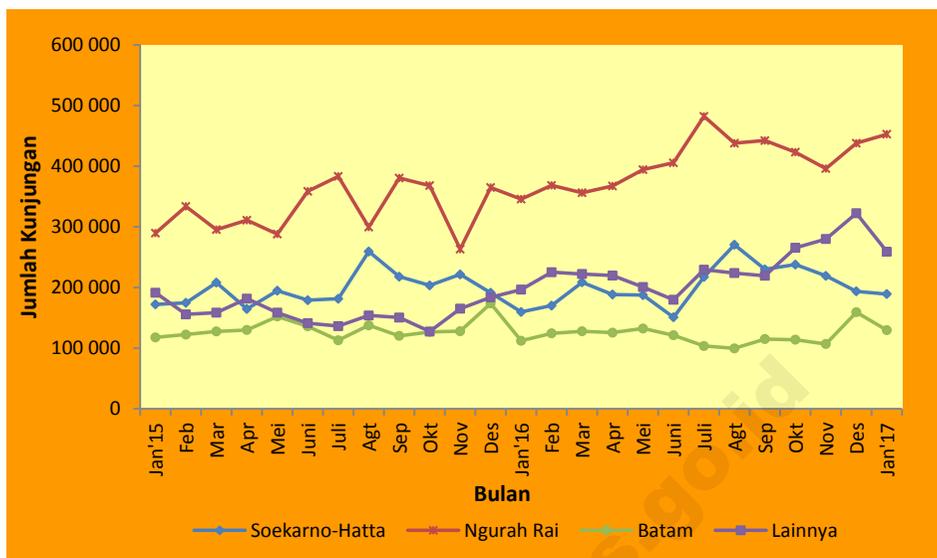
Tabel 11.1
Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia

Jenis Pengunjung	Jan 2016 (kunjungan)	Des 2016 (kunjungan)	Jan 2017* (kunjungan)	Perubahan Jan 2017 thd 2016 (%)	Perubahan Jan 2017 thd Des 2016 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1. Wisman melalui 19 Pintu Utama	736 049	978 699	930 934	26,48	-4,88
a. Wisman Reguler	698 057	957 828	900 793	29,04	-5,95
b. Wisman Khusus (wisman lansia, rohaniawan, diklat, riset, dll)	37 992	20 871	30 141	-20,66	44,42
2. Wisman Diluar 19 Pintu Utama	78 254	134 629	99 814	27,55	-25,86
a. Pos Lintas Batas (PLB)	35 741	56 845	43 029	20,39	-24,30
b. Pintu Lainnya	42 513	77 784	56 785	33,57	-27,00
Jumlah	814 303	1 113 328	1 030 748	26,58	-7,42

*)Angka sementara

2. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Januari 2017 mengalami kenaikan sebesar 31,72 persen dibandingkan Januari 2016, yaitu dari 343,66 ribu kunjungan menjadi 452,66 ribu kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali juga mengalami kenaikan sebesar 3,36 persen.

Grafik 11.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk
Januari 2015–Januari 2017



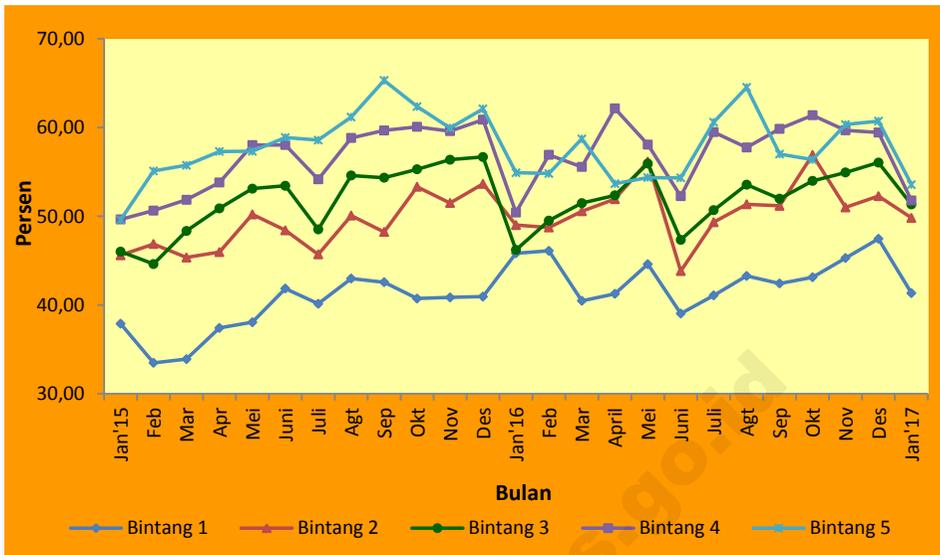
3. Dari sekitar 1,03 juta kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Januari 2017, sebanyak 20,27 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Tionghoa, diikuti oleh wisman Singapura (11,82 persen), Australia (10,21 persen), Malaysia (9,86 persen), dan India (3,91 persen).

B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Januari 2017 mencapai 50,92 persen, yang berarti terjadi kenaikan 1,59 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada bulan yang sama tahun 2016. Namun jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Januari 2017 mengalami penurunan sebesar 5,58 poin.

TPK hotel berbintang Januari 2017 mencapai 50,92 persen atau naik 1,59 poin dibanding TPK Januari 2016

Grafik 11.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Januari 2015–Januari 2017



- Angka TPK menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.
- TPK hotel berbintang di Bali pada Januari 2017 sebesar 59,61 persen, atau naik sebesar 5,23 poin dibandingkan TPK Januari 2016. Namun jika dibandingkan dengan Desember 2016, TPK Januari 2017 di Bali mengalami penurunan sebesar 0,47 poin.
- Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Januari 2017 mencapai 1,94 hari, atau mengalami kenaikan 0,11 hari dibandingkan rata-rata lama menginap selama Januari 2016. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Januari 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin.

Tabel 11.2
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Januari 2016–Januari 2017

Bulan/ Tahun	Wisman		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov.		TPK Bali		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata (%)	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2016	11 519 275	10,69	4 852 634	23,29	53,74	0,70	61,63	1,08	1,80	-0,18
Januari	814 303	-16,21	343 663	-5,53	49,33	-7,92	54,38	-5,94	1,83	0,00
Februari	888 309	9,09	367 024	6,80	52,15	2,82	62,46	8,08	1,83	0,00
Maret	915 019	3,01	354 778	-3,34	52,88	0,73	58,56	-3,90	1,81	-0,02
April	901 095	-1,52	367 370	3,55	54,38	1,50	55,08	-3,48	1,88	0,07
Mei	915 206	1,57	394 443	7,37	55,46	1,08	60,06	4,96	1,75	-0,13
Juni	857 651	-6,29	405 686	2,85	48,63	-6,83	56,77	-5,51	1,84	0,09
Juli	1 032 741	20,42	482 201	18,86	53,77	5,14	70,62	13,85	1,81	-0,03
Agustus	1 031 986	-0,07	437 929	-9,18	55,21	1,44	72,40	1,78	1,80	-0,01
September	1 006 653	-2,45	442 304	1,00	54,16	-1,05	68,26	-4,14	1,90	0,10
Oktober	1 040 651	3,38	423 140	-4,33	56,13	1,97	62,19	-6,07	1,81	-0,09
November	1 002 333	-3,68	396 150	-6,38	55,76	-0,37	59,71	-2,48	1,72	-0,09
Desember	1 113 328	11,07	437 946	10,55	56,50	0,74	60,08	0,37	1,70	-0,02
2017	1 030 748	26,58	452 660	31,72	50,92	1,59	59,61	5,23	1,94	0,11
Januari	1 030 748	-7,42	452 660	3,36	50,92	-5,58	59,61	-0,47	1,94	0,24

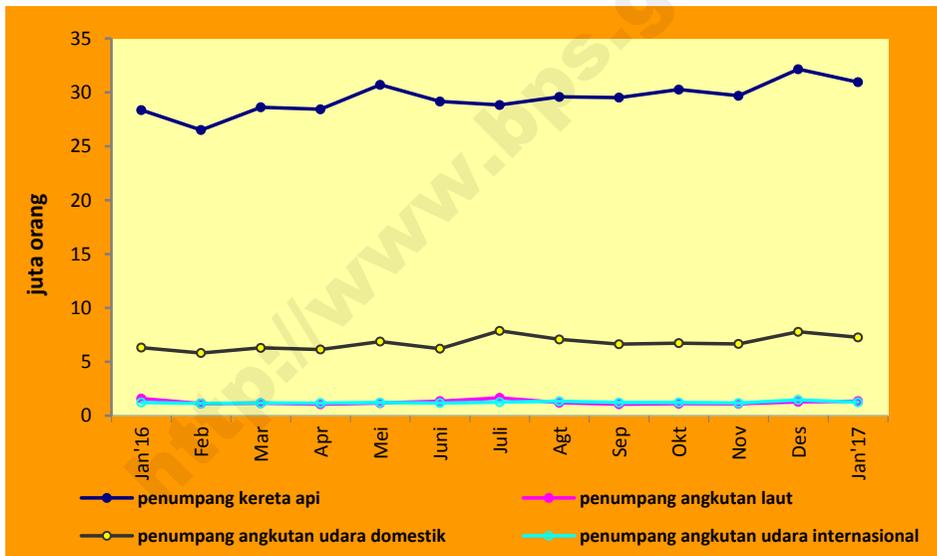
XII. TRANSPORTASI NASIONAL JANUARI 2017

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Januari 2017 mencapai 7,3 juta orang atau turun 6,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 15,04 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari 2017 mencapai 7,3 juta orang, turun 6,63 persen

Grafik 12.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi Januari 2016–Januari 2017



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Januari 2017 mencapai 1,3 juta orang atau turun 8,14 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 9,29 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Januari 2017 mencapai 1,3 juta orang atau turun 2,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 21,47 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Januari 2017 mencapai 21,4 juta ton atau turun 4,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 6,00 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Januari 2017 mencapai 1,3 juta orang, turun 2,69 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Januari 2017 mencapai 30,9 juta orang atau turun 3,74 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 9,14 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Januari 2017 mencapai 3,3 juta ton atau turun 0,30 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun naik 12,34 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2016.

Jumlah penumpang kereta api Januari 2017 mencapai 30,9 juta orang, turun 3,74 persen

Tabel 12.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Januari 2016–Januari 2017

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2016	80 449,9	-	14 772,4	-	14 907,8	-	258 245,2	-	351 819	-	35 306	-
Januari	6 322,5	-7,01	1 229,6	-4,47	1 593,1	5,52	20 141,5	-9,86	28 358	-4,94	2 941	1,87
Februari	5 815,8	-8,01	1 133,7	-7,80	1 122,8	-29,52	19 594,5	-2,72	26 511	-6,51	2 682	-8,81
Maret	6 293,5	8,21	1 178,9	3,99	1 161,4	3,44	20 444,9	4,34	28 617	7,94	2 729	1,75
April	6 142,8	-2,39	1 165,7	-1,12	1 064,1	-8,38	20 849,9	1,98	28 434	-0,64	2 883	5,64
Mei	6 883,0	12,05	1 219,4	4,61	1 174,2	10,35	21 692,1	4,04	30 703	7,98	2 683	-6,94
Juni	6 219,4	-9,64	1 166,7	-4,32	1 348,2	14,82	22 028,7	1,55	29 159	-5,03	2 983	11,18
Juli	7 876,6	26,65	1 257,2	7,76	1 655,7	22,81	20 916,6	-5,05	28 831	-1,12	2 811	-5,77
Agustus	7 076,1	-10,16	1 335,1	6,20	1 206,0	-27,16	23 604,1	12,85	29 588	2,63	2 844	1,17
September	6 635,8	-6,22	1 219,6	-8,65	1 068,4	-11,41	21 558,1	-8,67	29 515	-0,25	2 932	3,09
Oktober	6 734,4	1,49	1 224,9	0,43	1 119,6	4,79	22 187,6	2,92	30 263	2,53	3 329	13,54
November	6 659,7	-1,11	1 178,7	-3,77	1 108,7	-0,97	22 820,1	2,85	29 690	-1,89	3 175	-4,63
Desember	7 790,3	16,98	1 462,9	24,11	1 285,6	15,96	22 407,1	-1,81	32 150	8,29	3 314	4,38
2017	7 273,7	-	1 343,8	-	1 251,0	-	21 350,3	-	30 949	-	3 304	-
Januari	7 273,7	-6,63	1 343,8	-8,14	1 251,0	-2,69	21 350,3	-4,72	30 949	-3,74	3 304	-0,30

XIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH JANUARI 2017

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Amerika pada Januari 2017 cenderung terapresiasi dibanding minggu terakhir Desember 2016. Level tertinggi nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah pada minggu terakhir Desember 2016 tercatat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp13.095,00 per dolar AS, sementara pada minggu terakhir Januari 2017 terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp13.169,38 per dolar AS. Sedangkan untuk level terendah, nilai tukar pada minggu terakhir Desember 2016 terjadi di Provinsi Banten sebesar Rp13.550,60 per dolar AS dan pada minggu terakhir Januari 2017 terjadi di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai tengah Rp13.371,25 per dolar AS.
2. Pada minggu pertama Januari 2017, jika dibanding minggu terakhir Desember 2016, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata nasional melemah 14,80 poin atau 0,11 persen. Pelemahan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 381,00 poin atau 2,91 persen.
3. Pada minggu terakhir Januari 2017, rata-rata nasional nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat 87,58 poin atau 0,65 persen dibanding kurs pada minggu terakhir Desember 2016. Penguatan rupiah terbesar terjadi di Provinsi Banten, rupiah menguat sebesar 219,10 poin atau 1,62 persen.

Rupiah terapresiasi 87,58 poin atau 0,65 persen terhadap dolar Amerika pada Januari 2017. Apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten

B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap dolar Australia di Januari 2017 cenderung mengalami depresiasi dibandingkan minggu terakhir Desember 2016. Rata-rata nasional kurs eceran rupiah terdepresiasi sebesar 55,47 poin atau melemah sebesar 0,57 persen. Depresiasi rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sebesar 398,00 poin atau melemah sebesar 4,27 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016.

Rupiah terdepresiasi 368,04 poin atau 3,81 persen terhadap dolar Australia pada Januari 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara
2. Pada minggu terakhir Januari 2017, rata-rata nasional kurs eceran rupiah terhadap dolar Australia terdepresiasi sebesar 368,04 poin atau 3,81 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016. Depresiasi rupiah yang terbesar juga terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu melemah sebesar 682,00 poin atau 7,31 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Desember 2016 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp9.330,00 per dolar Australia, sementara pada minggu terakhir Januari 2017 terjadi di Provinsi Papua sebesar Rp9.792,00 per dolar Australia. Di sisi lain, level terendah nilai tukar terhadap dolar Australia pada minggu terakhir Desember 2016 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp10.048,00 per dolar Australia dan pada minggu terakhir Januari 2017 tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar Rp10.119,50 per dolar Australia.

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Januari 2017 secara rata-rata nasional menguat 0,24 poin atau 0,21 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016. Penguatan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu 3,25 poin atau 2,84 persen.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu terakhir Januari 2017 secara rata-rata nasional tercatat melemah 2,59 poin atau 2,27 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016. Pelemahan terbesar tercatat di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 5,06 poin atau melemah 4,55 persen.
3. Level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang pada minggu terakhir Desember 2016 tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp107,50 per yen Jepang, sedangkan level terendahnya terjadi di Provinsi Banten sebesar Rp118,80 per yen Jepang. Sementara pada minggu terakhir Januari 2017, level tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp110,50 per yen Jepang, sedangkan level terendahnya terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp118,78 per yen Jepang.

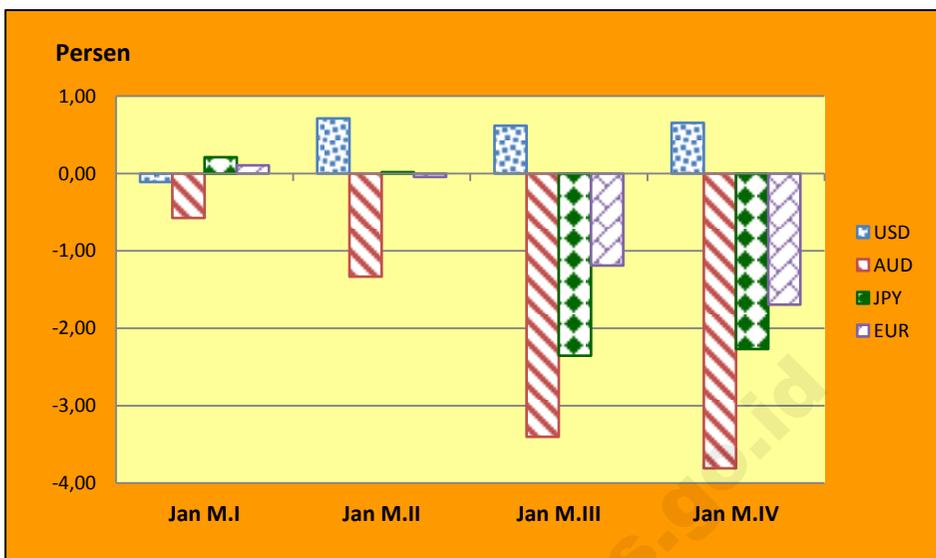
Rupiah terdepresiasi 2,59 poin atau 2,27 persen terhadap yen Jepang pada Januari 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur

D. Euro (EUR)

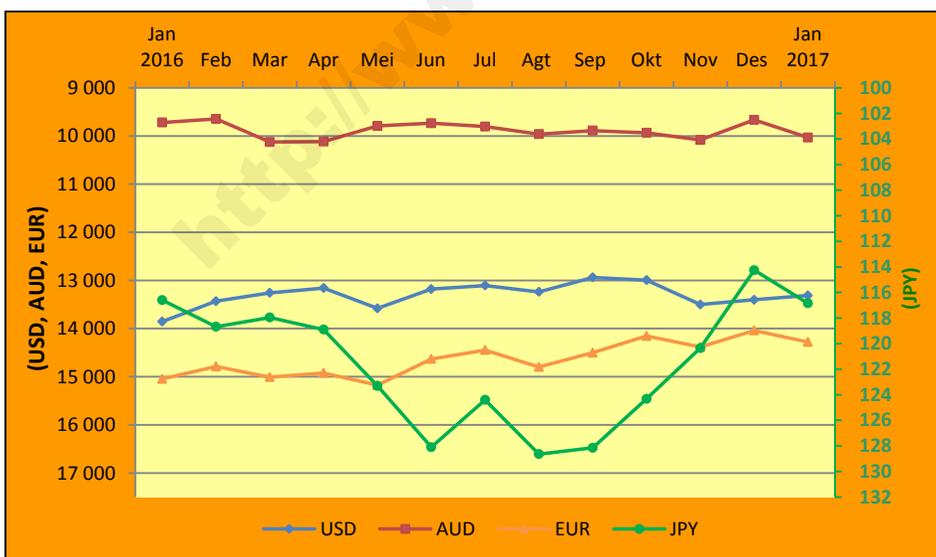
1. Nilai tukar (kurs tengah) eceran rupiah terhadap euro pada Januari 2017 pada minggu pertama mengalami apresiasi, namun pada minggu kedua sampai akhir Januari 2017 terdepresiasi dibanding minggu terakhir Desember 2016. Secara rata-rata nasional, rupiah terapresiasi sebesar 14,99 poin pada minggu pertama Januari 2017 atau menguat sebesar 0,11 persen dan sebaliknya terdepresiasi sebesar 237,93 poin pada minggu terakhir Januari 2017 atau melemah sebesar 1,69 persen dibanding minggu terakhir Desember 2016.

Rupiah terdepresiasi 237,93 poin atau 1,69 persen terhadap euro pada Januari 2017. Depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat
2. Level terendah nilai tukar rupiah terhadap euro tercatat di Provinsi Banten sebesar Rp14.685,60 per euro pada minggu terakhir Desember 2016 dan di Provinsi Riau sebesar Rp14.387,50 per euro pada minggu terakhir Januari 2017. Sementara itu, level tertinggi nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah) pada minggu terakhir Desember 2016 terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp13.783,75 per euro dan pada minggu terakhir Januari 2017 juga terjadi di Provinsi Papua, yaitu Rp14.085,38 per euro.
3. Pada minggu pertama Januari 2017, nilai tukar rupiah mengalami apresiasi terbesar di Provinsi Banten yang mencapai 617,20 poin atau 4,20 persen, sebaliknya depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Aceh yang mencapai 150,00 poin atau 1,08 persen. Pada minggu terakhir Januari 2017, apresiasi terbesar terjadi di Provinsi Banten yang mencapai 379,80 poin atau 2,59 persen, sebaliknya depresiasi terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat yang mencapai 408,07 poin atau 2,93 persen.

Grafik 13.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Januari 2017 dibanding Desember 2016 M.IV)



Grafik 13.2
Kurs Tengah Rupiah terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
(Minggu Terakhir)



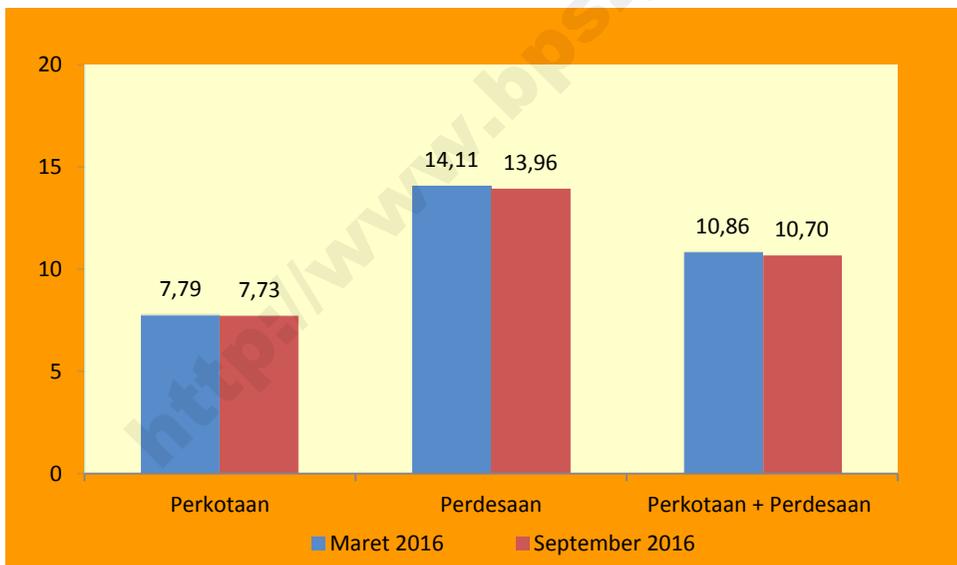
XIV. KEMISKINAN SEPTEMBER 2016

A. Perkembangan Kemiskinan Maret 2016–September 2016

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen), menurun 0,25 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang (10,86 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

Jumlah penduduk miskin pada September 2016 sebanyak 27,76 juta orang

Grafik 14.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2016–September 2016



2. pada periode Maret 2016–September 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta sebaliknya daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,39 juta orang.
3. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,24 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2016 sebesar 63,08 persen.

Tabel 14.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin)
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2016	255 181	109 346	364 527	10,34	7,79
September 2016	259 886	112 228	372 114	10,49	7,73
Perdesaan					
Maret 2016	266 132	77 514	343 646	17,67	14,11
September 2016	270 038	80 382	350 420	17,28	13,96
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2016	260 469	93 917	354 386	28,01	10,86
September 2016	264 941	97 050	361 990	27,76	10,70

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 dan September 2016

Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2016–September 2016 adalah:

- Selama periode Maret 2016–September 2016 terjadi inflasi umum relatif rendah yaitu tercatat sebesar 1,34 persen.
- Pada periode Maret 2016–September 2016, secara nasional harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras mengalami penurunan. Rata-rata harga beras turun 1,21 persen yaitu dari Rp13.301,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp13.140,00 per kg pada September 2016. Rata-rata harga cabai merah mengalami penurunan sebesar 14,06 persen yaitu dari Rp45.554,00 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp39.151,00 per kg pada September 2016. Adapun cabai rawit mengalami penurunan sebesar 13,77 persen dan telur ayam ras yang mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.
- Nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada September 2016 naik sebesar 1,42 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp47.559,00 menjadi Rp48.235,00. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan per hari pada September 2016 naik sebesar 1,23 persen dibanding upah buruh tani per hari Maret 2016, yaitu dari Rp81.481,00 menjadi Rp82.480,00.
- NTP nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,69 persen dibanding NTP bulan Maret 2016 yang sebesar 101,32.

B. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2016 –September 2016

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2016–September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,15 persen, yaitu dari Rp354.386,00 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp361.990,00 per kapita per bulan pada September 2016. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,19 persen pada bulan September 2016. Dibedakan wilayah, sumbangan GKM terhadap GK di perkotaan adalah 69,84 persen sementara di perdesaan 77,06 persen.

Tabel 14.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) Menurut Daerah, September 2016

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	69,84	Makanan:	77,06
Beras	18,31	Beras	25,35
Rokok	10,70	Rokok	10,70
Daging sapi	4,98	Daging sapi	3,47
Telur ayam ras	3,18	Gula pasir	3,01
Daging ayam ras	3,10	Telur ayam ras	2,76
Mie instan	2,43	Mie instan	2,28
Gula pasir	2,02	Daging ayam ras	2,19
Bawang merah	1,77	Bawang merah	2,10
Tempe	1,62	Kopi bubuk & kopi instan	1,58
Tahu	1,57	Tempe	1,53
Makanan Lainnya	20,16	Makanan Lainnya	22,09
Bukan Makanan:	30,16	Bukan Makanan:	22,94
Perumahan	9,81	Perumahan	7,63
Listrik	2,86	Bensin	2,31
Bensin	2,84	Listrik	1,59
Pendidikan	2,49	Pendidikan	1,49
Angkutan	1,70	Perlengkapan mandi	1,04
Perlengkapan mandi	1,28	Kayu bakar	0,90
Bukan Makanan Lainnya	9,18	Bukan Makanan Lainnya	7,98
Total	100,00	Total	100,00

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016

2. Pada September 2016, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama, yaitu beras yang memberi sumbangan sebesar 18,31 persen di perkotaan dan 25,35 persen di perdesaan. Rokok memberikan sumbangan terbesar ke dua terhadap GK perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 10,70 persen. Berbeda dengan periode sebelumnya, pada September 2016 terdapat daging sapi dalam komoditi sepuluh besar penyumbang GK, yang memberikan sumbangan 4,98 persen untuk GK perkotaan dan 3,47 persen untuk GK perdesaan. Munculnya komoditi daging sapi disebabkan pada periode September 2016 bertepatan dengan perayaan Idul Adha. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,18 persen di perkotaan dan 2,76 persen di perdesaan), mie instan (2,43 persen di perkotaan dan 2,28 di perdesaan), dan seterusnya. Selain itu, terlihat pula bahwa terdapat komoditi penyumbang terbesar GK yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Komoditi tahu hanya menjadi penyumbang GK perkotaan dan komoditi kopi bubuk & kopi instan hanya menjadi penyumbang GK perdesaan. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode Maret 2016–September 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2016 adalah 1,94 dan pada September 2016 mengalami penurunan menjadi 1,74 demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,52 menjadi 0,44 pada periode yang sama.

Tabel 14.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2016 –September 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2016	1,19	2,74	1,94
September 2016	1,21	2,32	1,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2016	0,27	0,79	0,52
September 2016	0,29	0,59	0,44

3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,21 sedangkan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 2,32. Pada periode yang sama nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan adalah 0,29 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,59.

Tabel 14.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2016

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total		
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	P ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	445 488	163,02	10,79	415 826	678,29	18,80	424 765	841,31	16,43
Sumatera Utara	413 835	690,34	9,69	388 707	762,21	10,86	401 832	1 452,55	10,27
Sumatera Barat	454 674	119,51	5,52	425 520	257,00	8,27	438 075	376,51	7,14
Riau	439 542	164,12	6,38	433 960	337,47	8,51	437 259	501,59	7,67
Jambi	448 615	116,33	10,73	349 735	174,48	7,30	379 648	290,81	8,37
Sumatera Selatan	400 159	377,88	12,73	339 874	718,62	13,77	361 696	1 096,50	13,39
Bengkulu	458 435	98,07	16,16	427 315	227,53	17,43	437 184	325,60	17,03
Lampung	398 378	227,44	10,15	357 792	912,34	15,24	368 592	1 139,78	13,86
Bangka Belitung	553 681	19,37	2,67	573 582	51,70	7,57	564 391	71,07	5,04
Kepulauan Riau	505 980	86,19	4,99	481 687	32,95	10,47	502 653	119,14	5,84
DKI Jakarta	520 690	385,84	3,75	-	-	-	520 690	385,84	3,75
Jawa Barat	332 145	2 543,30	7,55	331 237	1 624,81	11,72	332 119	4 168,11	8,77
Jawa Tengah	322 799	1 879,55	11,38	322 489	2 614,20	14,88	322 748	4 493,75	13,19
DI Yogyakarta	370 510	301,25	11,68	337 230	187,58	16,27	360 169	488,83	13,10
Jawa Timur	329 241	1 552,77	7,91	328 846	3 085,76	15,83	329 172	4 638,53	11,85
Banten	382 903	380,16	4,49	351 708	277,58	7,32	373 365	657,74	5,36
Bali	357 427	93,74	3,53	328 033	81,20	5,21	346 398	174,94	4,15
Nusa Tenggara Barat	346 581	378,83	17,55	328 775	407,75	14,82	336 573	786,58	16,02
Nusa Tenggara Timur	389 661	112,48	10,17	310 296	1 037,60	25,19	327 003	1 150,08	22,01
Kalimantan Barat	366 477	75,98	4,97	360 940	314,34	9,38	363 027	390,32	8,00
Kalimantan Tengah	357 224	40,61	4,49	392 543	96,85	5,83	380 524	137,46	5,36
Kalimantan selatan	399 162	60,90	3,43	380 647	123,26	5,37	389 273	184,16	4,52
Kalimantan Timur	535 137	89,64	3,86	510 041	121,60	10,15	526 686	211,24	6,00
Kalimantan Utara	539 499	17,25	4,50	518 305	29,78	10,29	530 566	47,03	6,99
Sulawesi Utara	314 004	59,73	5,22	322 366	140,62	10,82	318 984	200,35	8,20
Sulawesi Tengah	399 413	75,90	10,07	376 658	337,25	15,48	382 775	413,15	14,09
Sulawesi Selatan	286 669	150,60	4,47	267 428	646,21	12,30	275 361	796,81	9,24
Sulawesi Tenggara	294 286	53,18	6,87	276 978	274,11	15,31	282 161	327,29	12,77
Gorontalo	287 156	24,02	5,78	285 999	179,67	24,30	286 968	203,69	17,63
Sulawesi Barat	280 117	25,07	8,43	295 739	121,83	12,00	292 519	146,90	11,19
Maluku	424 788	54,24	7,86	423 698	277,55	26,88	424 656	331,79	19,26
Maluku Utara	405 368	12,45	3,76	379 454	63,95	7,43	386 489	76,40	6,41
Papua Barat	508 262	20,11	5,69	480 945	203,49	37,33	492 969	223,60	24,88
Papua	479 294	35,77	4,21	425 264	879,10	37,07	440 021	914,87	28,40
INDONESIA	372 114	10 485,64	7,73	350 420	17 278,68	13,96	361 990	27 764,32	10,70

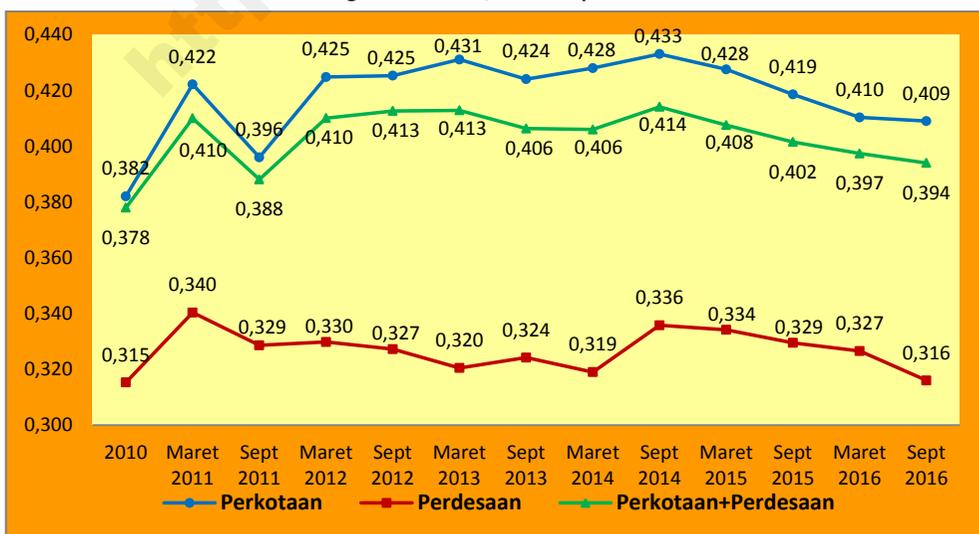
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2016

D. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran September 2015–September 2016

1. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
2. Tingkat ketimpangan pengeluaran merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pengeluaran merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran adalah *Gini Ratio* serta persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal juga dengan ukuran Bank Dunia.
3. Pada September 2016 *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,394 menurun dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada Maret 2016 yang sebesar 0,397 dan menurun pula jika dibandingkan *Gini Ratio* pada September 2015 yang sebesar 0,402. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Indonesia mengalami perbaikan selama periode September 2015–September 2016.
4. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 0,409, turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,410 dan turun dibanding *Gini Ratio* September 2015 yang sebesar 0,419. Sedangkan *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada September 2016 sebesar 0,316 turun dibanding *Gini Ratio* Maret 2016 yang sebesar 0,327 dan turun dibanding September 2015 yang sebesar 0,329.

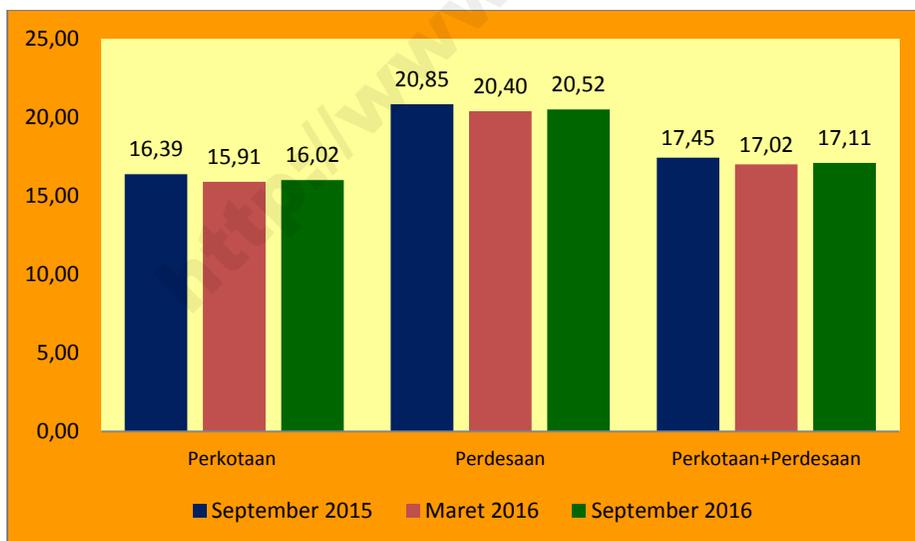
Gini Ratio pada September 2016 sebesar 0,394

Grafik 14.2
Perkembangan *Gini Ratio*, 2010–September 2016



5. Pada September 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,11 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 ini menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 17,45 persen, tetapi meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 17,02 persen.
6. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, ukuran ketimpangan Bank Dunia menunjukkan hal yang sama dengan ukuran *Gini Ratio*, yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan perdesaan. Pada September 2016 persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan tercatat sebesar 16,02 persen. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran di perkotaan termasuk pada kategori ketimpangan sedang sementara di perdesaan sebesar 20,52 persen yang berarti pada kategori ketimpangan rendah. Baik di perkotaan maupun perdesaan nilai ketimpangan pada September 2016 mengalami perbaikan dibanding periode Maret 2016, tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan September 2015.

Grafik 14.3
Perkembangan Persentase Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen terbawah
September 2015–September 2016



7. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia selama periode September 2015–September 2016 diantaranya adalah:
- Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 20 persen teratas. Kenaikan pengeluaran perkapita September 2015–September 2016 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 4,56 persen, 11,69 persen, dan 3,83 persen.
 - Menguatnya perekonomian penduduk kelas menengah (kelompok 40 persen menengah). Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri/dibantu pekerja tidak dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah sebagai dampak dari lebih kondusifnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 - Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), terjadi peningkatan jumlah pekerja yang berusaha sendiri/dibantu pekerja tidak dibayar dari 37,7 juta (Agustus 2015) menjadi 39,5 juta (Agustus 2016) atau naik sekitar 4,77 persen. Untuk sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan angkutan kenaikannya jauh lebih tinggi lagi yaitu sebesar 9,44 persen dari 18,0 juta (Agustus 2015) menjadi 19,7 juta (Agustus 2016).
 - Kenaikan pengeluaran kelompok bawah yang merefleksikan peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.
8. Berdasarkan provinsi, nilai *Gini Ratio* September 2016 tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 0,425 sementara yang terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,288. Terdapat delapan provinsi yang nilai *Gini Ratio* di atas angka nasional, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,425), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,402), Jawa Timur (0,402), Papua Barat (0,401), Sulawesi Selatan (0,400), Papua (0,399), dan DKI Jakarta (0,397).

Tabel 14.5
Gini Ratio Menurut Provinsi, September 2015–September 2016

Provinsi	September 2015			Maret 2016			September 2016		
	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + PerDesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan	Per-kotaan	Per-desaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11 Aceh	0,368	0,293	0,339	0,343	0,288	0,333	0,362	0,296	0,341
12 Sumatera Utara	0,332	0,285	0,326	0,334	0,282	0,319	0,333	0,270	0,312
13 Sumatera Barat	0,325	0,280	0,319	0,353	0,288	0,331	0,323	0,267	0,312
14 Riau	0,385	0,330	0,366	0,369	0,309	0,347	0,368	0,309	0,347
15 Jambi	0,354	0,319	0,344	0,377	0,313	0,349	0,403	0,292	0,346
16 Sumatera Selatan	0,354	0,286	0,334	0,373	0,293	0,348	0,397	0,306	0,362
17 Bengkulu	0,398	0,338	0,371	0,385	0,302	0,357	0,405	0,296	0,354
18 Lampung	0,399	0,313	0,352	0,393	0,330	0,364	0,384	0,311	0,358
19 Bangka Belitung	0,284	0,259	0,275	0,289	0,240	0,275	0,318	0,239	0,288
21 Kepulauan Riau	0,333	0,283	0,339	0,351	0,284	0,354	0,346	0,264	0,352
31 DKI Jakarta	0,421	-	0,421	0,411	-	0,411	0,397	-	0,397
32 Jawa Barat	0,446	0,310	0,426	0,423	0,317	0,413	0,412	0,310	0,402
33 Jawa Tengah	0,402	0,344	0,382	0,381	0,323	0,366	0,382	0,313	0,357
34 DI Yogyakarta	0,428	0,332	0,420	0,423	0,334	0,420	0,423	0,343	0,425
35 JawaTimur	0,428	0,327	0,403	0,423	0,333	0,402	0,433	0,313	0,402
36 Banten	0,390	0,261	0,386	0,402	0,264	0,394	0,399	0,248	0,392
51 Bali	0,406	0,350	0,399	0,369	0,329	0,366	0,378	0,335	0,374
52 Nusa Tenggara Barat	0,376	0,342	0,360	0,391	0,317	0,359	0,410	0,306	0,365
53 Nusa Tenggara Timur	0,301	0,303	0,348	0,330	0,281	0,336	0,344	0,317	0,362
61 Kalimantan Barat	0,361	0,286	0,330	0,373	0,296	0,341	0,361	0,275	0,331
62 Kalimantan Tengah	0,340	0,268	0,300	0,359	0,296	0,330	0,364	0,326	0,347
63 Kalimantan Selatan	0,374	0,282	0,334	0,346	0,297	0,332	0,363	0,298	0,351
64 Kalimantan Timur	0,319	0,273	0,315	0,314	0,288	0,315	0,314	0,313	0,328
65 Kalimantan Utara	0,322	0,282	0,314	0,304	0,268	0,300	0,308	0,280	0,305
71 Sulawesi Utara	0,356	0,345	0,366	0,386	0,355	0,386	0,388	0,350	0,379
72 Sulawesi Tengah	0,415	0,303	0,370	0,387	0,320	0,362	0,372	0,308	0,347
73 Sulawesi Selatan	0,386	0,346	0,404	0,422	0,367	0,426	0,409	0,340	0,400
74 Sulawesi Tenggara	0,411	0,355	0,381	0,407	0,367	0,402	0,395	0,352	0,388
75 Gorontalo	0,391	0,366	0,401	0,414	0,392	0,419	0,402	0,397	0,410
76 Sulawesi Barat	0,383	0,339	0,362	0,393	0,347	0,364	0,441	0,341	0,371
81 Maluku	0,328	0,307	0,338	0,327	0,313	0,348	0,338	0,303	0,344
82 Maluku Utara	0,315	0,256	0,286	0,295	0,249	0,286	0,326	0,251	0,309
91 Papua Barat	0,349	0,461	0,428	0,326	0,376	0,373	0,357	0,394	0,401
94 Papua	0,347	0,387	0,392	0,312	0,383	0,390	0,318	0,392	0,399
Indonesia	0,419	0,329	0,402	0,410	0,327	0,397	0,409	0,316	0,394

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Kor September 2015, Maret 2016, dan September 2016

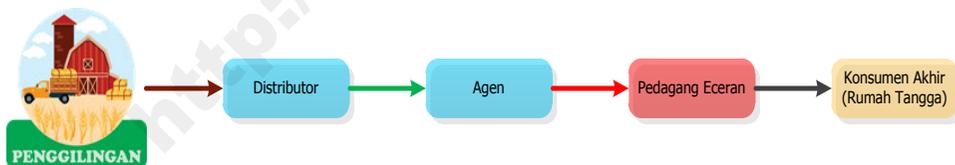
XV. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2016

A. Pola Distribusi Perdagangan

1. Distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga delapan fungsi kelembagaan usaha perdagangan.
2. Pola utama distribusi perdagangan di Indonesia untuk komoditas:
 - Beras: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Minyak goreng: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Gula pasir: Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.
 - Telur ayam ras: Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

Fungsi kelembagaan yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan komoditas strategis di Indonesia 2016 adalah distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

Gambar 15.1
Pola Distribusi Utama Perdagangan Beras di Indonesia



3. Persentase penjualan beras pada pola utama distribusi perdagangan tahun 2016 lebih kecil dibandingkan tahun 2015.
4. Potensi pola terpanjang distribusi perdagangan beras, minyak goreng, gula pasir dan telur ayam ras terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan potensi pola terpendek distribusi perdagangan beras dan telur ayam ras terjadi di Provinsi Aceh, gula pasir di Provinsi Jambi, minyak goreng di Provinsi Bengkulu

B. Peta Distribusi Perdagangan

1. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki ketergantungan beras terbesar dari luar provinsi dengan persentase 99,76 persen. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur untuk minyak goreng yaitu mencapai 98,22 persen, Provinsi Kalimantan Selatan untuk gula pasir yaitu mencapai 97,24 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk telur ayam ras yaitu mencapai 97,57 persen.
2. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mendistribusikan beras dan telur ayam ras ke luar provinsi dengan persentase terbesar yaitu 84,77 persen dan 30,67 persen. Provinsi Jambi untuk minyak goreng yaitu mencapai 94,18 persen dan DKI Jakarta untuk gula pasir yaitu 30,25 persen.
3. Jaringan perdagangan beras terluas adalah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan minyak goreng dan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta, dan telur ayam ras Provinsi di Gorontalo.

Jaringan perdagangan beras terluas adalah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan minyak goreng dan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta, dan telur ayam ras Provinsi di Gorontalo.

C. Margin Perdagangan dan Pengangkutan

1. Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2016 sebesar 10,57 persen, minyak goreng 9,79 persen, gula pasir 9,25 persen, dan telur ayam ras 8,76 persen.

Rata-rata rasio MPP beras secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2016 sebesar 10,57 persen, minyak goreng 9,79 persen, gula pasir 9,25 persen, dan telur ayam ras 8,76 persen.

Tabel 15.1
Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Nasional
Menurut Komoditas dan Fungsi Kelembagaan

No	Komoditas	Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB & PE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Beras	9,84	11,35	10,57
2	Minyak Goreng	10,08	9,51	9,79
3	Gula Pasir	9,32	9,18	9,25
4	Telur Ayam Ras	7,18	10,69	8,76

XVI. INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK), 2012–2015

A. IP-TIK Indonesia, 2012–2015

1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah.

IP-TIK disusun oleh 11 indikator yang dikombinasikan menjadi suatu ukuran standar

pembangunan TIK suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK suatu wilayah semakin pesat, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) berguna untuk membandingkan pembangunan TIK antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK dapat menunjukkan kesenjangan digital serta potensi pembangunan dan pengembangan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015. IP-TIK Indonesia tahun 2012 sebesar 4,24; tahun 2013 sebesar 4,50; tahun 2014 sebesar 4,59; dan pada tahun 2015 sebesar 4,83 pada skala 0–10.

Nilai IP-TIK juga secara tidak langsung mengukur kesiapan suatu wilayah/negara menuju era masyarakat informasi (*Information Society*). Gambaran kesiapan Indonesia menuju era masyarakat informasi dapat dilihat melalui nilai tiga subindeks penyusun IP-TIK pada Tabel 17.1. Pada tahun 2012–2015, subindeks penggunaan memiliki nilai terendah di antara dua subindeks lainnya. Sementara itu, subindeks keahlian memiliki nilai tertinggi, disusul dengan subindeks akses dan infrastruktur.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tahun 2012 sebesar 4,24; tahun 2013 sebesar 4,50; tahun 2014 sebesar 4,59; dan pada tahun 2015 sebesar 4,83 pada skala 0–10.

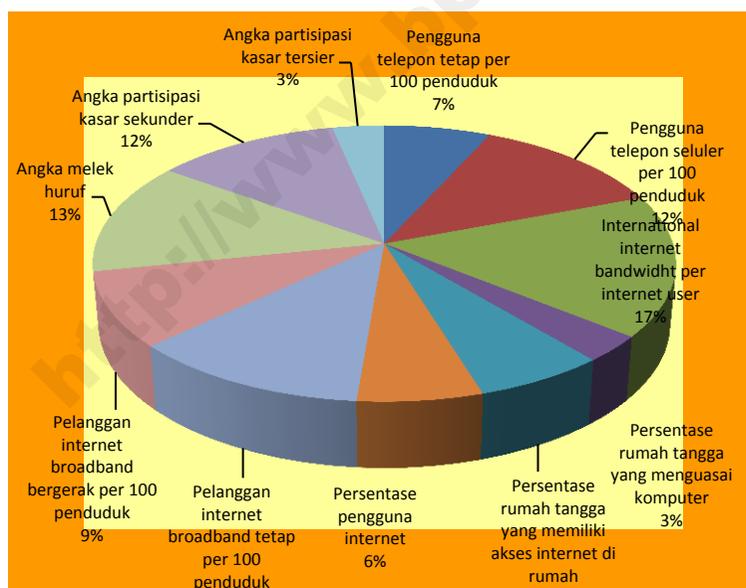
Tabel 16.1
IP-TIK Indonesia, 2012–2015

Subindeks	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akses&Infrastruktur	5,14	5,25	5,39	5,46
Penggunaan	2,24	2,70	2,73	3,20
Keahlian	6,47	6,58	6,73	6,81
IP-TIK	4,24	4,50	4,59	4,83

Keterangan: Skala 0–10

2. Sebelas indikator penyusun IP-TIK Indonesia memiliki kontribusi yang bervariasi terhadap besarnya nilai IP-TIK. Pada tahun 2015, kontribusi tertinggi diberikan oleh indikator *international internet bandwidth per internet user* sebesar 17% (subindeks akses dan infrastruktur) dan diikuti indikator angka melek huruf sebesar 13% (subindeks keahlian TIK).

Grafik 16.1
Kontribusi 11 indikator terhadap IP-TIK, 2015



B. IP-TIK Provinsi, 2012–2015

1. Nilai IP-TIK level provinsi tahun 2012–2015 dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengelompokan masing-masing kategori tahun 2012–2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 16.2
Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2012

Kategori	IP-TIK	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
Rendah	$\leq 4,03$	22 provinsi	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
Sedang	4,03–6,22	10 provinsi	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Tinggi	$\geq 6,22$	1 provinsi	DKI Jakarta

Catatan: Penentuan baseline berdasarkan rata-rata dan nilai ideal IP-TIK 33 provinsi tahun 2012

- ❖ Kategori IP-TIK rendah bila nilai IP-TIK provinsi berada di bawah rata-rata.
- ❖ Kategori IP-TIK tinggi bila nilai IP-TIK provinsi berada di atas nilai ideal.
- ❖ Kategori IP-TIK sedang bila nilai IP-TIK provinsi berada di antara rata-rata dan nilai ideal.

Tabel 16.3
Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2013

Kategori	IP-TIK	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
Rendah	$\leq 4,41$	23 provinsi	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
Sedang	4,41-6,63	9 provinsi	Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.
Tinggi	$\geq 6,63$	1 provinsi	DKI Jakarta

Catatan: Penentuan baseline berdasarkan rata-rata dan nilai ideal IP-TIK 33 provinsi tahun 2013

- ❖ Kategori IP-TIK rendah bila nilai IP-TIK provinsi berada di bawah rata-rata.
- ❖ Kategori IP-TIK tinggi bila nilai IP-TIK provinsi berada di atas nilai ideal.
- ❖ Kategori IP-TIK sedang bila nilai IP-TIK provinsi berada di antara rata-rata dan nilai ideal.

Tabel 16.4
Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2014

Kategori	IP-TIK	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
Rendah	≤4,51	24 provinsi	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
Sedang	4,51–6,81	8 provinsi	Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara
Tinggi	≥6,81	1 provinsi	DKI Jakarta

Catatan: Penentuan baseline berdasarkan rata-rata dan nilai ideal IP-TIK 33 provinsi tahun 2014

- ❖ Kategori IP-TIK rendah bila nilai IP-TIK provinsi berada di bawah rata-rata.
- ❖ Kategori IP-TIK tinggi bila nilai IP-TIK provinsi berada di atas nilai ideal.
- ❖ Kategori IP-TIK sedang bila nilai IP-TIK provinsi berada di antara rata-rata dan nilai ideal.

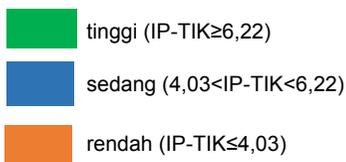
Tabel 16.5
Kategori IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2015

Kategori	IP-TIK	Jumlah Provinsi	Nama Provinsi
Rendah	≤4,69	22 provinsi	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
Sedang	4,69–7,07	11 provinsi	Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara
Tinggi	≥7,07	1 provinsi	DKI Jakarta

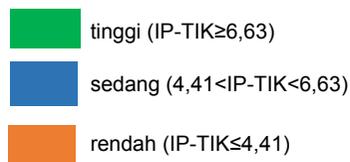
Catatan: Penentuan baseline berdasarkan rata-rata dan nilai ideal IP-TIK 34 provinsi tahun 2015

- ❖ Kategori IP-TIK rendah bila nilai IP-TIK provinsi berada di bawah rata-rata.
- ❖ Kategori IP-TIK tinggi bila nilai IP-TIK provinsi berada di atas nilai ideal.
- ❖ Kategori IP-TIK sedang bila nilai IP-TIK provinsi berada di antara rata-rata dan nilai ideal.

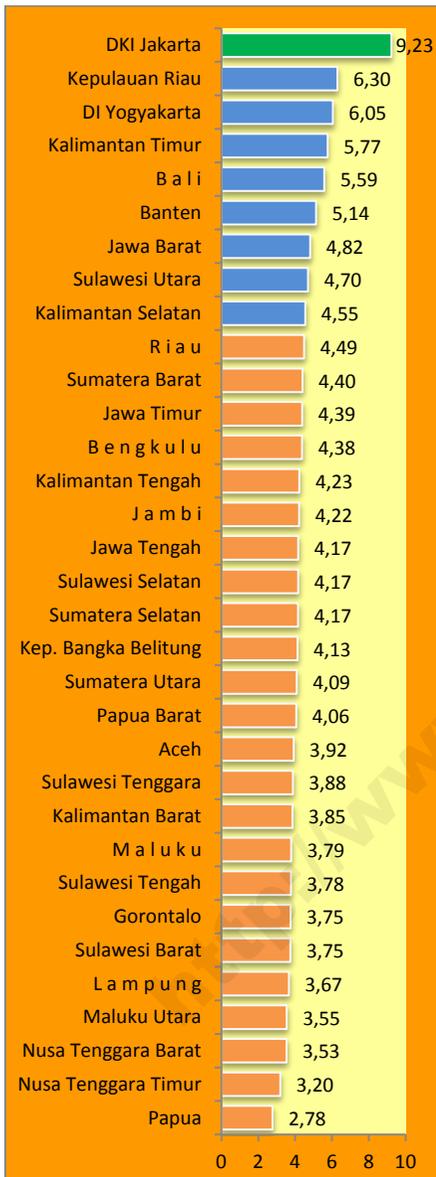
Grafik 16.2 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2012



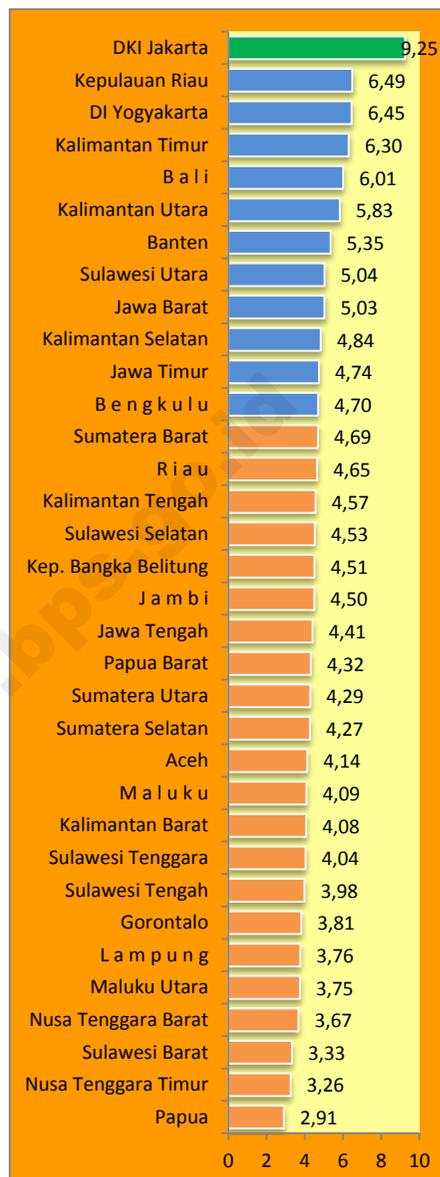
Grafik 16.3 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2013



Grafik 16.4 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2014



Grafik 16.5 IP-TIK Provinsi di Indonesia, 2015



■ tinggi (IP-TIK ≥ 6,81)
■ sedang (4,51 < IP-TIK < 6,81)
■ rendah (IP-TIK ≤ 4,51)

■ tinggi (IP-TIK ≥ 7,07)
■ sedang (4,69 < IP-TIK < 7,07)
■ rendah (IP-TIK ≤ 4,69)



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006